



Kemendikdasmen

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
REPUBLIK
INDONESIA

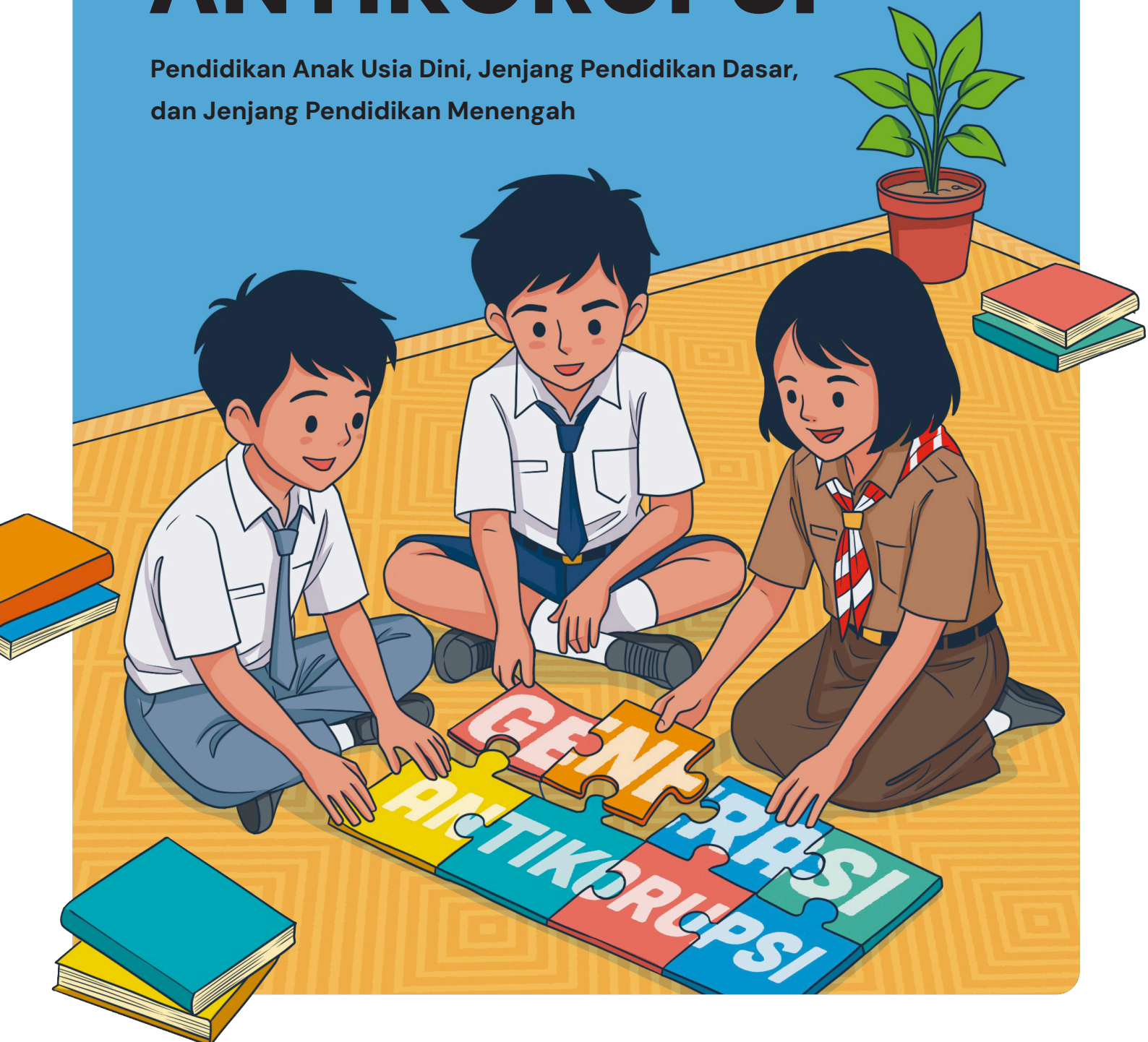


KEMENTERIAN
AGAMA
REPUBLIK
INDONESIA

PANDUAN

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,
dan Jenjang Pendidikan Menengah





Kemendikdasmen

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
REPUBLIK
INDONESIA



KEMENTERIAN
AGAMA
REPUBLIK
INDONESIA

PANDUAN

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,
dan Jenjang Pendidikan Menengah



Panduan Pendidikan Antikorupsi Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah

Penasehat

Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Setyo Budiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D., Menteri Dalam Negeri
Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA., Menteri Agama
Ibnu Basuki Widodo, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

Pengarah

Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc., Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah
Dr. Ir. Wawan Wardiana, M.T., Deputi Bidang Pendidikan & Peran Serta Masyarakat KPK
Irjen. Pol. Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H., Inspektur Jenderal Kemendagri
Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App.Sc., Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri

Penanggung Jawab

Dr. Laksmi Dewi., M.Pd., Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Dian Novianthi, Direktur Jejaring Pendidikan KPK

Tim Penyusun

Prof. Dr. Ence Oos M Anwas, M.Si., Badan Riset dan Inovasi Nasional
Drs. Zulfikri, M.Ed., Universitas Terbuka
Bariroh Barid, S.Sos., MGPP., Komisi Pemberantasan Korupsi
Ramah Handoko, S.Sn., M.Pd., Komisi Pemberantasan Korupsi
Anis Wijayanti, S.Si., M.A., Komisi Pemberantasan Korupsi
Kristiyanti, S.Pd., Komisi Pemberantasan Korupsi
Sepvina Mutikasari, S.M., Komisi Pemberantasan Korupsi
Hani Mairina Matan, S.Sos, MKKK, Komisi Pemberantasan Korupsi
Muhammad Haikal, S.E., Komisi Pemberantasan Korupsi
Dra. Lestyani Yuniarsih, M.Ed.Adm., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Anggraeni, S.Pd., M.Pd., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Aulia Safitri, S.Pd., RA Raudhatul Amin, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Siti Choirotunnisak, S.Pd.I., M.Pd., MI Al Huda Ploso, Kab. Nganjuk, Jawa Timur
Sopian, M.Pd., SMPN Ekologi Kahuripan Padjajaran, Kab. Purwakarta, Jawa Barat
Wijaya Kurnia Santoso, M.Pd., SMA Bina Insan Mandiri, Nganjuk, Jawa Timur

Tim Penelaah

Dr. Laksmi Dewi, M.Pd., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Dr. Muhammad Yusro, S.Pd, M.T, M.Pd., Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah
Irsyad Zamjani, Ph.D., Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan-Kemendikdasmen
Supriyatno, S.Pd, M.A., Pusat Perbukuan-Kemendikdasmen
Dr. Yogi Anggraena, M.Si., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Nur Rofika Ayu Shinta Amalia, S.Si., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
M. Heru Iman Wibowo, S.Si., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Dr. Zaim Uchrowi, Praktisi
Prof. Dr. Een Y. Haenilah, M.Pd., Universitas Lampung
Muhammad Iqbal, S.Pd., M.Si., Universitas Pendidikan Indonesia
Prof. Udian Kusmawan, M.A. Ph.D., Universitas Terbuka
Dr. Della Raymena Jovanka, S.Pd., M.Si, Universitas Terbuka
Dr. Achmad Anwar Abidin, M.Pd.I, Universitas Terbuka
Nisa A'rafiyah Tri Wulandari, M.Pd., Universitas Terbuka

Kontributor

Budi Setiawan, Yayasan Guru Belajar
Dwi Setiyowati, S.Si., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Piksa Dewi Ekantiningasih, M.Pd., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Fadhila Nadya Imania, S.Pd., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Dr. Mustakim, UPT Teknologi Informasi Komunikasi dan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Nina Rahayu, S.Pd., M.M.Pd., Dinas Pendidikan Kota Bandung
Sugian Noor, M.Pd., Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
Dra. Irene M.M.Ermaya, M.Pd., Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Esthy Indra Imanistiti, S.Pd., TKN Semper, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Sri Sayekti, M.Pd., SD Muh 1 Ketelan, Solo, Jawa Tengah
Iwan Muharji, S.Pd., SMPN 3 Ngawen, Kab. Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Dra. Vera Varianti, M.Pd., SMAN 1 Citereup, Kab. Bogor, Jawa Barat
Dr. Riris Choerunnisa, M.Pd., SMK Pelita 1 Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat
Li'lli Nur Indah Sari, S.Sos., Arsyia Education
Wirentake, S.Pd., M.Pd., SD Negeri 3 Perigi, Nusa Tenggara Barat
Zulkifli Tryputra, S.E., SMP Lazuardi Athallah Makassar, Sulawesi Selatan
Maurensyiah P.S., M.Pd., SMAN 22 Makassar, Sulawesi Selatan
Dina Marta Aulianingrum, S.Pd., SMKN 3 Pekalongan, Jawa Tengah
Sarmina Tampubolon, S.T., PKBM Permata Unggul Semarang, Jawa Tengah
Lisza Megasari, S.Pd., SLB Negeri Binjai, Sumatera Utara

Ilustrasi dan Tata Letak

Studio Kawa Kreatif Indonesia

Penerbit

Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPD)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jakarta, 2026

Sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan Pendidikan Antikorupsi ini dapat disusun dan diterbitkan sebagai salah satu upaya penguatan karakter murid di Indonesia.

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks tersebut, pendidikan antikorupsi menjadi bagian strategis dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, keadilan, kepedulian, dan keberanian sejak dini.

Korupsi bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan juga persoalan karakter dan budaya. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan melalui pendidikan yang membangun kesadaran, sikap, dan kebiasaan hidup berintegritas dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah sebagai ruang pembelajaran dan pembentukan karakter memiliki posisi yang sangat penting dalam menumbuhkan budaya antikorupsi secara berkelanjutan.

Panduan ini disusun untuk memberikan acuan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Pendidikan antikorupsi tidak dimaksudkan sebagai mata pelajaran tersendiri, melainkan diimplementasikan secara kontekstual melalui berbagai aktivitas pendidikan yang relevan dengan kehidupan murid.

Kami berharap panduan ini dapat membantu satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, transparan, dan menjunjung tinggi nilai integritas. Keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada keteladanan dan kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini memberikan manfaat yang luas dan menjadi bagian dari upaya bersama

generasi Indonesia yang berkarakter, berintegritas, dan berakhlak mulia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu demi Indonesia yang maju dan bermartabat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah



Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.



Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga buku “Panduan Pendidikan Antikorupsi: Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah” ini dapat tersusun dengan baik.

Membangun bangsa yang besar bukan sekadar mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga generasi yang memiliki keteguhan moral dan kejujuran di dalam hatinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat menyadari bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah tuntas hanya melalui penegakan hukum semata. Akar dari perubahan yang abadi ada pada pendidikan. Pada setiap nilai integritas yang kita semai di ruang-ruang kelas hari ini.

Secara khusus, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu Guru di seluruh pelosok Nusantara. Anda adalah ujung tombak dan penggerak utama perubahan ini. Kami memahami bahwa mendidik karakter di tengah tantangan zaman saat ini bukanlah tugas yang mudah. Namun, melalui ketulusan dan dedikasi Anda, kami menitipkan harapan agar nilai integritas dapat tumbuh menjadi jati diri setiap anak didik kita.

Kehadiran buku panduan ini adalah bukti nyata dari indahny kolaborasi. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas kerja keras dan komitmennya dalam menyusun materi yang komprehensif ini. Terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama atas sumbangsih pemikiran, masukan berharga, serta dukungannya yang luar biasa dalam proses penyebarluasan buku ini ke seluruh satuan pendidikan dan madrasah di Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku ini hanyalah sebuah panduan di atas kertas. Keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Oleh karena itu, kami memohon dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah daerah, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal penerapan panduan ini.

Mari kita melangkah bersama dengan hati, memastikan pendidikan antikorupsi bukan sekadar hafalan, melainkan menjadi napas kehidupan bagi generasi penerus bangsa. Semoga ikhtiar mulia ini menjadi ladang amal bagi kita semua demi Indonesia yang lebih bersih, adil, dan bermartabat.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi



Setyo Budiyo

Daftar Isi

Sambutan	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Istilah	ix
Bagaimana Menggunakan Panduan Ini?	xvii
1 Kondisi Korupsi di Indonesia.....	1
1.1 Kondisi korupsi: Seperti apa di Indonesia?.....	2
1.2 Penyebab.....	9
1.3 Dampak	11
2 Urgensi Pendidikan Antikorupsi.....	16
2.1 Apa itu Pendidikan Antikorupsi (PAK)?.....	17
2.2 Strategi Pendidikan Antikorupsi (PAK).....	20
2.3 Nilai-nilai Integritas	20
2.4 Urgensi Integrasi PAK dalam Kurikulum dan Pembelajaran	24
3 Strategi dan Peran Satuan Pendidikan dalam Membangun Budaya Antikorupsi	28
3.1 Budaya Sekolah Berintegritas: Seperti Apakah Itu?.....	29
3.2 Strategi Implementasi PAK.....	30
3.3 Peran Warga Sekolah/Madrasah	35
3.4 Disiplin Positif dan Segitiga Restitusi: agar Karakter Tumbuh dari Dalam	37
4 Pengintegrasian PAK ke dalam Pembelajaran.....	41
4.1 Peta Kompetensi.....	42
4.2 Implementasi PAK pada Intrakurikuler	52
4.3 Implementasi PAK pada Kokurikuler.....	72
4.4 Implementasi PAK pada Ekstrakurikuler.....	81
4.5 Implementasi PAK melalui Budaya Sekolah.....	95
4.6 Asesmen/penilaian PAK	97
4.7 Evaluasi Pelaksanaan Program	101
5 Peran Sentral Jejaring Pendidikan dalam Pendidikan Antikorupsi	113
5.1 Prinsip Kemitraan dalam Mendukung Implementasi PAK.....	114
5.2 Pendekatan <i>Penta Helix Collaboration</i> dalam Upaya Pemberantasan Korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi.....	117
Daftar Pustaka	127



Daftar Istilah

Antikorupsi

Sikap, perilaku dan tindakan mencegah, menolak serta melawan segala bentuk penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi/kelompok serta bentuk korupsi lainnya.

Berjenjang dan Berkelanjutan

Salah satu prinsip Pendidikan Antikorupsi yang memiliki definisi bahwa pelaksanaan pendidikan antikorupsi dilakukan secara bertahap dari tingkat dasar hingga lanjutan serta dilakukan secara terus-menerus untuk membiasakan dan menanamkan nilai integritas.

Budaya Sekolah Berintegritas

Bentuk pembiasaan pada satuan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai antikorupsi/integritas dalam tata kelola, budaya, dan proses pembelajaran serta mendorong seluruh warganya untuk menolak segala bentuk kecurangan dan korupsi.

Buku Kebaikan

Suatu media pembelajaran sederhana yang digunakan oleh murid-murid di MI Al-Huda Ploso, Nganjuk, Jawa Timur untuk mencatat kegiatan kebaikan-kebaikan yang telah mereka laksanakan. Kegiatan tersebut merupakan aturan-aturan sederhana yang harus murid lakukan dan dicatat di Buku Kebaikan.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Denormalisasi

Kondisi menjadikan antikorupsi dan perilaku berintegritas sebagai budaya dan kewajaran (sebagai lawan dari normalisasi korupsi).

Dilema Etis

Situasi yang mengharuskan seseorang untuk memilih antara dua atau lebih opsi yang keduanya benar atau baik, tetapi memiliki nilai moral dan etika yang lebih benar atau lebih baik atau bahkan terbaik.

Disiplin Positif

Sebuah pendekatan mendisiplinkan murid yang berfokus pada pembelajaran, pemberdayaan dan hubungan yang saling menghargai, bukan pada hukuman atau rasa takut yang bertujuan membantu murid mengembangkan kemampuan mengelola diri, membuat keputusan yang bertanggung jawab serta memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

Diskriminasi

Pembedaan perlakuan, pembatasan dan pengecualian terhadap sesama warga negara berdasarkan ras, warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya yang berdampak mengurangi, bahkan meniadakan pengakuan dan pelaksanaan hak asasi manusia secara setara.

Ekosistem Pendidikan

Pendidikan sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri atas berbagai elemen yang saling terkait dan berinteraksi untuk menciptakan lingkungan kondusif untuk mencapai tujuan pendidikan.

Ekstrakurikuler

Kegiatan pengembangan minat, bakat, dan kepedulian sosial murid di luar jam pelajaran wajib, yang bersifat sukarela dan bertujuan memperkuat karakter, kepemimpinan serta partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.



Indeks Persepsi Korupsi

Pengukuran (indeks komposit) persepsi publik terhadap tingkat korupsi di suatu negara yang dilaksanakan setiap tahun oleh Transparency International.

Intrakurikuler

Kegiatan pembelajaran utama yang dirancang dalam struktur kurikulum dan dilaksanakan secara terjadwal untuk mencapai capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan.

Jumat Bersepeda KK

Akronim dari nilai-nilai antikorupsi, yaitu Jujur, Mandiri, Tanggungjawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.

Kendis (Kartu Kendali Disiplin Siswa)

Salah satu program sekolah di SMPN Ekologi Kahuripan Padjajaran, Purwakarta yang merupakan sebuah inovasi sekolah yang dirancang untuk menumbuhkan karakter antikorupsi pada diri murid. Kartu ini berfungsi sebagai izin resmi yang harus digunakan oleh murid setiap kali ingin keluar kelas pada saat jam pelajaran berlangsung.

Kepemimpinan Transformasional

Gaya kepemimpinan yang berfokus pada inspirasi, motivasi, dan pemberdayaan individu untuk mencapai potensi tertinggi mereka dan mendorong perubahan positif dalam organisasi.

Ketaatan pada Aturan

Salah satu elemen pada peta kompetensi Pendidikan Antikorupsi yang memiliki pengertian menjalankan aturan secara sadar dan konsisten.

Kokurikuler

Kegiatan pembelajaran yang melengkapi dan memperkuat intrakurikuler melalui pengalaman kontekstual, kolaboratif, dan reflektif agar murid dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata.

Kolaboratif

Salah satu prinsip Pendidikan Antikorupsi yang memiliki definisi bahwa pelaksanaan pendidikan antikorupsi melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga, untuk bersama-sama memberantas korupsi.

Komprehensif

Salah satu prinsip Pendidikan Antikorupsi yang memiliki definisi bahwa pelaksanaan pendidikan antikorupsi harus mencakup seluruh aspek pendidikan, mulai dari pengetahuan, sikap, hingga keterampilan, dan melibatkan berbagai pihak dalam upaya pencegahan korupsi.

Konsep Kepemilikan

Salah satu elemen pada peta kompetensi Pendidikan Antikorupsi yang memiliki pengertian menghormati hak kepemilikan dan bertanggung jawab atas penggunaan barang milik pribadi, orang lain, publik, dan negara.

Korupsi

Secara bahasa merupakan perbuatan merusak, tidak jujur, busuk, dll, sedangkan secara istilah perundangan merupakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Membangun Budaya Antikorupsi

Salah satu elemen pada peta kompetensi Pendidikan Antikorupsi yang memiliki tujuan bahwa murid harus memiliki literasi antikorupsi serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang membangun budaya antikorupsi.

Menjaga Amanah

Salah satu elemen pada peta kompetensi Pendidikan Antikorupsi yang mempelajari tentang bagaimana menjalankan tugas atau kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan integritas, termasuk dalam situasi konflik kepentingan.

Nepotisme

Penyalahgunaan kekuasaan untuk memberikan keuntungan, jabatan, atau fasilitas kepada keluarga atau kedekatan lainnya, bukan berdasarkan kemampuan atau kelayakan sehingga dapat merusak prinsip keadilan serta integritas dalam pelayanan publik.

Nilai-nilai antikorupsi/integritas

Nilai-nilai yang menjadi pedoman karakter individu untuk mencegah tindakan korupsi dan perilaku koruptif.

Nilai Jujur

Salah satu nilai antikorupsi yang memiliki definisi bertindak lurus, tidak berbohong, dan tidak curang.

Nilai Mandiri

Salah satu nilai antikorupsi yang memiliki definisi mengandalkan diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain.

Nilai Tanggung jawab

Salah satu nilai antikorupsi yang memiliki definisi bersedia menanggung segala akibat dari perbuatannya.

Nilai Berani

Salah satu nilai antikorupsi yang memiliki definisi memiliki keberanian untuk berkata benar dan melakukan yang benar.

Nilai Sederhana

Salah satu nilai antikorupsi yang memiliki definisi hidup tidak berlebihan.

Nilai Peduli

Salah satu nilai antikorupsi yang memiliki definisi mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan orang lain atau sekitar.

Nilai Disiplin

Salah satu nilai antikorupsi yang memiliki definisi patuh pada peraturan dan komitmen.

Nilai Adil

Salah satu nilai antikorupsi yang memiliki definisi berlaku adil tanpa memihak.

Nilai Kerja Keras

Salah satu nilai antikorupsi yang memiliki definisi bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah.

Penegakan Aturan

Upaya sadar dan berkesinambungan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma atau peraturan serta memberikan konsekuensi yang adil atas pelanggaran, guna menciptakan tatanan yang tertib dan berintegritas.

Pendidikan Antikorupsi

Proses pembentukan karakter dan internalisasi nilai antikorupsi melalui kurikulum dengan didukung penguatan integritas ekosistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter dan budaya antikorupsi pada murid.

Pengelolaan Dilema Etis

Salah satu elemen pada peta kompetensi Pendidikan Antikorupsi yang mempelajari proses membuat keputusan sulit ketika dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang bertentangan, di mana tidak ada pilihan yang sepenuhnya dapat diterima secara etika.

Penta Helix Collaboration Model

Model kolaborasi multipihak yang melibatkan lima aktor utama, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas, dan media untuk bekerja bersama secara sinergis, inovatif, dan berkelanjutan dalam memecahkan permasalahan publik.

Perilaku Koruptif

Tindakan atau perbuatan yang melanggar nilai integritas, norma dan etika yang mencerminkan ketidakjujuran, penyalahgunaan kepercayaan, dan sikap tidak bertanggung jawab yang berpotensi menjadi bibit tindakan korupsi.

Plagiarisme

Tindakan mengakui, menggunakan, menyalin/menjiplak atau melanggar hak cipta, karya, ide, atau hasil kerja orang lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa mencantumkan sumber secara benar dan jujur serta menjadikannya seolah-olah hasil karya sendiri.

Prinsip Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Landasan-landasan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi secara menyeluruh dan efektif kepada masyarakat pada umumnya dan kepada murid pada khususnya.

Ratifikasi

Pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian (internasional) oleh negara yang berwenang.

Segitiga Restitusi

Sebuah pendekatan disiplin untuk membantu murid memperbaiki kesalahan, mengembalikan dirinya pada identitas yang lebih baik, dan bertanggung jawab tanpa hukuman melalui tahapan menstabilkan identitas, menggali keyakinan dan menawarkan pilihan mengoreksi demi memperbaiki hubungan dan nilai yang diyakini.

Sintas Santik (Sekolah Integritas, Sekolah Antikorupsi)

Program Sekolah Integritas, Sekolah Antikorupsi yang diimplementasikan oleh sekolah, seperti SMA Bina Insan Mandiri, Nganjuk, Jawa Timur untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi sejak dini.

Substantif

Salah satu prinsip Pendidikan Antikorupsi yang memiliki definisi bahwa pelaksanaan pendidikan antikorupsi harus fokus pada substansi atau inti materi pendidikan antikorupsi untuk membentuk pemahaman yang mendalam mengenai berbagai bentuk korupsi.

Strategi Internalisasi nilai

Cara atau pendekatan melalui proses sistematis yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai tertentu.

Tender

Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi syarat.

Teori Segitiga Fraud (*Fraud Triangle*)

Model yang menjelaskan tiga faktor utama yang mendorong seseorang melakukan kecurangan (*fraud*), yaitu: Tekanan (*Pressure*), Kesempatan (*Opportunity*), dan Rasionalisasi (*Rationalization*).

Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melakukannya.

Bagaimana Menggunakan Panduan Ini ?

1 Pendahuluan

Pendidikan Antikorupsi (PAK) di sekolah bukan sebagai mata pelajaran baru. Implementasi PAK diintegrasikan pada setiap mata pelajaran dan kegiatan sekolah. Peran guru adalah mengintegrasikan setiap topik pembelajaran yang relevan dengan elemen PAK merujuk pada Peta Kompetensi PAK (ketaatan pada aturan, konsep kepemilikan, menjaga amanah, pengelolaan dilema etis, dan membangun budaya antikorupsi). Guru dan sekolah juga perlu bekerja sama dengan para pihak dalam membangun budaya PAK di sekolah.

Integrasi PAK dalam pembelajaran dapat dilakukan pada: tujuan, materi, metode, dan asesmen dengan prinsip: integratif, kontekstual, partisipatif, berbasis aktivitas murid, dan berkelanjutan. Pembelajaran dilaksanakan melalui integrasi, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler untuk memberikan pengalaman belajar yang komprehensif, memperkuat karakter, dan mengoptimalkan potensi murid dan sekolah. Pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas/sekolah, tetapi juga melalui proyek berbasis komunitas, advokasi, kampanye nilai antikorupsi, dan kegiatan reflektif yang membangun kesadaran. PAK ini dirancang untuk tidak sekadar mengenalkan murid pada norma antikorupsi, tetapi juga membentuk keyakinan moral dan komitmen internal terhadap nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.

Buku Panduan ini disusun untuk guru, yang ditujukan untuk menguatkan wawasan serta memudahkan dan menginspirasi para pendidik dalam mengimplementasikan PAK yang terintegrasi dalam pembelajaran. Contoh-contoh rancangan dan implementasi PAK hanya sebagai inspirasi saja, pendidik sangat perlu menyesuaikan dengan kondisi murid, sekolah, dan sosial budaya masyarakat lokal.

2 Isi Ringkas Setiap Bab

Buku panduan ini terdiri atas lima bab. Guru disarankan mempelajari seluruh bab agar memahami esensi, alur, dan penerapan PAK secara utuh. Adapun ringkasan isi setiap bab adalah sebagai berikut.

Judul Bab	Isi Ringkas
<p>Bab 1 Kondisi Korupsi di Indonesia</p>	<p>Perilaku korupsi terjadi tidak hanya berupa kasus besar, tetapi terjadi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah, seperti menyontek, tidak menjalankan amanah yang diberikan, tidak disiplin, tidak menjaga atau tidak menggunakan barang milik bersama dengan baik.</p> <p>Bab 1 menjelaskan konsep serta contoh korupsi dan perilaku koruptif, beserta penyebab dan dampaknya. Oleh karena itu, PAK perlu dihadirkan sebagai garda awal pencegahan sejak dini melalui pembelajaran di sekolah.</p>
<p>Bab 2 Urgensi Pendidikan Antikorupsi</p>	<p>Bab ini menjadi landasan etika dan pedagogis yang menjelaskan mengapa PAK perlu terintegrasi dalam kurikulum melalui internalisasi nilai-nilai antikorupsi dengan dukungan ekosistem sekolah berintegritas serta lima prinsip PAK, yaitu: substantif, berjenjang dan berkelanjutan, komprehensif, kreatif dan relevan serta kolaboratif. Oleh karena itu, PAK perlu diintegrasikan melalui lintas mata pelajaran dan jenjang sebagai upaya berkelanjutan membentuk sikap dan karakter murid dan menumbuhkan budaya sekolah berintegritas.</p>
<p>Bab 3 Strategi dan Peran Satuan Pendidikan dalam Membangun Budaya Antikorupsi</p>	<p>Bab 3 bagaimana sekolah membentuk karakter dan budaya antikorupsi, strategi implementasi PAK yang dapat disesuaikan dengan konteks sekolah serta peran warga sekolah/madrasah (murid, guru, kepala sekolah, staf sekolah, penjaga kantin dan keamanan, komite sekolah dan orangtua) dalam membangun budaya PAK. Semua aspek tersebut diwujudkan dalam Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan konteks sekolah.</p>
<p>Bab 4 Pengintegrasian PAK ke dalam Pembelajaran</p>	<p>Bagian ini menyajikan Peta Kompetensi PAK sebagai panduan praktis untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran, pembiasaan, dan budaya sekolah. Pengintegrasian ini dapat dilakukan pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler tanpa menambah beban karena diturunkan dari elemen kurikulum nasional. Peta Kompetensi tersebut merumuskan lima elemen kunci, yaitu: ketaatan pada aturan, konsep kepemilikan, menjaga amanah, pengelolaan dilema etis, dan membangun budaya antikorupsi.</p>

Judul Bab	Isi Ringkas
	<p>Elemen ini menjadi rambu bagi guru dalam memilih nilai, merancang aktivitas, mengidentifikasi contoh-contoh perilaku teramati serta menyiapkan asesmen yang relevan. Pada bab ini juga disajikan contoh-contoh inspiratif dalam mengintegrasikan PAK baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.</p>
<p>Bab 5 Peran Sentral Jejaring Pendidikan dalam Pendidikan Antikorupsi</p>	<p>Bab terakhir menegaskan perlunya PAK berkolaborasi dengan multipihak, yaitu: pemerintah, dunia usaha, komunitas/LSM, akademisi, media, orang tua, dan satuan pendidikan yang bekerja transparan, akuntabel, inklusif, berkomitmen serta dimonitor/dievaluasi secara berkala. Secara teknis pada bab ini menyajikan prinsip-prinsip kemitraan dalam mendukung implementasi PAK; memperkenalkan model Penta Helix (G-B-C-A-M) sebagai kerangka kolaborasi; dan contoh-contoh inspiratif sekolah dalam melakukan kolaborasi implementasi PAK.</p>

3 Tips Merancang Implementasi PAK

Setelah memahami isi buku ini, berikutnya adalah bagaimana merancang implementasi PAK di sekolah. Secara ringkas guru dapat melakukan beberapa tips praktis sebagai berikut.

- Identifikasi tujuan/topik pembelajaran yang sesuai dengan Peta Kompetensi Pendidikan Antikorupsi.
- Pilih nilai-nilai/karakter PAK yang paling relevan (Peta Kompetensi Bab 4).
- Identifikasi contoh-contoh perilaku nyata dalam kehidupan keseharian yang sesuai dengan nilai-nilai/karakter PAK dan dapat diamati.
- Rancang aktivitas singkat 5-10 menit (studi kasus, diskusi, *role-play*, jurnal refleksi, komitmen kelas mingguan, kantin kejujuran, *storytelling*, *peer mentoring*, observasi kebiasaan, keterlibatan orangtua, dan sejenisnya).
- Gunakan asesmen formatif sederhana (esensinya mengukur perilaku, baik melalui tes maupun pengamatan) tujuannya untuk mendapatkan data dan informasi tentang kebutuhan belajar murid dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan untuk mendapatkan nilai atau angka.
- Dokumentasikan bukti singkat, misalnya: catatan guru, foto/video, refleksi murid, dan sejenisnya.

4 Tips Pelaksanaan PAK yang Kreatif

Bagaimana guru mengimplementasikan PAK yang disesuaikan dengan konteks sekolah dan sosial budaya masyarakat lokal. Secara ringkas guru dapat melakukan beberapa tips praktis sebagai berikut.

- Utamakan konteks lokal, misalnya: antre kantin, kerja kelompok, piket kelas, dan sejenisnya sesuai konteks lokal.
- Mulai hal kecil, tetapi konsisten, misalnya: lima menit integritas, komitmen kelas mingguan, dan umpan balik positif.
- Projek lintas-mapel sederhana, misalnya: audit transparan uang kelas, kampanye antre rapi, kantin kejujuran, dan contoh-contoh nyata lainnya.
- Gunakan sumber daya sederhana: poster tulis tangan, kartu peran, jurnal refleksi, atau media lainnya yang sesuai kondisi sekolah.
- Semua murid terlibat (inklusif); aman (secara fisik dan psikologis): menghindari label negatif (misalnya: identitas pembohong, nakal, pencuri, dan lain-lain).
- Prioritaskan pendekatan restoratif pada pelanggaran ringan, biasakan anak untuk menyadari konsekuensi dari apa yang dilakukan, hindari jalan pintas melalui hukuman atau sanksi.
- Libatkan jejaring: orang tua, tokoh adat/agama, komunitas, dunia usaha, dan pihak lainnya.
- Dokumentasikan dan publikasikan praktik-praktik baik yang pernah dilakukan tersebut.

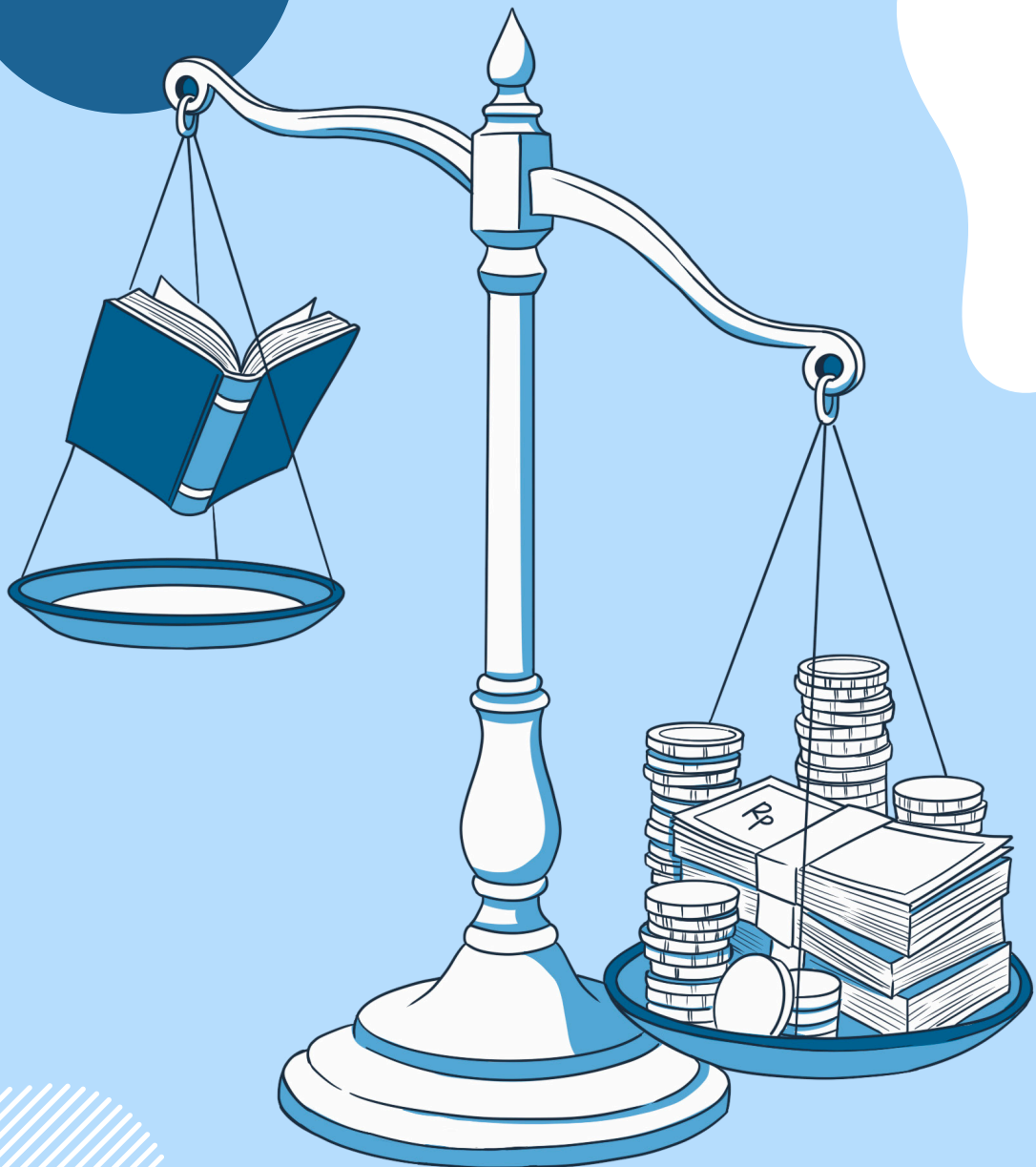
5 Pendalaman Wawasan Pendidikan Antikorupsi

- Guru sangat disarankan mendalami wawasan PAK. Pada setiap bab sudah disediakan daftar rujukan atau tautan (link) isinya berupa: penjelasan ringkas, referensi, artikel, contoh-contoh implementasi, dan kasus implementasi PAK; baik dalam bentuk teks, audio, dan video.
- Jika internet terbatas, gunakan bahan referensi cetak (buku, bahan cetakan lainnya) atau bahan-bahan digital yang telah diunduh terlebih dahulu (berupa file teks, video, audio, dan sejenisnya).
- Guru juga disarankan dapat bergabung dengan komunitas praktik PAK (antar guru atau komunitas lainnya) untuk berbagi praktik baik dan sumber belajar.



1

Kondisi Korupsi di Indonesia



Kondisi Korupsi di Indonesia

1.1 Kondisi korupsi: Seperti apa di Indonesia?



Pernahkah Anda mendengar berita tentang korupsi di Indonesia? Atau bahkan melihat sendiri praktik korupsi di lingkungan sekitar? Korupsi adalah persoalan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan kita, dari skala nasional hingga skala mikro atau personal. Di tingkat tertinggi, korupsi melibatkan penggelapan dana proyek besar yang merugikan triliunan rupiah uang negara. Namun, di tingkat terendah, ia mewujud dalam bentuk pungutan liar (pungli) kecil saat mengurus dokumen, atau menerima hadiah (gratifikasi) karena jabatan. Persoalan ini tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Apa itu Korupsi?

Menurut asal kata, istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Kata *corruptio* memiliki berbagai makna, antara lain tindakan merusak atau menghancurkan. Selain itu, istilah ini juga mengandung arti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran,


sifat yang dapat disuap, perilaku tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian serta ucapan atau pernyataan yang bersifat menghina atau memfitnah. Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* dan dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “korupsi”.


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, Bank Dunia (1997) mengadopsi definisi bahwa korupsi adalah “penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi.” Definisi ini dipilih karena dinilai ringkas namun cukup luas untuk mencakup berbagai bentuk korupsi, dan kemudian menjadi acuan standar internasional dalam merumuskan pengertian korupsi.




Menurut perspektif hukum di Indonesia, definisi korupsi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU Tipikor”) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”). Pasal-pasal tersebut menerangkan mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana karena korupsi. Tindak pidana korupsi (Tipikor) pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi 7 jenis sebagai berikut.

Tabel 1.1. Jenis-Jenis Korupsi

	Jenis Korupsi	Penjelasan
<p>1.</p> 	<p>Kerugian Keuangan Negara</p>	<p>Setiap perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lebih lengkap jenis ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor serta Pasal 603 dan 604 KUHP.</p>
<p>2.</p> 	<p>Suap-Menyuap</p>	<p>Meliputi perbuatan memberi, menjanjikan, atau menerima sesuatu (uang, barang, atau fasilitas) kepada atau dari pegawai negeri/ penyelenggara negara, hakim, atau advokat, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Lebih lengkap jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, 6 ayat (1) huruf a, 6 ayat (1) huruf b, 6 ayat (2), 12 huruf c, dan 12 huruf d UU Tipikor serta Pasal 605 dan 606 KUHP.</p>

Jenis Korupsi	Penjelasan
<p>3.</p>  <p>Penggelapan dalam Jabatan</p>	<p>Pegawai negeri atau orang yang menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain. Lebih lengkap jenis ini diatur dalam Pasal 8, 9, 10 huruf a, 10 huruf b, dan 10 huruf c UU Tipikor.</p>
<p>4.</p>  <p>Pemerasan</p>	<p>Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Lebih lengkap jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UU Tipikor.</p>
<p>5.</p>  <p>Perbuatan Curang</p>	<p>Melakukan kecurangan yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang, serta membiarkan atau membantu perbuatan curang tersebut. Lebih lengkap jenis ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, 7 ayat (1) huruf b, 7 ayat (1) huruf c, 7 ayat (1) huruf d, 7 ayat (2), 12 huruf h UU Tipikor.</p>
<p>6.</p>  <p>Benturan Kepentingan dalam Pengadaan</p>	<p>Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Lebih lengkap jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU Tipikor.</p>

Jenis Korupsi	Penjelasan
<p>7. </p> <p>Gratifikasi</p>	<p>Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, kecuali jika dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak diterima. Lebih lengkap jenis ini diatur dalam Pasal 12B jo. 12C UU Tipikor.</p>

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada UU Tipikor, yaitu:

1. merintangikan proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21);
2. tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo. Pasal 28);
3. bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo. Pasal 29);
4. saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 35);
5. orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 36); dan
6. saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo. Pasal 31).

Pencucian Uang sebagai Kelanjutan Tindak Pidana Korupsi

Pencucian uang (*money laundering*) adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil tindak pidana melalui transaksi keuangan yang kompleks agar tampak berasal dari kegiatan yang sah. Di Indonesia, praktik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan bahwa tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menyembunyikan, atau menerima aset hasil kejahatan adalah tindak pidana. Dalam praktiknya, pencucian uang kerap menjadi langkah lanjutan yang digunakan pelaku tindak kejahatan termasuk para koruptor untuk menutupi aliran dana, memecah transaksi, atau memindahkan aset ke berbagai instrumen keuangan

sehingga sulit dilacak. Hubungan erat antara korupsi dan pencucian uang menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum, tetapi juga mengaburkan jejaknya sehingga menghambat proses penegakan hukum dan memperbesar dampak kerugian bagi negara.

Apa itu Perilaku Koruptif?



Setelah kita memahami apa itu korupsi dan tindak pidana korupsi, mungkin muncul pertanyaan: apakah korupsi hanya terjadi pada kasus-kasus besar yang melibatkan uang miliaran rupiah atau pejabat tinggi? Ternyata, korupsi bisa berawal dari perilaku-perilaku sehari-hari kita yang tidak menaati aturan dan merugikan orang lain. Misalnya, pernahkah Anda melihat teman menyontek di kelas, pengendara motor bonceng tiga dan tidak menggunakan helm, menyerobot antrian, dan membuang sampah tidak pada tempatnya? Semua itu merupakan bagian dari perilaku koruptif.

Dalam sosiologi, perilaku manusia bisa dipahami dari tiga hal, yaitu: sikap, tindakan, dan pengetahuan. Jika ketiganya digunakan untuk berbuat curang, mengambil yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan demi keuntungan diri sendiri, maka itulah perilaku koruptif. Sayangnya, banyak orang tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya sehari-hari sesungguhnya adalah bentuk kecil dari korupsi.

Mari kita lihat contoh sederhana lainnya di sekolah, tempat tinggal, dan di sekitar lingkungan masyarakat kita. Apa saja bentuk perilaku koruptif yang bisa muncul?

- Menyontek saat ujian;
- Plagiarisme dalam tugas;
- Membolos atau datang terlambat;
- *Mark up* uang buku atau dana kegiatan;
- Orang tua memberi hadiah kepada guru saat kenaikan kelas;
- Penyalahgunaan dana beasiswa, misalnya KIP (Kartu Indonesia Pintar);
- Membuang sampah sembarangan di sungai;
- Mencoret-coret Pos Kamling RT/RW;
- Menyerobot antrian saat naik transportasi umum; atau
- Menginjak dan mencabut rumput di taman kota.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun karakter dan budaya integritas sejak dini. Penting bagi kita untuk menyoroti perilaku koruptif di sektor pendidikan secara khusus. Praktik menyontek, gratifikasi, nepotisme, dan penyalahgunaan dana masih terjadi di banyak satuan pendidikan. Hal ini menjadi tantangan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat budaya integritas di satuan pendidikan.

Mungkin terlihat sepele, tapi jika dibiarkan, perilaku ini akan terbawa hingga dewasa dan merusak sistem sosial. Mari kita memulai untuk membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kalimat tersebut merupakan bagian dari lirik lagu "Biasakan yang Benar" yang ada pada kanal Youtube KPK.



Scan Me!



https://www.youtube.com/watch?v=x6aY9OJGWS4&list=RDx6aY9OJGWS4&start_radio=1

Tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi baik, semuanya perlu dibiasakan sejak dini, termasuk menghindari perilaku-perilaku koruptif, baik di lingkungan sekolah, tempat tinggal, maupun masyarakat.

Bagaimana Kondisi Korupsi di Indonesia Saat Ini?

Setelah memahami apa itu korupsi dan berbagai bentuk perilaku koruptif, penting bagi kita untuk melihat bagaimana kondisi nyata korupsi di Indonesia saat ini. Untuk memahami seberapa serius masalah ini, mari kita lihat data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) oleh Transparency International.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2025

Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2025 yang dirilis oleh Transparency International, skor Indonesia adalah 34 dari skala 0-100, yang menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 182 negara. Semakin tinggi skor IPK menunjukkan semakin rendah persepsi korupsi di suatu negara. Skor 34 ini menandakan Indonesia masih berada di kategori negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dan masih jauh dari kategori "bersih". Skor Indonesia juga masih di bawah rata-rata global, yang pada tahun 2025 berada di angka 42. IPK sendiri merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi di sektor publik dengan menggunakan berbagai sumber data, di antaranya mencakup aspek penyusunan, penyalahgunaan sumber daya publik, nepotisme, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Meskipun IPK tidak secara langsung mengukur perilaku masyarakat sehari-hari, tata kelola yang baik biasanya berjalan seiring dengan nilai-nilai integritas yang tumbuh di lingkungan masyarakat. Salah satu tempat utama untuk menanamkan nilai-nilai tersebut adalah melalui dunia pendidikan. Ketika lingkungan pendidikan membiasakan kejujuran dan menolak segala bentuk kecurangan, murid akan tumbuh dengan karakter yang kuat dan kesadaran untuk berbuat benar. Dengan demikian, perubahan positif di masyarakat dapat dimulai dari lingkungan pendidikan, dan nilai-nilai integritas pun dapat semakin mengakar dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 1.2. Skor IPK Indonesia Tahun 2015-2025

Sumber: Transparency International (TI)

Tahun	Skor IPK	Peringkat Global
2015	36	88 / 168
2016	37	90 / 176
2017	37	96 / 180
2018	38	89 / 180
2019	40	85 / 180
2020	37	102 / 180
2021	38	96 / 180
2022	34	110 / 180
2023	34	115 / 180
2024	37	99 / 180
2025	34	109/182



Tabel 1.3. Skor IPK Negara ASEAN

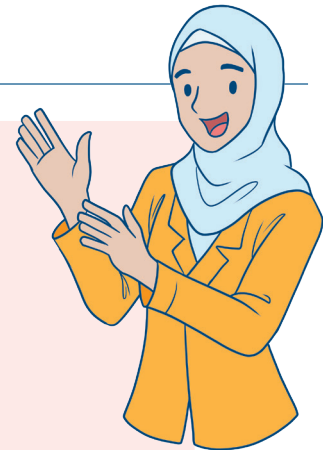
Sumber: *Transparency International (TI). 2026*

No.	Negara	Skor IPK 2025	Peringkat Global
1.	Singapura	84	3/182
2.	Malaysia	52	54/182
3.	Timor Leste	44	73/182
4.	Vietnam	41	81/182
5.	Indonesia	34	109/182
6.	Laos	34	109/182
7.	Thailand	33	116/182
8.	Filipina	32	120/182
9.	Kamboja	20	163/182
10.	Myanmar	16	169/182

1.2 Penyebab

Mengapa Orang Korupsi?

Korupsi tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Secara internal, sifat tamak, rakus, dan gaya hidup konsumtif dapat mendorong seseorang untuk melakukan korupsi, bahkan ketika sudah hidup berkecukupan. Lingkungan yang permisif, kurangnya keteladanan serta budaya masyarakat yang membiarkan gaya hidup mewah juga memperkuat perilaku koruptif.



Selain itu, faktor eksternal seperti aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, dan organisasi juga berperan besar. Pengaruh keluarga, budaya masyarakat yang mengagungkan kekayaan secara berlebihan, praktik politik uang, lemahnya penegakan hukum serta sistem organisasi yang tidak transparan dan akuntabel, semuanya membuka peluang terjadinya korupsi. Menariknya, pelaku korupsi tidak selalu berasal dari kalangan yang berpenghasilan rendah; banyak kasus justru melibatkan orang-orang yang sudah berkecukupan, tetapi tetap tergoda karena lemahnya integritas dan kontrol sosial.

Salah satu teori yang menjelaskan penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi disampaikan oleh peneliti Donald R. Cressey (1953) melalui Teori Segitiga Fraud (*Fraud Triangle Theory*).



Gambar 1. Segitiga Fraud (*Fraud Triangle Theory*)

Dalam teori tersebut, terdapat tiga tahapan penting yang dapat mendorong seseorang melakukan korupsi, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Tahapan pertama adalah tekanan

Tekanan ini dapat berupa dorongan ekonomi atau kebutuhan mendesak lainnya. Namun, menurut Cressey, tekanan tersebut tidak selalu bersifat nyata; cukup dengan merasa tertekan atau tergoda oleh bayangan keuntungan, maka tahapan ini sudah dianggap terpenuhi. Namun, tekanan saja belum cukup jika tidak disertai kesempatan untuk bertindak. Contoh tekanan dari kondisi keuangan pribadi, seperti memiliki hutang yang menumpuk atau cicilan besar, biaya hidup yang semakin meningkat sementara penghasilan tetap sehingga mendorong orang melakukan korupsi. Ada juga tekanan keluarga maupun sosial, seperti dorongan dari pasangan, keluarga, atau lingkungan untuk memiliki standar hidup tertentu. Sehingga timbul dorongan untuk tampil mewah, seperti membeli mobil, gadget, atau rumah di luar kemampuan.

Tahapan kedua adalah kesempatan

Contoh yang paling mudah ditemukan adalah lemahnya sistem pengawasan, yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Namun, meski ada tekanan dan kesempatan, seseorang tetap mungkin tidak berbuat curang tanpa adanya rasionalisasi atau pembenaran diri.

Tahapan ketiga adalah rasionalisasi

Cressey menemukan bahwa para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan kecurangan agar tidak merasa bersalah. Contohnya dalam dunia pendidikan adalah ketika dana operasional sekolah digunakan untuk kepentingan pribadi dengan alasan bahwa dana tersebut belum digunakan atau akan diganti nanti. Hal tersebut termasuk merasionalisasikan tindakannya bukanlah hal yang salah karena hanya bersifat meminjam, bukan mengambil. Padahal, tindakan tersebut tetap merupakan pelanggaran hukum dan etika, tanpa ruang pembenaran. Rasionalisasi seperti ini menunjukkan bagaimana pelaku berusaha menutupi kesalahan dengan alasan yang tampak masuk akal, meskipun sebenarnya tidak dapat dibenarkan.

Selengkapnya mengenai mengapa individu melakukan tindak pidana korupsi dapat dibaca pada tautan berikut.



Scan Me!



<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>

1.3 Dampak

Bagaimana Dampak Korupsi dalam Kehidupan Masyarakat?

Korupsi bukan sekadar istilah hukum atau ekonomi. Ia adalah masalah nyata yang memengaruhi kehidupan kita semua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi ibarat penyakit yang menyebar ke berbagai aspek kehidupan. Secara internasional, menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) korupsi dapat melemahkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan, menghambat pembangunan berkelanjutan, merusak pasar dan persaingan usaha, menurunkan kualitas hidup masyarakat, memfasilitasi kejahatan terorganisir dan pencucian uang, serta melanggar hak asasi manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan dampak nyata dari korupsi di sekitar kita. Misalnya, proyek pembangunan di sekitar kita, seperti jalan dan jembatan yang baru dibangun, tetapi cepat rusak. Pembangunan yang seharusnya membawa manfaat justru menjadi beban karena kualitasnya dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak.



Korupsi juga membuat hukum kehilangan wibawa. Ketika pelanggaran bisa “diselesaikan” dengan cara-cara curang, maka keadilan tidak lagi berdiri tegak. Ini membuka peluang bagi pelanggaran lain untuk terus terjadi. Dalam situasi seperti ini, kejahatan seperti penyelundupan, perdagangan barang ilegal, atau praktik curang bisa tumbuh karena tidak tersentuh hukum.

Dari segi lingkungan, korupsi juga dapat memberikan dampak negatif yang besar. Misalnya, korupsi terkait pemberian izin alih fungsi hutan yang tidak semestinya dapat menyebabkan rusaknya ekosistem, banjir, tanah longsor, dan masih banyak lagi. Dampak ini nyata dirasakan masyarakat, dan pemulihannya membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit.

Kemudian yang paling menyedihkan, korupsi membuat hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi tidak merata. Ketika dana publik diselewengkan, maka masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru menjadi korban, terutama bagi kelompok rentan. Kondisi ini juga dapat memperburuk kemiskinan, karena hilangnya akses terhadap layanan yang seharusnya bisa membantu memperbaiki keadaan.

Dampak lain yang tak kalah serius adalah ketika korupsi mulai memengaruhi cara berpikir dan kebiasaan masyarakat. Tidak hanya korupsi, perilaku koruptif pun jika terus terjadi dan dibiarkan, maka lama-lama akan dianggap hal biasa. Padahal perilaku koruptif itu adalah bibit dari korupsi. Jika sudah terbiasa, maka akan terbentuk sikap permisif yang sulit diubah, karena orang mulai berpikir bahwa perilaku koruptif yang dilakukan banyak orang adalah sesuatu yang benar.

Tahukah Anda?

Sektor pembangunan dan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi. Salah satu modusnya adalah mark up yang sangat tinggi. KPK mencatat dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur, nilai riil proyek ternyata hanya tersisa sekitar 50 persen dari total nilai kontrak, sementara sisanya menjadi objek ‘bancakan’ para koruptor.

Dampak korupsi di sektor ini adalah kualitas bangunan yang menjadi buruk dan dapat membahayakan keselamatan publik. Ironisnya, proyek infrastruktur yang sarat korupsi cenderung cepat rusak, sehingga dapat menjadi alasan untuk kembali membuka proyek yang dapat berpotensi menjadi ladang korupsi berikutnya.

KPK juga mencatat bahwa praktik korupsi di sektor ini berlangsung sejak tahap perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan. Pada fase perencanaan dan pengadaan, koruptor mencari celah terkait kepastian anggaran, pembagian fee proyek, maupun pengondisian pemenang tender. Adapun pada tahap pelaksanaan, modus yang kerap digunakan meliputi rekayasa laporan pekerjaan atau proyek fiktif yang menguras keuangan negara.



Scan Me!



Selengkapnya mengenai Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang dapat dibaca pada tautan berikut: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>

Yuk, Cek Fakta!

Modus korupsi terkait sumber daya alam yang sering terjadi, antara lain penyuapan dan gratifikasi dalam penerbitan izin lingkungan, manipulasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta pemberian izin tambang tanpa prosedur yang benar. Dalam berbagai kasus, izin-izin tersebut diterbitkan bukan berdasarkan kajian lingkungan dan ketentuan peraturan yang berlaku, melainkan demi keuntungan pribadi atau kelompok yang terlibat.

Salah satu contoh nyata adalah kasus mantan Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008-2013 terkait penyalahgunaan izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Sulawesi Tenggara, dengan penerbitan izin tanpa prosedur yang benar, dan adanya gratifikasi dari perusahaan tambang. *Dalam kasus ini, jaksa mendakwa total kerugian negara sebesar Rp4,3 triliun, yang mencakup kerugian keuangan negara sebesar Rp1,59 triliun dan estimasi kerugian kerusakan lingkungan senilai Rp2,7 triliun berdasarkan perhitungan ahli. Pengadilan menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,59 triliun dalam vonisnya.* Dampak nyatanya tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berupa kerusakan kawasan hutan, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya tutupan hutan yang berujung pada menurunnya kualitas hidup masyarakat setempat.



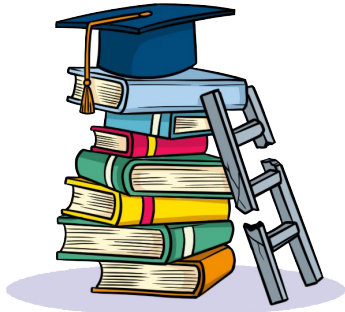
Scan Me!



Selengkapnya mengenai Korupsi Sumber Daya Alam dapat dibaca pada tautan berikut: Buku Jejak Korupsi Sumber Daya Alam KPK. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/jejak-korupsi-sumber-daya-alam>

Bagaimana dengan Dampak Korupsi dan Perilaku Koruptif di Dunia Pendidikan?

a. Menurunnya Kualitas Layanan Pendidikan



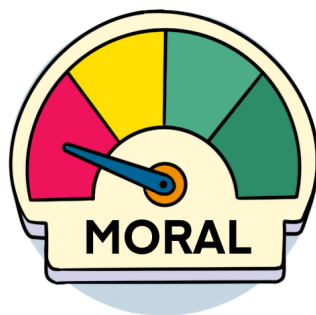
Korupsi menyebabkan dana pendidikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya, dana operasional sekolah yang seharusnya untuk kebutuhan murid justru dipotong, disalahgunakan, atau digunakan tidak sesuai peruntukan. Akibatnya, fasilitas belajar menjadi kurang memadai, buku pelajaran tidak lengkap, atau sarana prasarana sekolah rusak dan tidak segera diperbaiki. Kondisi ini akan membuat murid belajar dalam lingkungan yang tidak mendukung sehingga dapat menghambat pencapaian hasil belajar secara optimal.

b. Ketidakadilan dan Diskriminasi



Praktik nepotisme dan perlakuan khusus, seperti penerimaan murid baru karena kedekatan dengan pihak tertentu atau pemberian nilai karena imbalan tertentu, menciptakan ketidakadilan. Murid yang seharusnya berhak justru tersingkir, sementara yang memiliki "akses" atau "uang" mendapat perlakuan istimewa.

c. Merosotnya Moral dan Keteladanan



Jika guru atau tenaga pendidik melakukan kecurangan, seperti datang terlambat, menerima gratifikasi, atau meninggalkan kelas tanpa alasan, maka murid akan meniru perilaku tersebut. Keteladanan yang buruk dari guru akan membentuk budaya permisif terhadap perilaku tidak jujur di kalangan murid. Murid kadang tidak selalu mendengarkan apa yang diajarkan para guru mereka, tetapi mereka sangat ahli mengimitasi perilaku orang dewasa di sekitar mereka.



d. Meningkatnya Praktik Pungutan Liar



Praktek pungutan liar di luar biaya resmi sekolah, misalnya dalam proses penerimaan murid baru dapat membebani orang tua dan menambah biaya pendidikan yang seharusnya bisa ditekan

e. Menurunnya Kepercayaan Publik

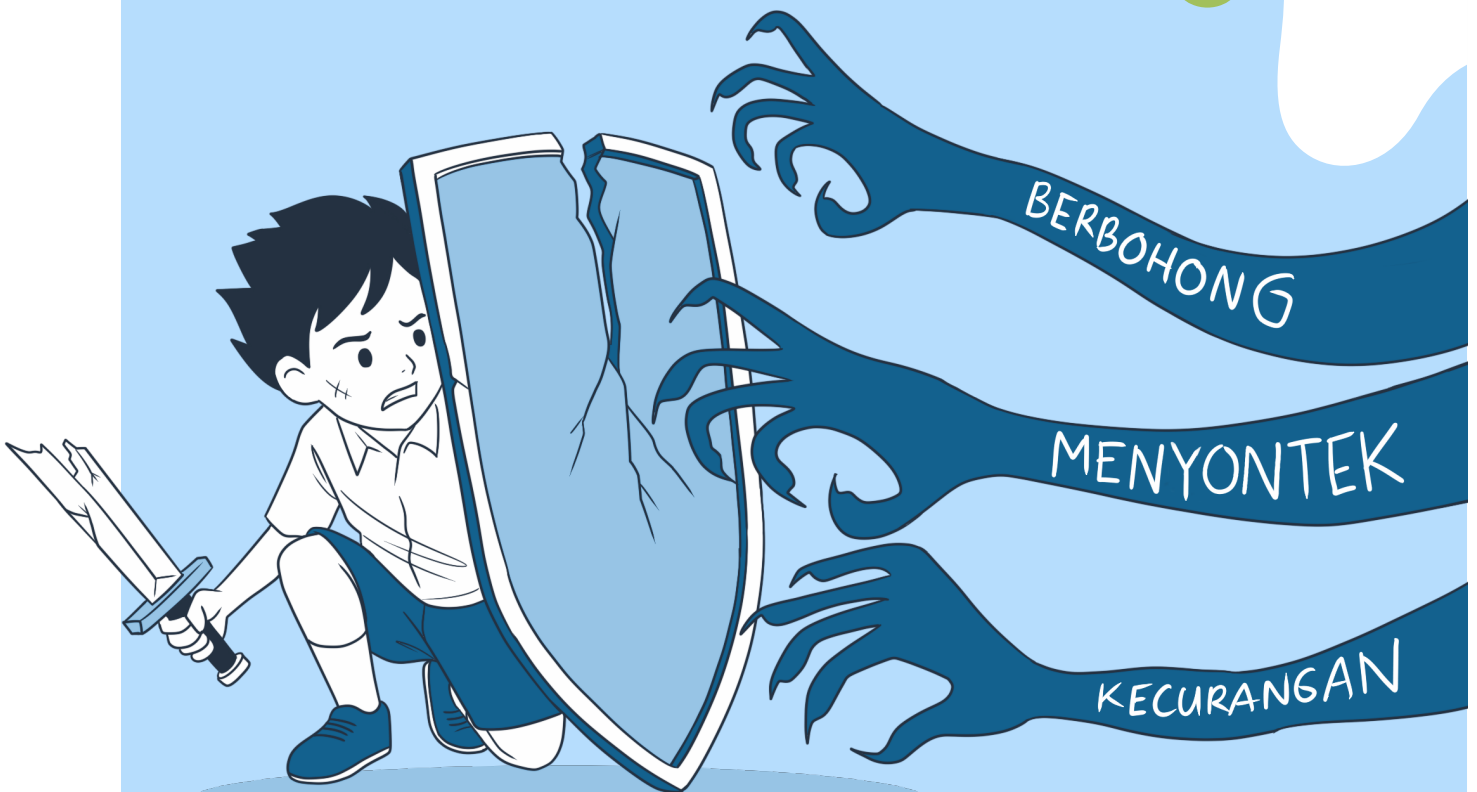


Ketika kasus korupsi di satuan pendidikan terungkap, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan dunia pendidikan menurun. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program sekolah.

Dari dampak-dampak di atas dapat kita lihat bahwa korupsi adalah pengkhianatan terhadap harapan, kepercayaan, dan masa depan kita bersama. Karena dampaknya begitu nyata dan dekat sehingga melawannya pun harus dimulai dari kesadaran yang paling sederhana, yaitu bahwa kita semua terdampak dan kita semua punya peran untuk menghentikannya.

2

Urgensi Pendidikan Antikorupsi



Urgensi Pendidikan Antikorupsi

2.1 Apa itu Pendidikan Antikorupsi (PAK)?



Pendidikan Antikorupsi (PAK) adalah proses pembentukan karakter dan internalisasi nilai antikorupsi melalui kurikulum dengan didukung penguatan integritas ekosistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter dan budaya antikorupsi pada murid. PAK dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari penanaman nilai-nilai integritas pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.

Prinsip-Prinsip Implementasi PAK

Seperti mendirikan sebuah bangunan, penyusunan strategi PAK membutuhkan dasar yang kuat untuk menopang implementasi di atasnya. Dalam konteks ini, perwujudan fondasi tersebut dituangkan dalam 5 (lima) prinsip PAK, yaitu sebagai berikut.

a. Substantif

Penyusunan kurikulum, konten, dan strategi penyampaian harus mengutamakan kualitas substansi. Dengan kata lain, nilai integritas harus menjwai aspek-aspek pembelajaran yang dituangkan dalam setiap materi, baik yang merupakan materi formal atau terstruktur (integrasi kurikulum dan pelatihan guru) maupun materi yang informal (konten publikasi umum dan buku cerita anak).

b. Berjenjang dan Berkelanjutan

Materi-materi yang disusun, khususnya materi formal, disesuaikan dengan kemampuan murid. Misalnya, materi-materi untuk jenjang PAUD disesuaikan dengan konten-konten yang sesuai dengan kemampuan yang selayaknya dimiliki oleh murid jenjang PAUD. Begitu pula materi-materi yang disusun untuk jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, di mana penyesuaian juga dilakukan untuk memastikan substansi dan teknik penyampaian sesuai dengan kemampuan murid.

Konten yang disusun berjenjang akan diserap sesuai dengan karakter dan kemampuan setiap jenjang sehingga proses belajar akan terinternalisasi dengan baik hingga dapat menumbuhkan kebiasaan. proses belajar berjalan optimal dan siap untuk berlanjut ke jenjang berikutnya seiring tantangan dan kompleksitas yang meningkat. Kesiapan diri yang terus berkesinambungan dan membentuk harmoni antarjenjang inilah yang menandakan bahwa pendidikan antikorupsi berhasil dilaksanakan dengan berkelanjutan.

c. Komprehensif

PAK disajikan dalam bermacam-macam bentuk, antara lain intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler dan pembiasaan yang merupakan bagian dari pendidikan karakter. Prinsip ini dituangkan dengan argumentasi karakteristik materi yang berbeda-beda. Misalnya, materi yang bersifat teoritis

cenderung lebih mudah diajarkan dalam bentuk intrakurikuler yang dilengkapi fasilitator. Sementara itu, aplikasi dan pembiasaan cenderung lebih efektif untuk diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Implementasi yang terkait adalah proses pemantauan dan pembinaan yang dilakukan oleh guru di sekolah terhadap murid. Ketika murid melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai integritas, guru dapat mengarahkan dengan teknik dan substansi yang sesuai.

d. Kreatif dan Relevan

Penyusunan materi dan strategi penyampaian dilakukan secara kreatif agar menggugah dan mendorong atau menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan kebiasaan baru yang baik. Selain itu, proses penyusunan juga harus relevan dari segi materi dan penyampaian. Misalnya, ketika guru menyusun teknik-teknik pengajaran materi antikorupsi, mereka perlu mengutamakan efektivitas pembelajaran alih-alih kecanggihan atau keunikan tekniknya. Hal ini perlu dipahami oleh pengembang metode pembelajaran, baik guru maupun pihak lain yang mengembangkan metode secara profesional agar mengutamakan kualitas pembelajaran di atas sekadar menciptakan keunikan atau kebaruan metode.

e. Kolaboratif

Dalam membangun ekosistem pembelajaran, pemangku kepentingan perlu menyadari bahwa kita harus bergerak bersama. Misalnya, satuan pendidikan perlu dukungan orang tua murid dan masyarakat dalam mendidik anak terkait nilai integritas. Kolaborasi ini penting, khususnya untuk memberikan contoh yang baik bagi murid-murid/anak-anak dan mendukung pembiasaan pengamalan nilai integritas. Prinsip kolaborasi ini juga berlaku pada pemanfaatan materi-materi antikorupsi yang tersedia.

Lima Prinsip PAK tersebut harus menjiwai elemen-elemen dari PAK dengan kesadaran penuh. Misalnya, ketika menyusun sebuah materi pembelajaran, penyusun diharapkan memastikan bahwa Lima Prinsip PAK tersebut terpenuhi.

2.2 Strategi Pendidikan Antikorupsi (PAK)

Korupsi di Indonesia tidak akan pernah benar-benar tuntas jika penanganannya hanya berfokus pada aspek penindakan hukum semata. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi penting untuk memberikan efek jera sekaligus pengembalian keuangan negara. Kendati demikian, seberapa pun koruptor ditindak dan serapat apapun celah-celahnya ditutup, dorongan untuk melakukan tindakan korupsi akan tetap ada selama individu tidak memiliki nilai integritas di dalam dirinya. Itulah mengapa PAK menempati posisi strategis di area hulu dalam upaya pencegahan korupsi, karena pada area inilah karakter generasi muda sebagai calon pemimpin dan penyelenggara negara di masa depan mulai dibentuk.

Jika nilai-nilai integritas ditanamkan secara efektif sejak usia dini, maka kecenderungan individu untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan antikorupsi akan tumbuh secara alami. Ini memperkuat pemahaman bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga mencerminkan krisis nilai di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus dilihat sebagai strategi nasional yang bersifat jangka panjang, tidak hanya mencegah pelanggaran hukum di masa depan, tetapi juga membentuk fondasi masyarakat yang menjunjung tinggi integritas.

Mendidik generasi muda agar mengenali, menghindari, dan melawan praktik korupsi harus dilakukan secara sistematis dan bertahap, sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis dan usia murid. Upaya ini tidak cukup hanya melalui ceramah atau sosialisasi sesaat, melainkan perlu diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan secara menyeluruh.

Dalam mengimplementasikan PAK, diperlukan strategi internalisasi nilai integritas secara berjenjang di setiap level pendidikan. Strategi ini mencakup integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran (sisipan) melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Namun, internalisasi ini juga harus didukung oleh ekosistem pendidikan yang berintegritas, di mana semua pihak mulai dari pemangku kebijakan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan hingga lingkungan sekolah termasuk dukungan orang tua untuk bersama-sama menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai antikorupsi.

Dengan strategi yang terstruktur dan komitmen bersama, pendidikan antikorupsi tidak hanya akan menjadi materi pelajaran, tetapi juga menjadi bagian dari budaya bangsa yang melekat dalam setiap tindakan sehingga tujuan pembentukan generasi yang berkarakter antikorupsi bisa terwujud.

2.3 Nilai-nilai Integritas

Dalam melakukan diseminasi PAK, KPK mengenalkan sembilan nilai integritas atau nilai antikorupsi, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Untuk memudahkan orang dalam mengingatnya, sembilan nilai tersebut diberi singkatan "Jumat Bersepeda KK". Penanaman nilai integritas tersebut perlu dilakukan sejak usia dini untuk memperkuat karakter dan membentuk budaya antikorupsi.



Pada tahun 2024, KPK melakukan kajian terhadap nilai-nilai integritas secara empiris dan ilmiah. Kajian ini menjadi acuan dan pegangan bagi KPK atau pemangku kepentingan yang terkait dalam upaya pembentukan integritas.



Berikut merupakan definisi dari sembilan nilai integritas atau antikorupsi tersebut.

a. Jujur:

Kesesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, tanpa manipulasi dan menyembunyikan kebenaran.

Contoh:

- Tidak menyontek saat ulangan atau ujian meskipun tidak ada guru yang mengawasi.
- Jika menemukan barang atau uang milik orang tua atau saudara langsung dikembalikan atau diberitahukan pemiliknya.

b. Mandiri:

Kemampuan individu untuk bersikap, berpendapat, dan bertindak atas kehendak sendiri berdasarkan norma dan etika tanpa dipengaruhi oleh orang lain.

Contoh:

- Mengerjakan tugas dan PR sendiri tanpa selalu bergantung pada teman.
- Merapikan tempat tidur setelah bangun tidur tanpa disuruh.

c. Tanggung Jawab:

Melaksanakan kewajiban dan tugas terpuji atau patut yang diamanahkan secara baik dan tuntas, serta siap menerima segala konsekuensi.

Contoh:

- Menggunakan fasilitas sekolah dengan baik dan mengembalikannya setelah dipakai (seperti buku perpustakaan atau alat olahraga).
- Tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan.

d. Berani:

Keteguhan hati untuk bersikap dan bertindak menegakkan kebenaran sekalipun dalam situasi yang dilematik.

Contoh:

- Berani menegur teman yang berbuat salah, misalnya membuang sampah sembarangan atau menyontek.
- Menolak ajakan teman atau saudara untuk melakukan hal buruk seperti berbohong atau mencuri.

e. Sederhana:

Kemampuan menahan diri dari dorongan untuk berperilaku dan bertindak secara berlebihan.

Contoh:

- Berpakaian rapi dan tidak berlebihan, sesuai aturan sekolah.
- Membeli barang sesuai dengan kebutuhan bukan karena ikut-ikutan.

f. Peduli:

Sikap keberpihakan dengan melibatkan diri secara proaktif dalam persoalan dan kondisi yang berkaitan dengan kepentingan sosial.

Contoh:

- Ikut serta dalam kegiatan sosial sekolah, seperti bakti sosial atau penggalangan dana.
- Berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, atau membantu korban bencana.

g. Disiplin:

Kemampuan mengelola diri untuk patuh dan konsisten bertindak sesuai komitmen diri serta peraturan dan ketentuan yang ada.

Contoh:

- Datang ke sekolah tepat waktu setiap hari, masuk kelas sesuai jadwal dan tidak terlambat ke kelas setelah istirahat.
- Menaati aturan lalu lintas seperti tidak menerobos lampu merah dan memakai helm.

h. Adil:

Berpegang pada kebenaran, objektivitas, dan proporsionalitas dalam menilai dan memperlakukan individu atau kelompok tanpa diskriminatif.

Contoh:

- Membagi tugas kelompok secara objektif dan merata, sehingga semua anggota ikut berperan.
- Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang mereka.

i. Kerja Keras:

Sebuah sikap dalam diri seseorang yang menunjukkan ketekunan dalam upaya menyelesaikan pekerjaan.

Contoh:

- Belajar dengan sungguh-sungguh untuk memahami pelajaran, bukan hanya saat menjelang ujian.
- Ikut membantu membersihkan rumah atau mencuci piring saat di rumah.

2.4 Urgensi Integrasi PAK dalam Kurikulum dan Pembelajaran

Sejak pemerintah Indonesia mengesahkan dan meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antikorupsi melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006, Indonesia secara resmi telah memiliki landasan hukum dan berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Dalam upaya pencegahan, Pasal 13 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002 juncto UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada KPK untuk menyelenggarakan program Pendidikan Antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Program PAK dilaksanakan.

Monitoring dan evaluasi implementasi PAK menunjukkan beberapa kendala, di antaranya belum tersedianya standar implementasi PAK berupa panduan/acuan sesuai dengan jenjang pendidikan, termasuk profil lulusan, peta kompetensi, capaian pembelajaran, hingga asesmen/penilaian dan evaluasinya. Sementara hal itu diperlukan oleh satuan pendidikan dalam mengimplementasikan PAK, termasuk untuk mengukur dampaknya.

Berikut beberapa alasan lain pentingnya integrasi PAK ke dalam kurikulum dan pembelajaran.

a. Pencegahan Korupsi Sejak Dini

Korupsi telah terjadi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, mulai dari proses pengadaan publik, hingga bantuan sosial. Hubungan antara korupsi dan kejahatan terorganisir telah terbukti secara operasional dan empiris, dengan demikian, pencegahan korupsi sangat penting untuk memastikan integritas di berbagai sektor berjalan. Penelitian terbaru telah menemukan sejumlah metode yang bertujuan untuk mencegah korupsi di sektor publik dan swasta salah satunya dengan pendekatan berbasis nilai (Sauve, 2023). Menurut Sauve, pendekatan berbasis nilai untuk mencegah korupsi relatif baru diimplementasikan dan memiliki argumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku etis, akuntabel, dan berintegritas di antara karyawan lebih efektif daripada menerapkan aturan yang ketat dan pedoman yang memaksa karyawan berperilaku etis melalui ancaman hukuman atau sanksi.



Sejalan dengan hal tersebut, penanaman nilai integritas melalui pendidikan antikorupsi sejak dini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya dan dampak negatif perilaku koruptif serta mampu menumbuhkan serta memperkuat karakter pribadi serta membentuk kebiasaan baik sebagai bekal pada tahapan perkembangan anak berikutnya.

b. Membangun Sikap Kritis terhadap Praktik Korupsi

Pendidikan antikorupsi tidak hanya berfokus pada memberikan informasi tentang tindakan-tindakan korupsi, tetapi juga membangun kemampuan murid untuk berpikir kritis dan analitis mengenai kondisi sosial dan politik di sekitar mereka. Contoh: murid SMA/MA/SMK/MAK bisa berdiskusi dan menganalisis laporan penggunaan dana operasional sekolah atau melakukan usulan perbaikan proses pemilihan pengurus OSIS. Dengan pendekatan ini, murid tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat mengidentifikasi dan menilai potensi risiko korupsi dalam berbagai aspek kehidupan.

Meskipun sanksi hukum tetap diperlukan, sanksi tersebut seringkali gagal mencegah korupsi untuk terus terjadi dan meluas. Sebaliknya, pendidikan bekerja lebih lambat, tetapi mendalam membentuk pola pikir, menetapkan norma sosial baru, dan menumbuhkan pemikiran kritis.

Dalam policy brief Transparency International (2013) disampaikan bahwa sekolah dan pengajaran adalah alat penting dalam memerangi korupsi. Pendidikan yang berkualitas memiliki pengaruh untuk memperkuat integritas pribadi, meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab, mengurangi kesenjangan sosial dan memutus rantai korupsi.



c. Membentuk Kebiasaan Positif dalam Kehidupan Sehari-hari

Pembentukan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses pembelajaran dan pembiasaan yang berlangsung secara terus-menerus. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai dan karakter yang baik kepada peserta didik. Melalui proses pendidikan yang terstruktur, murid tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga diarahkan untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap orang lain.

Selain melalui pembelajaran di kelas, pembentukan kebiasaan positif juga dapat dilakukan dan diperkuat melalui pembiasaan karakter dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Misalnya dengan membiasakan datang tepat waktu, menaati aturan sekolah, bersikap jujur dalam mengerjakan tugas, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghormati guru dan teman. Ketika nilai-nilai tersebut dipraktikkan secara konsisten dalam berbagai kegiatan sekolah, peserta didik akan terbiasa menjadikannya sebagai bagian dari perilaku sehari-hari.



Dengan demikian, pendidikan dan pembiasaan karakter yang dilakukan secara sistematis di sekolah dapat menjadi sarana efektif untuk membentuk kebiasaan positif pada diri siswa. Kebiasaan tersebut diharapkan tidak hanya berlaku di lingkungan sekolah, tetapi juga terbawa dalam kehidupan mereka di keluarga maupun masyarakat. Proses ini menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang berkarakter dan berintegritas. Negara-negara yang telah memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum nasional mereka, seperti Denmark dan Finlandia, menunjukkan tingkat korupsi yang jauh lebih rendah. Finlandia dan Denmark, yang mengintegrasikan pendidikan etika dan antikorupsi ke dalam sistem sekolah mereka, secara konsisten melaporkan tingkat korupsi yang lebih rendah (Bank Dunia, 2021).

d. Mendorong Partisipasi Aktif dalam Pengawasan Publik



Pendidikan antikorupsi juga mendorong murid untuk terlibat dalam kegiatan pengawasan dan advokasi, contohnya murid jenjang menengah bisa ikut berpartisipasi melihat kewajaran laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) anggota DPRD atau Kepala

Daerah di wilayahnya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang korupsi, murid didorong untuk tidak hanya antikorupsi, tetapi juga untuk mengawasi tindakan yang merugikan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional.

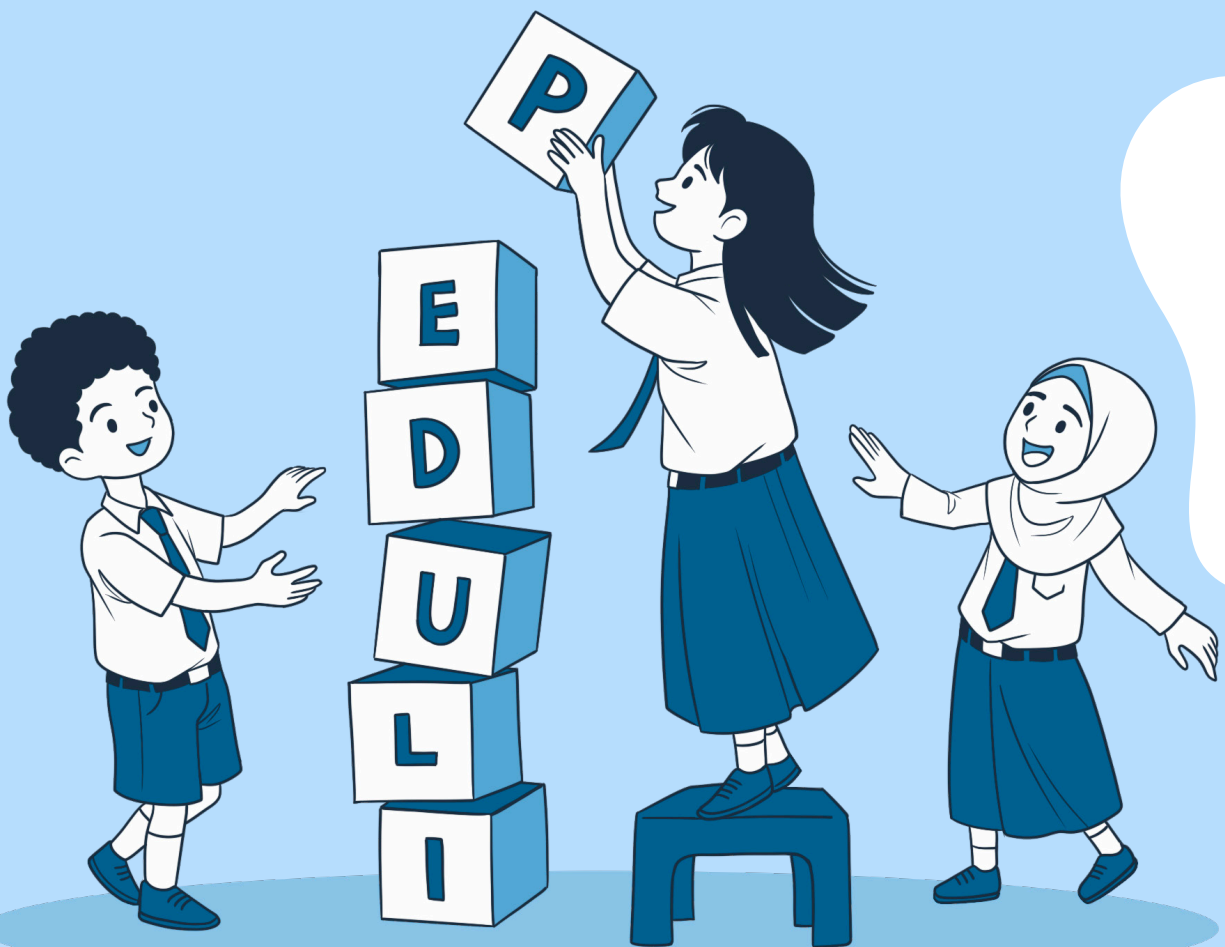
Untuk menumbuhkan partisipasi aktif murid terkait pengawasan publik di sekolah, sekolah juga bisa memberikan ruang bagi murid untuk ikut berpartisipasi aktif dalam lingkungan sekolahnya, seperti membuka layanan pengaduan terkait kebijakan sekolah atau kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi di sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat memotivasi mereka untuk berperan dalam kegiatan-kegiatan pemberantasan korupsi di masa depan.

Secara keseluruhan, wawasan ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan gejala krisis nilai yang lebih mendalam. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi merupakan strategi nasional yang vital, tidak hanya untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang menghargai integritas. Jalan menuju perubahan tidaklah mudah. Namun transformasi sosial bisa dimulai di ruang kelas, dengan anak-anak muda yang diajarkan untuk berpikir kritis, bertindak etis, dan menolak apa yang salah, bahkan ketika hal itu tampak normal di mata umum.

Integrasi Pendidikan Antikorupsi ke dalam kurikulum dan pembelajaran sangat penting bukan hanya untuk membentuk generasi muda yang memiliki integritas, rasa tanggung jawab, dan kesadaran sosial yang tinggi, tetapi juga investasi jangka panjang bagi pembentukan generasi yang memiliki sikap dan perilaku antikorupsi demi bangsa yang bermartabat. Metode integrasi PAK dalam kurikulum atau mata pelajaran dipilih dengan mempertimbangkan begitu padatnya kurikulum yang berjalan saat ini.

3

Strategi dan Peran Satuan Pendidikan dalam Membangun Budaya Antikorupsi



Budaya Sekolah Berintegritas adalah sebuah sistem, kebiasaan, dan perilaku di lingkungan sekolah yang berlandaskan pada kesadaran untuk menolak perilaku koruptif dan kesepakatan bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Budaya ini terbentuk ketika seluruh warga satuan pendidikan, mulai dari pimpinan, guru, tenaga kependidikan, murid, hingga orang tua, memahami bahwa integritas adalah “nyawa” bagi penyelenggaraan pendidikan dan sepakat untuk menjadikannya sebagai pandangan hidup.

Praktik korupsi seringkali dianggap wajar karena adanya proses normalisasi. Oleh karena itu, membangun budaya integritas adalah upaya sadar untuk melakukan denormalisasi korupsi di lingkungan sekolah.

3.2 Strategi Implementasi PAK

Setiap satuan pendidikan memiliki konteks yang unik, mulai dari karakteristik murid hingga tantangan perilaku koruptif di sekitarnya. Oleh karena itu, program penguatan integritas tidak bisa disamaratakan. Di sinilah peran Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) menjadi sangat strategis. KSP memungkinkan sekolah untuk merancang dan menyelenggarakan pendidikan yang relevan dan kontekstual. Mengintegrasikan Pendidikan Antikorupsi ke dalam KSP berarti menjadikan penguatan integritas, bukan sekadar “tambalan”, melainkan bagian utuh dari visi, misi, dan seluruh proses pembelajaran di sekolah.

Proses menumbuhkan budaya integritas dapat dilakukan secara terintegrasi melalui empat komponen utama KSP, yaitu sebagai berikut.

a. Analisis Karakteristik Satuan Pendidikan

Langkah awal adalah melakukan refleksi mendalam terhadap kondisi sekolah. Sumber data utamanya adalah Rapor Pendidikan, tetapi perlu dilengkapi dengan pemetaan risiko perilaku koruptif dan aset integritas yang dimiliki sekolah. Pemetaan ini idealnya dilakukan secara partisipatif bersama seluruh warga sekolah. Identifikasi elemen mana dari Peta Kompetensi PAK (misalnya, konsep kepemilikan atau pengelolaan dilema etis) yang paling relevan dan mendesak untuk dikuatkan di sekolah.

b. Visi, Misi, dan Tujuan

Hasil analisis digunakan untuk merumuskan atau mempertajam visi, misi, dan tujuan sekolah. Nyatakan secara eksplisit komitmen untuk membangun karakter berintegritas (visi). Kemudian, jabarkan cara mencapainya melalui kebijakan dan program-program yang nyata, seperti “Menciptakan tata kelola sekolah yang transparan untuk menguatkan elemen menjaga amanah” atau “Mengembangkan pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*) untuk melatih pengelolaan dilema etis.

c. Pengorganisasian Pembelajaran

Integrasikan materi dan nilai-nilai integritas ke dalam berbagai struktur kurikulum, sebagai berikut.

- 1) Intrakurikuler: Integrasikan nilai, seperti amanah atau menghormati hak kepemilikan dalam tugas-tugas pelajaran, atau buat diskusi kelas yang dikaitkan dengan ketaatan aturan dan dilema etis.
- 2) Kokurikuler: Pilih tema yang relevan (misalnya, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau kewargaan) atau rancang projek khusus bertema Membangun Budaya Antikorupsi, seperti membuat kampanye "Jujur Itu Hebat".
- 3) Ekstrakurikuler: Latih nilai menjaga amanah dengan praktik akuntabilitas dalam kegiatan OSIS, atau latih nilai peduli sebagai nilai integritas pada elemen budaya antikorupsi dalam kegiatan PMR.
- 4) Budaya Pembiasaan: Penegakan aturan, yang dapat dilakukan satuan pendidikan dengan menciptakan budaya positif, seperti mengantre atau masuk sekolah tepat waktu sebagai perwujudan ketaatan pada aturan. Alih-alih hanya menggunakan hukuman, terapkan pendekatan Disiplin Positif, yang berfokus pada pembangunan kesadaran dan tanggung jawab internal murid, bukan sekadar kepatuhan karena takut (Nelsen, Lott, & Glenn, 2007).

d. Perencanaan Pembelajaran

Gunakan lima prinsip implementasi PAK dalam merancang setiap kegiatan pembelajaran sebagai berikut.

- 1) Substantif: Pastikan substansi elemen PAK benar-benar masuk ke dalam materi dan aktivitas.
- 2) Berjenjang dan Berkelanjutan: Sesuaikan materi dengan tahap perkembangan murid.
- 3) Komprehensif: Terapkan secara menyeluruh di berbagai aktivitas.
- 4) Kreatif dan Relevan: Gunakan metode yang menyenangkan dan sesuai dengan konteks kehidupan murid.
- 5) Kolaboratif: Libatkan berbagai pihak (guru, murid, dan orang tua) dalam prosesnya.

Contoh Lembar Kerja Pemetaan (1): Risiko Perilaku Koruptif

Template berikut ini dapat diisi bersama oleh Tim Integritas Sekolah (guru, komite, perwakilan murid), disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi sekolah.

Tabel 3.1. Contoh Lembar Kerja Pemetaan (1): Risiko Perilaku Koruptif

Area	Contoh Perilaku Curang yang Sering Terjadi	Tingkat Risiko	Analisis (Tekanan, Peluang, Pembeneran)	Ide Solusi Prioritas
Murid	<ul style="list-style-type: none"> Bohong soal alasan tidak mengerjakan PR Melebihi laporan dana untuk acara kelasnya Nepotisme saat memilih pengurus ekskul (pilih teman dekat). 	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Tekanan: Murid takut dihukum; Mendapat tekanan dari teman. Peluang: Guru tidak melakukan pengecekan dan bimbingan. Pembeneran: "Cuma sekali ini saja." 	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan konsep disiplin positif untuk menekan jumlah murid yang tidak mengerjakan PR. Mengajarkan cara membuat laporan keuangan yang berintegritas serta memberlakukan sistem supervisi laporan secara berintegritas dan melakukan internalisasi nilai kejujuran. Melatih pembuatan keputusan dalam situasi dilema etis
Guru dan Staf	<ul style="list-style-type: none"> Tidak melaksanakan kewajiban mengajar (jam kosong) tanpa alasan yang kuat dan mendesak, datang terlambat dan pulang lebih cepat Memberi nilai lebih dan tidak adil pada murid yang ikut les privatnya. 	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Tekanan: Bosan/ butuh penghasilan tambahan. Peluang: Pengawasan longgar. Pembeneran: "Gaji tidak mencukupi sehingga tidak masalah meninggalkan jam mengajar untuk mendapat penghasilan tambahan" 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat aturan yang jelas tentang kedisiplinan dalam mengajar, termasuk membuat konsekuensinya. Menjalankan penegakan aturan, kepala sekolah melakukan supervisi kelas secara rutin dan acak.

Area	Contoh Perilaku Curang yang Sering Terjadi	Tingkat Risiko	Analisis (Tekanan, Peluang, Pembeneran)	Ide Solusi Prioritas
Sistem Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sumbangan dari orang tua yang tidak jelas laporannya. • Proses penentuan murid penerima beasiswa yang tidak transparan. • Proses penerimaan murid baru yang tidak sesuai aturan. 	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Tekanan: Kebutuhan dana sekolah. • Peluang: Laporan tidak dipublikasikan. • Pembeneran: "Demi kebaikan sekolah." 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap sumbangan dicatat dan laporannya ditempel di mading setiap bulan • mengumumkan kriteria penerima beasiswa dan nama penerimanya secara terbuka • mengumumkan skor dan murid yang diterima secara terbuka • membuat dan menyosialisasikan kebijakan sekolah terkait transparansi dan keadilan.

Contoh Lembar Kerja Pemetaan (2): Aset Integritas Sekolah

Template ini digunakan sebagai inspirasi untuk mengidentifikasi modal atau kekuatan yang sudah dimiliki sekolah untuk membangun budaya integritas.

Tabel 3.2. Contoh Lembar Kerja Pemetaan (2): Aset integritas Sekolah

Jenis Modal/ Kekuatan	Contoh Aset yang Sudah Ada di Sekolah Kita	Cara Memanfaatkannya
Modal Manusia (Orang-orang Hebat)	<ul style="list-style-type: none"> • Ada guru olahraga yang sangat disiplin dan dihormati murid. • Ketua OSIS sekarang sangat kritis dan berani bicara. • Ada beberapa murid yang jago desain grafis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan guru olahraga sebagai penasihat program "Gerakan Disiplin Waktu". • Mengajak Ketua OSIS menjadi juru bicara kampanye antikorupsi di sekolah. • Mengadakan lomba desain poster tentang nilai-nilai kejujuran yang hasilnya akan dicetak dan ditempel di seluruh sekolah.

Jenis Modal/ Kekuatan	Contoh Aset yang Sudah Ada di Sekolah Kita	Cara Memanfaatkannya
Modal Sosial (Hubungan Baik)	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah punya hubungan baik dengan Puskesmas terdekat. • Ada grup WhatsApp aktif antara wali kelas dan orang tua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerja sama dengan Puskesmas untuk membuat program "UKS Jujur", di mana murid bisa mengambil obat ringan sendiri dan mencatatnya di buku. • Menggunakan grup WhatsApp untuk berbagi informasi tentang program integritas sekolah dan meminta dukungan orang tua.
Modal Politik (Aturan yang Ada)	<ul style="list-style-type: none"> • Ada aturan di tata tertib tentang larangan <i>bullying</i>. • Ada kebijakan dari Dinas Pendidikan tentang Sekolah Ramah Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat aturan larangan <i>bullying</i> dengan kampanye tentang elemen ketaatan aturan dan dilema etis. • Mengaitkan program integritas dengan kebijakan Sekolah Ramah Anak untuk mendapatkan dukungan lebih dari dinas.
Modal Agama dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kegiatan Pesantren Kilat setiap Ramadan. • Ada budaya lokal tentang pentingnya gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi materi Pesantren Kilat dengan kisah-kisah teladan tentang kejujuran dan amanah dari tokoh-tokoh agama. • Mengadakan kegiatan "Gotong Royong Membersihkan Hati", yaitu aksi sosial bersama yang dananya dikelola secara transparan.
Modal Fisik (Barang dan Tempat)	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah punya lapangan yang luas. • Punya akun media sosial (Instagram/TikTok) yang aktif. • Setiap kelas punya papan tulis kecil di depan pintu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan lapangan untuk mengadakan games yang melatih sportivitas dan kejujuran. • Membuat konten video pendek tentang aksi-aksi integritas di sekolah dan memviralkannya. • Menggunakan papan tulis kecil untuk menulis "Kata Mutiara Integritas Minggu Ini".
Modal Finansial (Dana)	<ul style="list-style-type: none"> • Ada anggaran OSIS. • Ada peluang mengajukan proposal ke perusahaan sekitar untuk program CSR. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengalokasikan sebagian anggaran OSIS untuk mendanai kegiatan kampanye integritas atau antikorupsi. • Membuat proposal yang bagus untuk program "Duta Integritas" dan mengajukannya ke perusahaan.

3.3 Peran Warga Sekolah/Madrasah

Keberhasilan membangun budaya integritas sangat bergantung pada kepemimpinan dan keteladanan. Pemimpin satuan pendidikan, khususnya kepala sekolah, memegang peran kunci sebagai motor penggerak utama. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas mengelola, tetapi juga menginspirasi dan memobilisasi seluruh warga sekolah untuk bergerak ke arah tujuan yang sama.

Kepemimpinan Transformasional: Menginspirasi dari Hati

Untuk perubahan budaya yang mendasar seperti ini, gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah Kepemimpinan Transformasional. Gaya ini tidak hanya berfokus pada imbalan dan hukuman, tetapi juga pada bagaimana pemimpin dapat mengubah keyakinan, nilai, dan kebutuhan para pengikutnya (dalam hal ini, para guru dan staf) dari kepentingan pribadi menjadi kepentingan kolektif. Dengan menerapkan kepemimpinan transformasional, kepala sekolah tidak hanya “memerintah” perubahan, tetapi juga “mengajak” seluruh warga sekolah untuk menjadi bagian dari perjalanan perubahan itu sendiri. Berikut di bawah ini salah satu cerita inspiratif yang menggambarkan kepemimpinan transformasional.

Menyemai Integritas, Menuai Senyum Pagi


Cerita Inspiratif dari SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta, Jawa Tengah

Di antara hiruk pikuk kota Surakarta berdiri kokoh SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta, sebuah sekolah yang telah melayani masyarakat sejak tahun 1935. Bagi sekolah yang telah berusia 90 tahun ini, tantangan terbesarnya adalah bagaimana tetap relevan dan memberikan dampak nyata di era modern. Di sinilah peran seorang pemimpin transformatif, Ibu Sri Sayekti, yang tidak hanya melihat sekolah sebagai gedung, tetapi sebagai laboratorium pembentukan karakter sejati.


Pendekatan Ibu Yekti yang menyentuh hati adalah menciptakan lingkungan yang penuh afirmasi. Setiap pagi, beliau dan para guru berdiri di gerbang, menyambut setiap murid dengan senyum, sapaan hangat, dan kata-kata positif. Sambutan ini menanamkan rasa dihargai dalam diri murid serta menyiapkan mereka untuk belajar dengan hati gembira. Cara ini juga menegaskan bahwa hari itu akan menjadi hari yang penuh kebaikan. Beliau membawa “udara segar” ke dalam sistem pendidikan dengan menanamkan inti nilai-nilai kemanusiaan, yaitu integritas dan kemandirian.

Transformasi dimulai sejak tahun 2015 ketika sekolah ini ditunjuk sebagai sekolah percontohan Pendidikan Karakter. Semua kegiatan diintegrasikan dengan satu tujuan: membentuk murid yang tidak hanya pintar, tetapi juga berkarakter. Karakter diajarkan melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti praktik kemandirian saat jam makan, di mana setiap murid mencuci peralatan makan mereka sendiri. Sebuah pelajaran sederhana tentang tanggung jawab dan kedisiplinan. Selain itu, warisan budaya digunakan sebagai sarana pendidikan. Karakter luhur bangsa ditanamkan melalui seni tradisional, khususnya Wayang Kulit, di mana murid belajar tentang keadilan dan keberanian membela kebenaran.

Di bawah kepemimpinan Ibu Yekti, pembelajaran juga didorong untuk bersifat praktis dan solutif. Para guru pun menjadi contoh teladan, misalnya dengan masuk kelas tepat waktu dan menjadi sahabat bagi murid. Dengan kepemimpinan yang transformatif, Ibu Yekti tidak hanya menciptakan lulusan berprestasi, tetapi juga menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter sebagaimana kutipan beliau: "Prestasi terbesar bukanlah mewariskan trofi emas di dalam lemari kaca, melainkan melahirkan generasi emas penerus bangsa".



Scan Me!



Video dokumentasi kegiatan SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta dapat dilihat pada tautan berikut ini.
<https://www.youtube.com/watch?v=d9vMNOx-sjk>

Tabel 3.3. Inspirasi aktif warga satuan pendidikan dalam bekerja sama mewujudkan karakter dan budaya antikorupsi

Warga Sekolah	Peran yang Bisa Diambil
Murid	<ul style="list-style-type: none"> Jadi Pelopor: Berani bilang "tidak" saat diajak bolos atau berbuat curang. Jadi Mata dan Telinga: Berani melapor (kepada guru yang dipercaya) jika melihat ada tindakan perundungan atau pemalakan. Jadi Contoh: Mengerjakan tugas piket kelas dengan sungguh-sungguh meskipun tidak ada yang mengawasi.
Guru	<ul style="list-style-type: none"> Jadi Teladan: Masuk sekolah dan mengajar tepat waktu serta mengajar dengan penuh dedikasi. Jadi Fasilitator: Membuat kesepakatan aturan di kelas bersama murid agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab. Jadi Motivator: Memberi pujian tulus saat melihat murid berbuat jujur, misalnya saat ada yang mengakui kesalahannya.
Kepala Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Jadi Arsitek: Merancang sistem dan aturan di sekolah yang mempersempit peluang untuk berbuat curang. Jadi Wasit yang Adil: Memastikan semua aturan berlaku sama untuk semua orang, tidak ada "anak emas" atau "guru kesayangan". Jadi Diplomat: Membangun kerja sama dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung program sekolah.

Warga Sekolah	Peran yang Bisa Diambil
Staf Sekolah (TU, Pustakawan)	<ul style="list-style-type: none"> • Jadi Pelayan Publik yang Baik: Memberikan layanan administrasi yang ramah, cepat, dan tanpa meminta "uang rokok". • Jadi Penjaga Amanah: Mengelola data murid dan keuangan sekolah dengan jujur dan rapi. • Jadi Sumber Inspirasi: Pustakawan bisa merekomendasikan buku-buku tentang tokoh-tokoh yang jujur dan berani.
Penjaga Kantin dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jadi Pengingat Kebaikan: Dengan ramah mengingatkan murid untuk antre dan membayar dengan jujur. • Jadi Penjaga Nilai: Membantu guru menjaga lingkungan sekolah agar aman dari pemalakan atau pengaruh buruk dari luar.
Komite Sekolah dan Orang Tua	<ul style="list-style-type: none"> • Jadi Mitra Kritis: Aktif bertanya dan memberi masukan tentang program dan penggunaan anggaran sekolah. • Jadi Teladan di Rumah: Mengajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab di rumah, dan tidak membela anak jika mereka berbuat salah di sekolah. • Jadi Contoh Nyata: Tidak menawarkan hadiah kepada guru agar nilai anaknya bagus.

3.4 Disiplin Positif dan Segitiga Restitusi: agar Karakter Tumbuh dari Dalam

Gagasan inti dari pendekatan disiplin positif dalam pendidikan adalah keyakinan bahwa karakter tumbuh dari dalam, bukan dipaksa dari luar. Dalam implementasinya, disiplin positif memosisikan guru sebagai pembangun ekosistem yang saling menghormati, menggunakan dorongan (encouragement), dan penyelesaian masalah untuk menguatkan karakter, bukan melalui hukuman. Pendekatan ini menargetkan tumbuhnya motivasi intrinsik dan perubahan perilaku jangka panjang, bukan kepatuhan sesaat.

Penerapan Disiplin Positif bertujuan untuk: (1) menumbuhkan kesadaran dan motivasi intrinsik murid dalam berperilaku berintegritas; (2) membantu guru mengelola pelanggaran atau konflik secara restoratif, bukan menghukum atau mengancam; dan (3) membangun budaya sekolah berintegritas melalui dialog, refleksi, dan tanggung jawab pribadi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Disiplin Positif menerapkan prinsip: (1) semua anak pada dasarnya baik (guru melihat perilaku sebagai kesempatan belajar, bukan kesalahan moral yang harus dimusuhi); (2) Motivasi terbaik lahir dari dalam diri (Perilaku baik bukan karena takut atau ingin hadiah, tapi karena sadar bahwa itu benar); (3) Guru sebagai pembimbing, bukan pengontrol (Guru mendampingi proses refleksi dan pemulihan, bukan sekadar mengatur); dan (4) Hubungan lebih penting daripada hukuman (Perilaku berubah ketika hubungan penuh hormat terjaga dengan baik).

Sebagai pelengkap disiplin positif, sekolah sangat diharapkan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga Restitusi memberi tahapan praktis pada saat terjadi pelanggaran sebagai berikut: (1) menstabilkan identitas (mengubah fokus dari "pelanggar" ke "pembelajar"); (2) memvalidasi kebutuhan/tujuan (apa yang sebenarnya diupayakan); (3) menawarkan pilihan mengoreksi demi memperbaiki hubungan dan nilai yang diyakini. Tujuannya bukan "membayar kesalahan", melainkan memperkuat disiplin diri dan membuat "yang benar" masuk akal dari dalam diri murid. Ini sejalan dengan paradigma restoratif memperbaiki relasi dan meneguhkan norma kolektif.

Langkah praktis Segitiga Restitusi digunakan saat murid melakukan pelanggaran, konflik, atau kesalahan, seperti pada contoh berikut.

Tabel 3.4 Contoh Langkah Praktis Segitiga Restitusi

Tahap	Pertanyaan Contoh	Tujuan
Menstabilkan Identitas (Calm)	<ul style="list-style-type: none"> "Saya di sini untuk membantumu. Kamu aman." "Kamu bukan anak nakal, kamu sedang belajar." 	Menenangkan emosi, mencegah reaksi defensif.
Memvalidasi Kepentingan/ Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> "Apa yang sedang kamu usahakan saat itu?" "Apa yang kamu harapkan terjadi?" 	Menggali kebutuhan & alasan di balik perilaku.
Menawarkan Restitusi (Pemulihan nilai diri)	<ul style="list-style-type: none"> "Siapa kamu sesungguhnya?" "Nilai apa yang ingin kamu pegang?" "Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan?" 	Membantu murid memilih tindakan perbaikan yang sesuai nilai dirinya.

Contoh Kalimat Guru: "Kamu sebenarnya anak yang bertanggung jawab. Kamu mau memperbaikinya dengan cara apa supaya hubungan dan aturan tetap berjalan?"

Tabel 3.5. Contoh Perbedaan Penerapan Restitusi dengan Pendekatan Hukuman

Situasi	Pendekatan Restitusi	Pendekatan Hukuman
Murid meminjam barang tanpa izin	Tanyakan kebutuhan: bangun hubungan untuk tawarkan perbaikan; kembalikan barang; sampaikan permintaan maaf bermartabat	Menyita barang dan/atau memberi poin hukuman
Murid menyontek	Ajak refleksi: "Siapakah kamu jika kamu memilih jujur?" dan "Siapakah kamu jika kamu memilih tidak jujur? rancang strategi dan bimbing untuk belajar ulang	Memberi nilai "nol" dan/ atau memperlukannya di depan kelas
Murid tidak menjalankan tugas piket	Bahas nilai tanggung jawab dan ajak untuk memperbaiki dengan pilihan yang disepakati	Menulis hukuman atau membersihkan kelas sendirian

Disiplin positif dan Segitiga Restitusi selaras dengan ruh kebijakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar murid secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Pendekatan ini memperkuat implementasi Pendidikan Antikorupsi karena: (1) disiplin positif menyalakan motivasi intrinsik, murid memilih untuk jujur, amanah, dan seterusnya karena sesuai dengan kebutuhannya sebagai manusia, bukan takut hukuman; (2) disiplin positif menyediakan "alat uji" otentik berupa bukti perubahan yang terlihat (observable) pada rutinitas bukan sekadar tes pengetahuan antikorupsi; dan (3) memupuk budaya sekolah yang konsisten dan memperdalam keterlibatan murid jika implementasi dijalankan secara utuh, dilatih secara terus menerus, dan dimonitor capaiannya.



Disiplin positif dan Segitiga Restitusi menginspirasi dari dalam, meneguhkan bahwa bibit kebajikan sudah ada pada setiap anak. Dunia pendidikan tinggal mengasah dan memberi ruang agar ketaatan aturan, kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan keadilan tumbuh alami, bukan karena takut atau pamrih. Dengan bukti yang dikumpulkan secara otentik dan reflektif, Pendidikan Antikorupsi bertransformasi dari “materi” menjadi identitas moral sekolah.

Disiplin positif dan restitusi bukan metode baru yang harus “diterapkan sempurna”, tetapi cara memandang anak, memulihkan relasi, dan membantu mereka menjadi manusia yang memegang nilai dirinya sendiri. Inilah pondasi sejati Pendidikan Antikorupsi: nilai hidup dari dalam, bukan dipaksakan dari luar.

4

Pengintegrasian PAK ke dalam Pembelajaran



Pengintegrasian PAK ke dalam Pembelajaran

4.1 Peta Kompetensi



Dimensi profil lulusan merupakan karakteristik dan kompetensi yang diharapkan dikuasai murid pada akhir pendidikan, yang meliputi keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Dimensi profil lulusan tidak hanya berfokus pada penguasaan disiplin ilmu dan keterampilan teknis, tetapi juga menekankan pada pembentukan karakter dan integritas moral yang kuat, salah satunya adalah penanaman nilai-nilai antikorupsi. Melalui pendidikan antikorupsi, satuan pendidikan diharapkan dapat mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bermoral tinggi dan antikorupsi, siap berkontribusi positif tanpa mencederai etika dan hukum. Memperkuat pondasi karakter ini menjadi esensial, dan untuk mencapainya diperlukan kerangka kerja yang jelas, yang termuat dalam peta kompetensi pendidikan antikorupsi.



Peta Kompetensi Pendidikan Antikorupsi diharapkan mampu menjadi bagian dari proses pemberantasan korupsi melalui strategi pendidikan dengan membangun generasi yang 'tidak mau korupsi'. Strategi dilakukan dengan internalisasi nilai integritas ke dalam pembelajaran, pembiasaan, dan budaya Sekolah dan Madrasah. Adapun elemen Peta Kompetensi Pendidikan Antikorupsi diambil dari elemen-elemen kurikulum berjalan sehingga diharapkan tidak menambah beban guru dalam merencanakan pembelajaran di kelas baik melalui intra kurikuler, kokurikuler, maupun ekstra kurikuler. Namun, elemen-elemen itu dikuatkan dengan 'kata kunci' yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi yang diharapkan selaras dengan tujuan pembangunan generasi penerus bangsa yang 'tidak mau korupsi'. Ditambah, elemen yang merupakan kekhasan Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya terkait Dilema Etis, Literasi Antikorupsi, dan Membangun Budaya Antikorupsi.

Peta Kompetensi Pendidikan Antikorupsi terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu: (1) Ketaatan Pada Aturan, (2) Konsep Kepemilikan, (3) Menjaga Amanah, (4) Pengelolaan Dilema Etis, dan (5) Membangun Budaya Antikorupsi. Melalui 5 (lima) elemen tersebut, diharapkan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dapat lebih mudah dilakukan dan diukur keluaran dan dampaknya khususnya dalam konteks perilaku anak didik pendidikan anak usia dini hingga murid di tingkat sekolah dasar dan menengah paling akhir Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK.

Adapun, penjelasan dari masing-masing elemen tersebut adalah sebagai berikut.

a. Ketaatan pada Aturan

Elemen	Deskripsi	Sub-Elemen
Ketaatan pada Aturan	Menjalankan aturan secara sadar dan konsisten	1. Kesadaran pentingnya taat aturan dalam kehidupan
		2. Menjaga komitmen diri dalam menjalankan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar

Elemen Ketaatan pada Aturan dikuatkan dengan kata kunci 'secara sadar' dan 'konsisten'. Melalui elemen ini murid diharapkan dapat memiliki kompetensi menjalankan aturan dengan kesadaran penuh akan manfaat dan dampak buruk ketika tidak melaksanakannya. Aturan dibuat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi banyak pihak namun kadang dalam pelaksanaannya banyak aturan yang diterapkan tanpa memberikan pemahaman yang jelas sehingga kerap diartikan sebagai unsur yang kaku dan tidak dapat didiskusikan. Sejatinya, aturan bersifat dinamis karena kehidupan bermasyarakat selalu mengalami perubahan. Oleh sebab itu, elemen Ketaatan pada Aturan diharapkan dapat membangun kesadaran murid dalam melaksanakan aturan dan mendiskusikannya bila membutuhkan perubahan atas dasar kebermanfaatannya banyak pihak. Ketika murid sudah mampu melihat pentingnya mentaati aturan diharapkan ke depannya mereka dapat komit melaksanakannya dengan konsisten.

Lebih jauh lagi, di masa mendatang, dalam konteks perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi, murid-murid dapat melihat dampak buruk dari keduanya sehingga memiliki komitmen dan konsisten untuk tidak mau melakukannya. Juga bukan tidak mungkin, ketika nanti mereka menjadi penentu kebijakan, mereka dapat menjadi generasi yang mampu membuat aturan dan kebijakan dengan sudut pandang manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.

b. Konsep Kepemilikan

Elemen	Deskripsi	Sub-Elemen
<p>Konsep Kepemilikan</p>	<p>Menghormati hak kepemilikan dan bertanggung jawab atas penggunaan barang milik pribadi, orang lain, publik, dan negara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran terhadap hak dan kewajiban terkait dengan batasan kepemilikan pribadi, orang lain, publik, dan negara 2. Menunjukkan sikap dan perilaku yang menghormati hak kepemilikan dan dapat bertanggung jawab atas penggunaan barang milik pribadi, orang lain, publik, dan negara

Elemen Konsep Kepemilikan dikuatkan dengan kata kunci ‘menghormati’ dan ‘bertanggungjawab’. Elemen ini banyak termuat di capaian pembelajaran sejak pendidikan anak usia dini namun melalui elemen ini Komisi Pemberantasan Korupsi berharap dapat menguatkan pembangunan kesadaran murid di wilayah kepemilikan baik barang milik pribadi, orang lain, publik, dan negara sehingga di masa mendatang mereka dapat menjadi individu yang terbiasa menghormati dan bertanggungjawab atas benda yang digunakannya baik itu milik pribadi, orang lain, publik, bahkan negara.

Sebuah cerita dari kisah hidup seorang Baharuddin Lopa seorang mantan Bupati sekaligus Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi, yang melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas untuk keperluan mereka sehari-hari karena segala sesuatu harus sesuai dengan peruntukannya. Sikap dan prinsip seperti ini bukan datang dengan sendirinya, semua diajarkan, dilatih, dan dibiasakan sejak usia dini, bahkan, butuh figur teladan untuk menguatkan sikap dan perilaku tersebut terus konsisten dilakukan (orange juice for integrity, belajar integritas kepada tokoh bangsa komisi pemberantasan korupsi, 2014).

c. Menjaga Amanah

Elemen	Deskripsi	Sub-Elemen
Menjaga Amanah	Menjaga amanah termasuk dalam situasi konflik kepentingan.	<ol style="list-style-type: none">1. Kesadaran pentingnya menjaga amanah dan dampak atas penyalahgunaannya2. Menjaga amanah termasuk dalam situasi konflik kepentingan

Elemen Menjaga Amanah dikuatkan dengan kata kunci 'dalam situasi konflik kepentingan'. Konflik atau benturan kepentingan dalam konteks peran atau amanah dalam kehidupan sehari-hari menjadi penting untuk dipahami sebagai dasar menghindari perilaku koruptif yang menjadi bibit tindak pidana korupsi. Amanah sederhana di kehidupan sehari-hari murid di sekolah seperti ketua kelompok ataupun ketua kelas, tidak luput dari potensi konflik kepentingan. Ketua kelompok yang memilih anggotanya hanya teman dekat atau mereka yang pintar-pintar saja sudah menjadi contoh sederhana situasi konflik kepentingan.

Membangun kesadaran pentingnya menjaga amanah dan konsekuensi atas penyalahgunaannya termasuk dalam situasi konflik kepentingan menjadi hal penting lainnya untuk dapat dibangun di generasi mendatang. Elemen ini diharapkan dapat membangun generasi yang 'tidak mau korupsi' mulai dari perilaku dasarnya.

Konflik kepentingan adalah akar dari segala tindak pidana korupsi di negeri ini. Kesadaran yang baik pentingnya menjaga amanah dalam situasi konflik kepentingan diharapkan akan menghindari generasi mendatang dari godaan korupsi yang paling hebat sekalipun.

d. Pengelolaan Dilema Etis

Elemen	Deskripsi	Sub-Elemen
Pengelolaan Dilema Etis	Mengambil keputusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam menghadapi situasi dilema etis.	<ol style="list-style-type: none">1. Kesadaran pentingnya berpikir kritis ketika menghadapi situasi dilema etis2. Bertindak berdasarkan nilai-nilai integritas ketika menghadapi situasi dilema etis

Elemen Pengelolaan Dilema Etis merupakan salah satu elemen khas Komisi Pemberantasan Korupsi yang dimasukkan ke dalam Peta Kompetensi Pendidikan Antikorupsi. Kata kunci 'dilema etis' menjadi kompetensi yang dapat dikatakan setingkat lebih tinggi bila dibandingkan dengan elemen sebelumnya, Ketaatan pada Aturan. Dalam konteks aturan, yang menjadi dasar adalah benar-salah, secara tekstual lebih mudah dilakukan dengan selalu mengacu ke aturan yang digunakan. Namun, untuk dilema etis, yang menjadi dasar adalah nilai integritas, moral, dan etika. Kondisi ini bukan sekadar pertimbangan benar-salah, namun membutuhkan pertimbangan tambahan menggunakan nilai integritas. Tidak mendapatkan nilai terbaik karena memegang teguh tidak menerima tawaran bocoran jawaban atau tidak menyontek tentu patut diapresiasi, namun bila mengedepankan tanggung jawab, belajar giat agar mendapatkan nilai terbaik sehingga tidak perlu menyontek tentunya akan memberikan arti yang lebih bermakna.

Pengelolaan dilema etis mengembangkan kompetensi murid untuk dapat dengan kesadaran yang baik mengambil keputusan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, etika, bahkan moral. Situasi yang dihadapi akan lebih dari sekadar benar-salah, namun mencari keputusan terbaik dari dua hal yang sama-sama baik atau sama-sama benar. Di masa depan, generasi dengan kompetensi pengelolaan dilema etis yang baik diharapkan akan mampu memiliki kesadaran yang baik dalam memikirkan kepentingan masyarakat banyak ketimbang kepentingan pribadi ataupun golongan.

e. Membangun Budaya Antikorupsi

Elemen	Deskripsi	Sub-Elemen
Membangun Budaya Antikorupsi	Memiliki literasi antikorupsi serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang membangun budaya antikorupsi	<ol style="list-style-type: none"> Literasi Antikorupsi Berpartisipasi aktif dalam membangun budaya antikorupsi

Elemen Membangun Budaya Antikorupsi menjadi elemen terakhir yang juga merupakan elemen khas Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi penguat keempat elemen sebelumnya. Selain memiliki pemahaman antikorupsi yang baik melalui literasi antikorupsi, elemen ini akan mengembangkan kompetensi murid untuk tidak hanya sekadar taat aturan, menghormati hak kepemilikan dan bertanggung jawab atas penggunaan barang milik pribadi, orang lain, publik, dan negara, mampu menjaga amanah termasuk dalam situasi konflik kepentingan, dan mampu mengelola dilema etis baik, tetapi mampu berpartisipasi aktif membangun keempat elemen sebelumnya sebagai bagian dari budaya antikorupsi.

Berikut tabel lengkap Peta Kompetensi Pendidikan Antikorupsi per jenjang dari tingkat PAUD hingga SMA/MA/SMK/MAK.

Tabel 4.1. Peta Kompetensi Pendidikan Antikorupsi

No	Elemen	Deskripsi	Sub Elemen	Kompetensi			
				PAUD	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/ SMK/MAK
1.	Ketaatan pada aturan	Menjalankan aturan secara sadar dan konsisten	1.1 Kesadaran pentingnya taat aturan dalam kehidupan	Mengenal aturan sederhana di lingkungan sekolah/ madrasah dan tempat tinggal	Menjelaskan alasan pentingnya aturan di lingkungan sekolah/ madrasah dan tempat tinggal	Mengidentifikasi dampak positif dari ketaatan aturan dan dampak negatif dari pelanggaran aturan di lingkungan sekolah/ madrasah, tempat tinggal, dan tempat umum/publik	Menganalisis dampak positif dari ketaatan aturan dan dampak negatif dari pelanggaran aturan di lingkungan sekolah/ madrasah, tempat tinggal, tempat umum/publik, dan negara
			1.2. Menjaga komitmen diri dalam menjalankan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar	Menjalankan aturan sederhana di sekolah/ madrasah dan tempat tinggal	Menjalankan aturan dengan kesadaran/ motivasi internal di lingkungan sekolah/ madrasah dan tempat tinggal	Menjalankan aturan dengan kesadaran/ motivasi internal di lingkungan sekolah/ madrasah, tempat tinggal, dan tempat umum/publik	Menjalankan aturan dengan motivasi internal secara konsisten di lingkungan sekolah/ madrasah, tempat tinggal, tempat umum/publik, dan negara

No	Elemen	Deskripsi	Sub Elemen	Kompetensi			
				PAUD	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/ SMK/MAK
2.	Konsep kepemilikan	Menghormati hak kepemilikan dan bertanggung jawab atas penggunaan barang milik pribadi, orang lain, publik, dan negara.	2.1. Kesadaran terhadap hak dan kewajiban terkait dengan batasan kepemilikan pribadi, orang lain, publik, dan negara	Mengenali benda milik pribadi dan orang lain	Mengenali konsep hak dan tanggung jawab atas penggunaan barang milik pribadi, orang lain dan publik	Menjelaskan konsep hak dan tanggung jawab atas penggunaan barang milik pribadi, orang lain, publik dan negara	Menganalisis konsep hak dan tanggung jawab atas penggunaan barang milik pribadi, orang lain, publik, dan negara dengan pendekatan multidisiplin
			2.2. Menunjukkan sikap dan perilaku yang menghormati hak kepemilikan dan dapat bertanggung jawab atas penggunaan barang milik pribadi, orang lain, publik, dan negara	Menghormati hak kepemilikan pribadi dan orang lain	Menghormati hak kepemilikan dan dapat bertanggung jawab atas penggunaan barang milik pribadi, orang lain, dan sekolah/ madrasah	Menghormati hak kepemilikan dan dapat bertanggung jawab atas penggunaan barang milik pribadi, orang lain, sekolah/ madrasah, dan publik	Menunjukkan perilaku yang menghormati hak kepemilikan dan dapat bertanggung jawab atas penggunaan barang milik pribadi, orang lain, sekolah/ madrasah, publik, dan negara secara konsisten

No	Elemen	Deskripsi	Sub Elemen	Kompetensi			
				PAUD	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/ SMK/MAK
3.	Menjaga amanah	Menjaga amanah, termasuk dalam situasi konflik kepentingan	3.1. Kesadaran pentingnya menjaga amanah dan dampak atas penyalahgunaannya	Mengenal amanah sederhana di lingkungan sekolah/ madrasah dan tempat tinggal	Menggambarkan contoh amanah di lingkungan sekolah/ madrasah, dan tempat tinggal, termasuk konflik kepentingan	Mengidentifikasi dampak menjaga amanah dan penyalahgunaannya di lingkungan sekolah/ madrasah, tempat tinggal dan publik termasuk dalam situasi konflik kepentingan	Menganalisis dampak menjaga amanah dan penyalahgunaannya di lingkungan sekolah/ madrasah, tempat tinggal, publik, dan negara, termasuk dalam situasi konflik kepentingan melalui pendekatan multidisiplin
			3.2. Menjaga amanah, termasuk dalam situasi konflik kepentingan	Menjaga amanah sederhana di lingkungan sekolah/ madrasah dan tempat tinggal	Menjaga amanah di lingkungan sekolah/ madrasah dan tempat tinggal termasuk dalam situasi konflik kepentingan	Menjaga amanah di lingkungan sekolah/ madrasah, tempat tinggal, dan publik, termasuk dalam situasi konflik kepentingan	Menjaga amanah di lingkungan sekolah/ madrasah, tempat tinggal, dan publik, termasuk dalam situasi konflik kepentingan secara konsisten

No	Elemen	Deskripsi	Sub Elemen	Kompetensi			
				PAUD	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/ SMK/MAK
4.	Pengelolaan dilema etis	Mengambil keputusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam menghadapi situasi dilema etis	4.1. Kesadaran pentingnya berpikir kritis ketika menghadapi situasi dilema etis	Membedakan tindakan yang baik dan buruk di lingkungan sekolah/ madrasah dan tempat tinggal	Menjelaskan situasi dilema etis sederhana di lingkungan sekolah/ madrasah dan tempat tinggal	Mengidentifikasi situasi dilema etis di lingkungan sekolah/ madrasah, tempat tinggal, dan publik	Menganalisis situasi dilema etis di lingkungan sekolah/ madrasah, tempat tinggal, publik, dan negara
			4.2. Bertindak berdasarkan nilai-nilai integritas ketika menghadapi situasi dilema etis	Menentukan tindakan yang baik di lingkungan sekolah/ madrasah dan tempat tinggal	Menentukan tindakan yang terbaik dalam situasi dilema etis berdasarkan nilai integritas/ norma yang berlaku di lingkungan sekolah/ madrasah dan tempat tinggal	Menentukan tindakan yang terbaik dalam situasi dilema etis berdasarkan nilai integritas/ norma yang berlaku di lingkungan sekolah/ madrasah, tempat tinggal, dan publik	Menentukan tindakan yang terbaik dalam situasi dilema etis berdasarkan nilai integritas/ norma yang berlaku di lingkungan sekolah/ madrasah, tempat tinggal, publik, dan negara secara konsisten

No	Elemen	Deskripsi	Sub Elemen	Kompetensi			
				PAUD	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/ SMK/MAK
5.	Membangun budaya antikorupsi	Memiliki literasi antikorupsi serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang membangun budaya antikorupsi	5.1. Literasi antikorupsi	Mengenal nilai-nilai integritas di lingkungan sekolah/ madrasah dan tempat tinggal	Memahami nilai-nilai integritas dan perilaku koruptif di lingkungan sekolah/ madrasah dan tempat tinggal	Menjelaskan bentuk, faktor penyebab serta dampak dari perilaku koruptif di lingkungan sekolah/ madrasah, tempat tinggal, dan publik serta tindak pidana korupsi dalam lingkup negara	Menganalisis berbagai bentuk, faktor penyebab serta dampak dari perilaku koruptif di lingkungan sekolah/ madrasah, tempat tinggal, dan publik serta tindak pidana korupsi melalui pendekatan multidisiplin
			5.2. Berpartisipasi aktif dalam membangun budaya antikorupsi	Mengikuti kegiatan sederhana yang mendukung nilai-nilai integritas	Berpartisipasi aktif dalam kegiatan di lingkungan sekolah/ madrasah dan tempat tinggal yang mendukung nilai-nilai integritas	Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bertujuan mencegah perilaku koruptif serta memperkuat nilai-nilai integritas di lingkungan sekolah/ madrasah, tempat tinggal, dan publik	Berpartisipasi aktif dan mengajak orang lain dalam kegiatan yang bertujuan mencegah perilaku koruptif dan memperkuat nilai-nilai integritas di lingkungan sekolah/ madrasah, tempat tinggal, dan publik

Guru sangat bisa mengambil peran aktif dalam penyelenggaraan PAK ini. Bab ini memberikan panduan praktis untuk menyinkronkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sehingga guru tidak perlu menyiapkan waktu khusus atau menambah jam pelajaran untuk membelajarkan isu pendidikan antikorupsi kepada murid. Pastikan bahwa pembelajaran tentang pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada sekadar teori, tetapi menyentuh hati murid, dan memampukannya untuk bertindak nyata.

4.2 Implementasi PAK pada Intrakurikuler

Implementasi kegiatan intrakurikuler di satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga jenjang pendidikan menengah menjadi bagian dari struktur kurikulum yang diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Lebih lanjut, di dalam permendikdasmen tersebut disebutkan bahwa ketika satuan pendidikan merancang kurikulum, harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut.

Pengembangan karakter

Pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional murid yang terintegrasi dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler serta melalui pembiasaan dalam budaya sekolah;

Fleksibel

Dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi murid, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat; dan

Berfokus pada muatan esensial

Berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter murid agar proses pembelajaran dapat dikelola secara optimal untuk pembelajaran mendalam

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang merupakan proses pembelajaran dan penguatan integritas ekosistem pendidikan dengan tujuan membentuk karakter dan budaya antikorupsi. PAK dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai

dari penanaman nilai-nilai integritas pada jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan tinggi, hingga pemeliharaan nilai pada pendidikan dan pelatihan ASN.

Implementasi pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan, khususnya di kegiatan intrakurikuler merupakan strategi yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Pendekatan ini mengintegrasikan materi antikorupsi secara sistematis ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, bukan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Konsep dasarnya adalah penekanan pada perubahan pola pikir dan perilaku untuk menerapkan nilai-nilai integritas untuk membentuk karakter dan budaya antikorupsi.

Dalam program PAK, pengintegrasian topik budaya antikorupsi dilakukan dengan memasukkannya dalam perencanaan pembelajaran. Oleh karena itu, implementasi PAK dalam intrakurikuler sebenarnya bukanlah konsep yang baru. Dalam konteks ini, PAK diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, disisipkan dalam perencanaan pembelajaran, implementasi secara kontekstual, dan diukur keberhasilannya melalui asesmen mata pelajaran. Misalnya, konsep taat pada aturan dapat dihubungkan dengan Pendidikan Pancasila, salah satunya dalam capaian pembelajaran Fase E elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu murid mampu menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan harmoni dengan sesama manusia dan lingkungan. Kemudian, ketika murid melakukan praktikum di laboratorium atau sedang melakukan penelitian sosial lingkup kecil, ada kalanya data yang di lapangan atau data yang dihasilkan melalui penelitian di laboratorium tidak sesuai dengan teori. Hal tersebut memicu dilema etis, apakah hasil penelitiannya yang belum valid atukah memang hasilnya berbeda dengan teori yang dipelajari. Pengelolaan dilema etis merupakan salah satu elemen di PAK yang memiliki pengertian bagaimana murid belajar dalam pengambilan keputusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam menghadapi situasi dilema etis.



Langkah-Langkah Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Intrakurikuler

PELAJARI PETA KOMPETENSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Peta kompetensi pendidikan anti korupsi tersedia untuk jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK. Kompetensi masing-masing fase dikelompokkan menjadi elemen ketaatan pada aturan, konsep pemilikan, menjaga amanah, pengelolaan dilema etis, membangun budaya antikorupsi.

IDENTIFIKASI DAN PILIH KOMPETENSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Identifikasi kompetensi pendidikan antikorupsi yang sesuai dengan jenjang peserta didik. Pilih dan prioritaskan kompetensi berdasarkan hasil pemetaan pendidikan antikorupsi.

TENTUKAN MATA PELAJARAN

Pada mata pelajaran apa saja kompetensi tersebut dapat diintegrasikan? Carilah materi pembelajaran yang sejalan dengan kompetensi pendidikan antikorupsi yang sudah dipilih.

RENCANAKAN PEMBELAJARAN

Susunlah tujuan pembelajaran berdasarkan Capaian Pembelajaran mata pelajaran. Integrasikan kompetensi pendidikan antikorupsi dalam alur tujuan pembelajaran dan detailkan dalam perencanaan pembelajaran.

LAKSANAKAN PELAJARAN

Selenggarakan pembelajaran dan kuatkan melalui pembiasaan.



**Halo! Saya, Kirana.
Begini caraku memasukkan pendidikan
antikorupsi di mata pelajaran.**

Dari KSP...

Sewaktu merancang KSP, kepala sekolah dan para guru sepakat mengintegrasikan materi pendidikan antikorupsi dalam intrakurikuler. Ini adalah hasil pemetaan kami bersama warga sekolah.

...ke kompetensi pendidikan antikorupsi...

Elemen Ketaatan Pada Aturan	Elemen Konsep Kepemilikan
PAUD Mengenal aturan sederhana di sekolah/madrasah dan tempat tinggal. Membiasakan diri menjalankan aturan sederhana secara sadar dan konsisten.	PAUD Mengenali benda milik pribadi dan orang lain. Menunjukkan sikap menghormati hak kepemilikan serta bertanggung jawab atas penggunaan barang.
SD/MI Menjalankan aturan dengan kesadaran/ motivasi internal di lingkungan sekolah/ madrasah dan tempat tinggal.	SD/MI Menghormati hak kepemilikan dan dapat bertanggung jawab atas penggunaan barang milik pribadi, orang lain, dan sekolah/ madrasah.
SMP/MTs Mengidentifikasi dampak positif dari ketaatan aturan dan dampak negatif dari pelanggaran aturan di lingkungan sekolah/madrasah, tempat tinggal, tempat umum/publik	SMP/MTs Menjelaskan konsep hak dan tanggung jawab atas penggunaan barang milik pribadi, orang lain, publik dan negara

Elemen Ketaatan Pada Aturan	Elemen Konsep Kepemilikan
<p>SMA/MA/SMK/MAK Menganalisis dampak positif dari ketaatan aturan dan dampak negatif dari pelanggaran aturan di lingkungan sekolah/madrasah, tempat tinggal, tempat umum/publik dan negara</p>	<p>SMA/MA/SMK/MAK Menganalisis konsep hak dan tanggung jawab atas penggunaan barang milik pribadi, orang lain, publik, dan negara dengan pendekatan multidisiplin</p>
Elemen Menjaga Amanah	Elemen Pengelolaan Dilema Etis
<p>PAUD Mengenal arti amanah sederhana di lingkungan sekolah/madrasah dan tempat tinggal. Belajar menjaga amanah, termasuk dalam situasi sederhana yang melibatkan pilihan berbeda.</p>	<p>PAUD Mulai mampu membedakan tindakan baik dan buruk di lingkungan sekitar. Menentukan tindakan yang baik di lingkungan sekolah/madrasah dan tempat tinggal.</p>
<p>SD/MI Menjaga amanah di lingkungan sekolah/madrasah dan tempat tinggal termasuk dalam situasi konflik kepentingan.</p>	<p>SD/MI Menentukan tindakan yang terbaik dalam situasi dilema etis berdasarkan nilai integritas/ norma yang berlaku di lingkungan sekolah/ madrasah dan tempat tinggal.</p>
<p>SMP/MTs Mengidentifikasi dampak menjaga amanah dan penyalahgunaannya di lingkungan sekolah/madrasah, tempat tinggal dan publik termasuk dalam situasi konflik kepentingan</p>	<p>SMP/MTs Mengidentifikasi situasi dilema etis di lingkungan sekolah/madrasah, tempat tinggal dan publik</p>
<p>SMA/MA/SMK/MAK Menganalisis dampak menjaga amanah dan penyalahgunaannya di lingkungan sekolah/madrasah, tempat tinggal, publik dan negara, termasuk dalam situasi konflik kepentingan melalui pendekatan multidisiplin</p>	<p>SMA/MA/SMK/MAK Menganalisis situasi dilema etis di lingkungan sekolah/madrasah, tempat tinggal, publik dan negara</p>

Elemen Membangun Budaya Antikorupsi

PAUD

Mengenal nilai-nilai integritas di sekolah/madrasah dan tempat tinggal. Anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan sederhana yang mendukung nilai-nilai.

SD/MI

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan di lingkungan sekolah/madrasah dan tempat tinggal yang mendukung nilai-nilai integritas.

SMP/MTs

Menjelaskan bentuk, faktor penyebab serta dampak dari perilaku koruptif di lingkungan sekolah/madrasah, tempat tinggal, dan publik serta tindak pidana korupsi dalam lingkup negara.

SMA/MA/SMK/MAK

Berpartisipasi aktif dan mengajak orang lain dalam kegiatan yang bertujuan mencegah perilaku koruptif dan memperkuat nilai-nilai integritas di lingkungan sekolah/madrasah, tempat tinggal dan publik

..mata pelajaran dan CP..



Informasi Penting!

- Pengintegrasian mapel disesuaikan dengan situasi yang dihadapi masing-masing sekolah
- Di bawah ini hanya sebagai contoh, guru bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.

Pendidikan Pancasila

"Menganalisis dinamika pemberlakuan UUD 1945"

Bahasa Indonesia

"Menulis gagasan, pandangan, imajinasi, dan/atau pengetahuan"

Fisika, Kimia, Biologi

"Menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, mengomunikasikan hasil"

...menjadi tujuan pembelajaran...



Informasi Penting!

- Pengintegrasian mapel disesuaikan dengan situasi yang dihadapi masing-masing sekolah
- Di bawah ini hanya sebagai contoh, guru bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah

- Mampu menganalisis dampak positif ketaatan aturan dan dampak negatif pelanggaran aturan di berbagai lingkungan.
- Mampu memberi solusi terhadap kasus pelanggaran aturan berlandaskan nilai integritas.
- Menulis gagasan, pandangan, dan pengetahuan dalam berbagai jenis teks secara kritis, kreatif, dan orisinal, dengan menjunjung tinggi kejujuran dan keaslian karya.
- Memublikasikan karya tulis secara bertanggung jawab di media cetak, elektronik, atau digital, dengan menyertakan sumber rujukan yang benar sebagai bagian dari sikap menjaga amanah.
- Mampu mengamati fenomena ilmiah dan merencanakan percobaan dengan mempertimbangkan implikasi etis, melakukan penyelidikan secara bertanggung jawab, mengolah dan menganalisis data dengan jujur.

Infografis (..) Mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam intrakurikuler

Contoh Pendidikan Antikorupsi di Intrakurikuler dari tiap elemen

Ketaatan pada Aturan	
Ide bentuk integrasi (tidak wajib sama, silakan berkreasi sesuai kebutuhan satuan pendidikan)	Jenjang
<p>Pendidikan Pancasila Murid melakukan diskusi tentang dampak positif ketaatan dan negatifnya serta menganalisis kasus pelanggaran tata tertib sekolah.</p> <p>Sosiologi Projek “Ketaatan pada Aturan untuk Harmoni Sosial” mengajak murid mengamati fenomena nyata, seperti tertib lalu lintas, kebersihan lingkungan, disiplin waktu di sekolah, hingga budaya antri di kantin atau perpustakaan. Dari pengamatan tersebut, murid mendokumentasikan dan menganalisis dampak positif ketaatan aturan serta akibat negatif pelanggarannya. Hasil kajian kemudian diwujudkan dalam laporan, poster, atau kampanye sederhana di sekolah.</p>	SMA/MA/ SMK/MAK
<p>Bahasa Indonesia Murid melakukan diskusi kelas tentang tata tertib sekolah, lalu mempresentasikan dampak positif menaati aturan di sekolah dan dampak negatif jika melanggar.</p>	SMP/MTs
<p>Pendidikan Pancasila Murid mengidentifikasi aturan yang berlaku di lingkungan keluarga, seperti bangun pagi, merapikan tempat tidur, beribadah, sarapan sebelum berangkat sekolah, berpamitan kepada orang tua, main HP sesuai aturan di rumah, belajar, tidur lebih awal, dll. Kemudian murid menuliskan aturan apa saja yang sudah dilaksanakan setiap hari pada “Buku Kebaikan”. Kegiatan ini mengajarkan murid untuk mentaati aturan, melatih disiplin dan tanggung jawab serta melibatkan peran serta orang tua dalam penanaman karakter.</p>	SD/MI
<p>Jati Diri (Sosial-Emosional dan Fisik-Motorik) Guru bersama murid menyusun Disiplin Positif dalam bentuk kesepakatan kelas. Aturan sederhana yang disepakati bersama, antara lain: meletakkan tas dan alas kaki pada tempatnya, membuang sampah di tempat sampah dan saling menghargai antar teman. Video tentang Disiplin Positif bisa diakses melalui tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=bgIEGKdgFnA&t=177s (menit ke 6.00 - 6.26)</p>	PAUD

Konsep Kepemilikan

Ide bentuk integrasi (tidak wajib sama, silakan berkreasi sesuai kebutuhan satuan pendidikan)	Jenjang
<p>Ekonomi</p> <p>Role Play (Bermain Peran) “Siapa Pemiliknya?”, murid dibagi kelompok dan diberi kartu berisi objek, seperti pulpen, jalan raya, atau tambang emas. Mereka menentukan apakah itu milik pribadi, publik, atau negara, lalu menjelaskan hak dan tanggung jawabnya. Hasil diskusi dipresentasikan secara kreatif melalui simulasi singkat, sementara guru menegaskan bahwa setiap kepemilikan memiliki aturan yang harus dihormati sebagai wujud integritas dan sikap antikorupsi.</p>	SMA/MA/ SMK/MAK
<p>Bahasa Indonesia</p> <p>Murid membuat drama dengan tema “Milik Pribadi atau Milik Bersama?” Kemudian murid diajak berdiskusi dan refleksi terkait drama yang sudah ditampilkan.</p>	SMP/MTs
<p>Seni Budaya</p> <p>Membuat proyek karya seni 3 dimensi. Murid mengidentifikasi dan menguji coba alat atau bahan yang akan digunakan untuk membuat karya, kemudian menggunakan barang sesuai dengan fungsi dan prosedurnya serta merapikan kembali setelah selesai digunakan. Melalui kegiatan ini murid berusaha untuk menjaga dan meminta izin ketika ingin menggunakan barang milik orang lain.</p>	SD/MI
<p>Nilai Agama dan Budi Pekerti</p> <p>Melakukan permainan “Detektif Kejujuran”, di mana murid mencari barang miliknya sendiri dan mengembalikan barang milik teman.</p> <p>Video permainan “Detektif Kejujuran” bisa diakses di laman berikut: https://www.instagram.com/p/DDZZ2zAy2KG/</p>	PAUD

Menjaga Amanah

Ide bentuk integrasi (tidak wajib sama, silakan berkreasi sesuai kebutuhan satuan pendidikan)	Jenjang
<p>Bahasa Indonesia</p> <p>Menulis narasi atau karya sastra tentang amanah dimulai dengan guru memberi pengantar dan contoh singkat, lalu murid menulis karya orisinal berupa pengalaman nyata atau puisi/cerpen bertema amanah, menukarnya dengan teman untuk mendapat masukan, dan beberapa membacakan di depan kelas. Salah satu contoh karya antologi cerpen murid tentang nilai integritas dan antikorupsi: https://bit.ly/cerpenintegritas</p>	SMA/MA/ SMK/MAK
<p>Ilmu Pengetahuan Sosial</p> <p>Projek Mini: menjaga fasilitas publik sekolah, seperti taman, lapangan, atau perpustakaan secara bergilir sebagai bentuk amanah bersama. Projek ini bertujuan melatih murid SMP untuk menjaga amanah dengan cara memelihara fasilitas publik di sekolah, melalui sistem penjadwalan bergilir. Setiap kelompok murid akan mendapat tanggung jawab tertentu dan melaporkan hasilnya secara berkala</p> <p>Seni Budaya</p> <p>Membuat Poster Amanah secara mandiri, membuat karya seni tentang pentingnya menjaga kepercayaan dan menolak korupsi.</p>	SMP/MTs
<p>Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial</p> <p>Secara berkelompok murid membuat projek dengan tema "Berbagi Itu Indah". Kegiatan berbagi dilakukan melalui pengumpulan sembako sesuai dengan pembagian yang telah disepakati. Misalnya, ada yang membawa minyak goreng, gula, beras dan lain sebagainya. Sembako yang telah terkumpul dikemas dan dibagikan oleh murid kepada para lansia di sekitar sekolah secara merata. Hal ini mengajarkan untuk menjalankan amanah dan menumbuhkan rasa empati murid terhadap kondisi sosial lingkungan sekitar.</p>	SD/MI
<p>Nilai Agama dan Budi Pekerti serta Jati Diri (Sosial-Emosional)</p> <p>Murid bertanggung jawab atas barang/amanah sederhana melalui kegiatan meminjam mainan atau buku lalu mengembalikan sesuai kesepakatan.</p>	PAUD

Pengelolaan Dilema Etis

Ide bentuk integrasi (tidak wajib sama, silakan berkreasi sesuai kebutuhan satuan pendidikan)	Jenjang
<p>Fisika, Kimia, dan Biologi</p> <p>Kerja kelompok untuk menyiapkan laporan atau presentasi hasil percobaan secara sistematis. Setiap kelompok diminta menyoro ti dilema etis yang muncul, serta menjelaskan bagaimana mereka mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Presentasi hasil laporan dilakukan dengan sesi tanya jawab dan diskusi reflektif sehingga murid dapat belajar menyampaikan temuan secara jujur, transparan, dan mempertimbangkan aspek etis dalam praktik ilmiah ataupun dengan simulasi bermain peran.</p> <p>Contoh modul ajar: https://bit.ly/contohmodulajarintegritas</p>	SMA/MA/ SMK/MAK
<p>Pendidikan Pancasila</p> <p>Murid melaksanakan Role Play dan diskusi tentang Dilema Ujian: ketika teman dekat minta bantuan saat ujian. Kemudian murid diajak berdiskusi terkait kegiatan role play yang sudah dilakukan.</p>	SMP/MTs
<p>Bahasa Indonesia</p> <p>Murid berdiskusi dan menganalisis “Kartu Cerita” tentang dilema etis seperti Keadilan atau Persahabatan, Tugas atau Teman dan lain sebagainya. Kemudian menulis dan menyampaikan hasil diskusi kepada guru dan teman.</p>	SD/MI
<p>Jati Diri (Sosial-Emosional) dan Dasar-dasar Literasi</p> <p>Murid memilih tindakan benar dalam situasi baik VS buruk melalui kegiatan <i>Role play</i> menemukan uang teman yang jatuh.</p> <p>Contoh kegiatan bisa diakses melalui tautan berikut: https://www.instagram.com/p/DOFYh2xEnOM/</p>	PAUD

Membangun Budaya Antikorupsi

Ide bentuk integrasi (tidak wajib sama, silakan berkreasi sesuai kebutuhan satuan pendidikan)	Jenjang
<p>Pendidikan Pancasila</p> <p>Simulasi sidang parlemen sekolah, murid dibagi ke dalam peran sebagai anggota legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil untuk membahas rancangan aturan mengenai transparansi penggunaan dana sekolah. Kegiatan ini menekankan pentingnya integritas dalam pengambilan keputusan serta tanggung jawab terhadap kepentingan bersama, sehingga murid dapat merasakan secara langsung bagaimana nilai antikorupsi diterapkan dalam praktik kehidupan bernegara.</p> <p>Sejarah</p> <p>“Belajar dari Kasus, Bergerak Melawan Korupsi”. Murid diajak menganalisis kasus korupsi nyata di Indonesia untuk memahami bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya bagi masyarakat serta bangsa. Setelah itu, mereka menuangkan hasil refleksi ke dalam proyek kampanye antikorupsi di sekolah melalui poster, video pendek, drama, atau konten media sosial bertema integritas, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab.</p> <p>Bahasa Inggris</p> <p><i>Workshop</i> Solusi: “Cegah Korupsi, Mulai dari Kita”, murid diajak melakukan analisis kasus perilaku koruptif di sekitar mereka. Setiap kelompok diminta untuk merumuskan solusi praktis yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun rumah, seperti membuat aturan kelas yang transparan, sistem piket yang adil, atau program berbagi jujur di keluarga. Gagasan mereka kemudian dituangkan dalam bentuk kreatif, baik melalui poster ide yang berwarna dan menarik maupun menggunakan papan tulis digital seperti Padlet, Miro atau lainnya.</p>	SMA/MA/ SMK/MAK
<p>Bahasa Indonesia</p> <p>Murid membaca artikel tentang tokoh jujur/antikorupsi, kemudian murid menganalisisnya dan membuat ringkasan hasil analisis dalam sebuah bentuk cerita dengan bahasa sendiri bagaimana membangun budaya jujur di sekolah.</p>	SMP/MTs

<p>Bahasa Indonesia</p> <p>Murid menceritakan kembali isi video tentang “KUMBINESIA Jujur itu Keren” yang telah ditonton dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.</p> <p>Video bisa diakses pada tautan berikut: https://www.instagram.com/reel/DN71TmqFEYk/?igsh=MTg2dDlzMjRhZWY0cg== https://www.youtube.com/watch?v=1iRdgHZkuQ0</p>	<p>SD/MI</p>
<p>Nilai Budi Pekerti, Jati Diri, dan Dasar-dasar Literasi</p> <p>Murid mendengarkan cerita tentang tokoh teladan dunia atau kisah pahlawan lokal yang menunjukkan karakter jujur dan dapat dipercaya. Setelahnya, guru memberikan diskusi refleksi (menggunakan gambar, <i>puppet</i>, atau <i>flashcard</i>) tentang pilihan tindakan tokoh dan dampaknya bagi lingkungan. Anak belajar mengidentifikasi dan meniru nilai Kejujuran dan Tanggung Jawab sebagai norma etika yang berlaku di masyarakat.</p> <p>Contoh salah satu kegiatan bisa diakses melalui tautan berikut. https://www.instagram.com/p/DAAy9pJo3RX/</p>	<p>PAUD</p>

Cerita Inspiratif dari Intrakurikuler

“BERMAIN DETEKTIF KEJUJURAN”

Menumbuhkan Integritas Sejak Usia Dini melalui Kegiatan Intrakurikuler di RA Raudhatul Amin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Salah satu implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang dilakukan di RA Raudhatul Amin adalah permainan “Detektif Kejujuran”. Melalui aktivitas bermain yang dekat dengan dunia anak, guru menanamkan nilai karakter integritas sejak usia dini. RA Raudhatul Amin memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk alat permainan edukatif. Untuk memastikan permainan “Detektif Kejujuran” tetap bisa berlangsung dengan baik, guru memanfaatkan barang pribadi milik murid. Pendekatan ini membuat murid memahami secara konkret mana barang yang menjadi hak miliknya dan mana yang bukan.

RA Raudhatul Amin juga memiliki beberapa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), seperti ADHD dan *Speech Delay* yang kebutuhan belajarnya beragam. Karena itu, dalam merancang kegiatan untuk implementasi Pendidikan Antikorupsi, guru merancang kegiatan dengan pendampingan yang lebih personal agar seluruh murid, termasuk ABK dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman dan menyenangkan.

Dalam permainan “Detektif Kejujuran”, guru menanamkan nilai kejujuran dan amanah melalui peraturan sederhana. *“Carilah barang milikmu sendiri dan tidak boleh mengambil barang milik teman. Apabila ingin mencari barang di dalam tas teman, maka harus meminta izin terlebih dahulu. Jika menemukan barang milik teman, maka serahkan kembali kepada teman”*. Peraturan ini disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami murid.



Murid sedang mencari barang pribadi di tas miliknya.

Sumber foto: Ilustrasi dibuat dengan AI menyesuaikan kejadian nyata di ruang kelas RA Raudhatul Amin, 2024



Murid sedang meminta izin untuk mencari barang pribadinya di dalam tas milik teman.

Sumber foto: Ilustrasi dibuat dengan AI menyesuaikan kejadian nyata di ruang kelas RA Raudhatul Amin, 2024

Beberapa elemen Pendidikan Antikorupsi (PAK) terintegrasi secara praktis dalam permainan “Detektif Kejujuran” ini. Murid belajar konsep kepemilikan untuk membedakan hak milik, menjaga amanah dengan mengembalikan barang yang bukan miliknya, dan menunjukkan ketaatan pada aturan saat mematuhi peraturan permainan. Dampak positifnya bisa terlihat dalam kebiasaan sehari-hari, seperti saat menemukan barang yang bukan miliknya, murid bertanya kepada temannya, “Milik siapakah ini?”. Kemudian ada juga murid menyerahkan uang yang ditemukannya di halaman sekolah. Hal tersebut menunjukkan tumbuhnya pemahaman tentang konsep kepemilikan, menjaga amanah dan taat pada aturan.



Murid menunjukkan barang pribadi miliknya yang sudah ditemukan.

Sumber foto: Ilustrasi dibuat dengan AI menyesuaikan kejadian nyata di ruang kelas RA Raudhatul Amin, 2024.



Murid menyerahkan barang pribadi milik teman yang telah ditemukannya.

Sumber foto: Ilustrasi dibuat dengan AI menyesuaikan kejadian nyata di ruang kelas RA Raudhatul Amin, 2024.

Permainan sederhana seperti ini membuktikan bahwa setiap sekolah mampu menumbuhkan benih-benih integritas. Nilai kejujuran tidak hanya lahir dari nasihat. Kebiasaan baik sering kali tumbuh ketika murid terbiasa mengalaminya secara langsung. Karena itu, guru di RA Raudhatul Amin berkomitmen untuk terus berusaha menumbuhkan kejujuran melalui berbagai kegiatan sederhana yang menyenangkan, mudah dijumpai dan selalu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari



Scan Me!



Video kegiatan bisa diakses melalui tautan Instagram RA Raudhatul Amin berikut:

<https://www.instagram.com/p/DDZZ2zAy2KG/>

“BUKU KEBAIKAN”

Menumbuhkan Ketaatan pada Aturan melalui Buku Kebaikan di
Mi Al-Huda Ploso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur



Murid sedang menuliskan aturan di rumah yang telah dilakukan pada
“Buku Kebaikan” dengan didampingi orang tua.



Sumber foto: Dokumentasi Film Dokumenter MI Al-Huda Ploso oleh KPK RI, 2025..

Sekolah/Madrasah memiliki peran penting dalam menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan patuh terhadap aturan sejak dini. Salah satu usaha yang dilakukan MI Al-Huda Ploso adalah melalui kegiatan intrakurikuler pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, khususnya terkait pada elemen ketaatan aturan. Kegiatan ini sederhana, tetapi sangat bermakna.

Setiap murid diminta untuk mengidentifikasi aturan yang berlaku di lingkungan keluarga mereka. Aturan-aturan itu, antara lain bangun pagi tepat waktu dan merapikan tempat tidur, melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama, sarapan sebelum berangkat sekolah, berpamitan kepada orang tua, menggunakan HP sesuai aturan di rumah, meluangkan waktu untuk belajar serta tidur lebih awal agar tubuh tetap sehat. Aturan-aturan tersebut sesungguhnya merupakan pondasi penting dalam membentuk pribadi disiplin.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, murid diberi sebuah media sederhana, yang kami sebut sebagai "Buku Kebaikan". Orang tua melakukan pendampingan dan memberikan apresiasi kepada murid dalam melaksanakan dan menuliskan aturan-aturan yang telah mereka lakukan pada "Buku Kebaikan".

LAPORAN AKTIVITAS KEBAIKAN
PESERTA DIDIK MI AL-HUDA PLOSO

Mengeja	Hari/Tgl	Aktivitas Kebajikan yang saya lakukan				Apresiasi	
						Orang Tua	Guru
	Rabu, 01 Januari 2025	1. Bangun pukul 05.00	2. merapikan tempat tidur	3.	4.	5.	Terima kasih ya Pak 
	Kamis, 02 Januari 2025	1. Bangun pukul 07.30	2. sarapan tidak disuapi	3.	4.	5.	
	Jum'at, 03 Januari 2025	1. membantu ibu menyapu	2. merapikan mainan	3.	4.	5.	
	Sabtu, 04 Januari 2025	1. Bangun pukul 04.30	2. Berpamitan pada orangtua	3. menyapu ruang tamu	4.	5.	
	Minggu, 05 Januari 2025	1. merapikan tempat tidur	2. belajar dengan rajin	3. membantu menjemur baju	4.	5.	
	Senin, 06 Januari 2025	1. Bangun pukul 07.30	2. sarapan tidak disuapi	3. mencuci piring sendiri	4. belajar dengan rajin	5.	
	Selasa, 07 Januari 2025	1. merapikan tempat tidur	2. Berpamitan pada orangtua	3. membantu menyiram bunga	4. menyapu halaman	5.	
	Rabu, 08 Januari 2025	1. merapikan tempat tidur	2. sarapan tidak disuapi	3. belajar dengan rajin	4. menyapu ruang tamu	5. merapikan rak buku	
	Kamis, 09 Januari 2025	1. Bangun pukul 09.30	2. sarapan tidak disuapi	3. belajar dengan rajin	4. mencuci piring	5. menyiram bunga	Semangat ya... 
	Jum'at, 10 Januari 2025	1. merapikan tempat tidur	2. sarapan tidak disuapi	3. Berpamitan pada orangtua	4. menyapu kamar	5. merapikan rak buku	
	Sabtu, 11 Januari 2025	1. Bangun pukul 05.00	2. sarapan tidak disuapi	3. sarapan tidak disuapi	4. belajar dengan rajin	5. menyiram bunga	
	Minggu, 12 Januari 2025	1. Bangun pukul 04.30	2. merapikan tempat tidur	3. sarapan tidak disuapi	4. belajar dengan rajin	5. merapikan mainan	

Hasil tulisan murid pada "Buku Kebaikan".

Sumber foto: Dokumen Milik MI Al-Huda Ploso, 2025.

Pada awalnya murid hanya menuliskan satu atau dua aturan, misalnya "Hari ini saya bangun pukul 05.00 dan merapikan tempat tidur." Setelah satu minggu, guru melakukan "checking" dan memberikan apresiasi pada buku kebaikan berupa kalimat positif, stiker bintang, dan apresiasi lainnya. Dengan cara ini murid menjadi termotivasi untuk melaksanakan lebih banyak aturan yang sudah disepakati di rumah. Hal itu terlihat dari hasil checking berikutnya yang menunjukkan murid melaksanakan aturan lebih banyak dari sebelumnya.

Dengan kegiatan ini, murid terbiasa merefleksikan kebiasaan baik yang mereka laksanakan setiap harinya. Hal ini merupakan sebuah aktivitas yang menunjukkan ketaatan murid terhadap aturan yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya ketaatan terhadap aturan menjadi sebuah kebiasaan yang mereka lakukan tanpa ada perintah, paksaan ataupun pamrih dari siapapun. Aktivitas ini sekaligus juga menumbuhkan profil lulusan murid, terutama dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi.

“MERAWAT KEBUN KELAS”

Menyemai Nilai Antikorupsi melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di SMPN Ekologi Kahuripan Padjajaran, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat



Murid sedang merawat kebun kelas

Sumber foto : Dokumentasi SMPN Ekologi Kahuripan Padjajaran, 2025

SMPN Ekologi Kahuripan Padjajaran menjadikan kebun sekolah bukan hanya sebagai ruang hijau, tetapi juga sebagai laboratorium Pembelajaran. Setiap kelas memiliki kebun sendiri yang harus dirawat oleh setiap murid di kelas tersebut. Di kebun ini murid belajar bahwa merawat tanaman bukan sekadar aktivitas bercocok tanam, melainkan praktik nyata dalam menunaikan amanah, menghormati kepemilikan serta memahami hak dan kewajiban. Dengan cara ini, pelajaran tentang lingkungan hidup dipadukan dengan pendidikan karakter berbasis antikorupsi dan Pendidikan Pancasila.

Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, aktivitas berkebun ini dimasukan sebagai salah satu kegiatan pembelajaran bagi murid. Adapun capaian pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan hak dan menerapkan kewajiban sebagai warga negara. Kegiatan merawat kebun menjadi aktivitas murid dalam menerapkan kewajiban sebagai warga negara. Setiap murid akan diberikan kebun yang harus dirawat dan dijaga. Selain diajarkan tentang hak dan kewajiban pada aktivitas merawat kebun kelas, murid juga diperkenalkan pada konsep kepemilikan dan menjaga amanah.

Mereka belajar membedakan kepemilikan pribadi, kepemilikan orang lain, dan kepemilikan publik. Nilai menjaga amanah juga ditunjukkan pada aktivitas murid dalam merawat kebun sebagai bentuk amanah yang sudah dititipkan.

Selama aktivitas pembelajaran berlangsung, guru melakukan asesmen formatif dengan cara mengamati langsung perilaku murid melalui lembar observasi sederhana serta meminta murid menulis refleksi singkat tentang tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Guru juga menggunakan penilaian teman sebaya untuk melihat bagaimana murid bekerja sama dan saling menghargai. Hasil asesmen ini digunakan guru untuk memberikan umpan balik cepat agar murid dapat memperbaiki cara merawat kebun dan semakin memahami nilai-nilai tentang menjaga amanah dan menghargai kepemilikan orang lain.

Melalui kegiatan berkebun dapat menjadi media konkret untuk diintegrasikan pada pembelajaran Pendidikan Pancasila, yang membantu membentuk murid mengembangkan kompetensi menjaga amanah dan memahami konsep kepemilikan sehingga muncul generasi yang berintegritas dan peduli lingkungan. Dalam hal ini sekaligus juga membentuk profil lulusan murid, terutama dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian, dan kolaborasi.

“JUMAT BERSEPEDA KK”

Mengayuh Harapan, Menumbuhkan Integritas”
Implementasi 9 Nilai Integritas pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris
di SMA Bina Insan Mandiri, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

“JUMAT BERSEPEDA KK” dirancang bukan sekadar untuk belajar Bahasa Inggris, tetapi untuk menumbuhkan kembali budaya positif di sekolah. Buku-buku dan gadget untuk sementara ditinggalkan, diganti dengan senyum, diskusi hangat, dan semangat mengayuh nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian.



Murid membuat poster ajakan berintegritas dalam bahasa Inggris

Sumber foto: Dokumentasi SMA Bina Insan Mandiri, 2025

Program ini lahir dari keresahan guru yang melihat semakin lunturnya nilai-nilai karakter pada murid, mulai dari kebiasaan bolos, datang terlambat, hingga perilaku menyontek. Alih-alih guru memberikan hukuman, sekolah memilih cara baru, yaitu memberi ruang bagi murid untuk belajar dan mengalami nilai-nilai integritas secara langsung yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran.

Melalui pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran Bahasa Inggris, murid diajak berdialog tentang kasus-kasus korupsi, menganalisis dampaknya, kemudian membuat produk kreatif, seperti poster, artikel, drama pendek, hingga konten media sosial yang menyerukan pentingnya budaya antikorupsi. Setiap kelompok bebas memilih cara yang sesuai dengan minat dan gaya belajarnya.

Hasilnya terasa nyata. Murid yang sebelumnya pendiam, kini berani berbicara di depan umum. Mereka yang dulu kerap menyontek, kini justru membuat poster bertuliskan *"Integrity is Important, Let's Show Your Integrity"* dan menempelkannya di dinding kelas. Guru pun melihat suasana kelas menjadi lebih hidup dan produktif. "Kami ingin murid belajar bukan karena takut hukuman, tetapi karena sadar bahwa mereka adalah agen perubahan," ujar guru pengampu dengan bangga.

4.3 Implementasi PAK pada Kokurikuler

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah disebutkan bahwa struktur kurikulum yang diberlakukan secara nasional tidak hanya mengatur kegiatan intrakurikuler, tetapi juga kokurikuler. Sebagaimana dijelaskan pada Panduan Kokurikuler (2025) bahwa kegiatan kokurikuler diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu:

- kegiatan kokurikuler melalui pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu;
- kegiatan Kokurikuler melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH); dan
- kegiatan kokurikuler melalui cara lainnya, berupa kegiatan kokurikuler ciri khas satuan pendidikan berbasis konteks lokal dan kegiatan-kegiatan berbasis nilai-nilai satuan pendidikan, dan kegiatan satu disiplin ilmu yang dalam aktivitasnya terjadi kolaborasi beragam keilmuan dan keahlian.

Kegiatan kokurikuler dapat dipilih dan dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik murid dan konteks satuan pendidikan. Kokurikuler memiliki peran strategis untuk menjembatani antara pembelajaran konseptual di kelas dan penerapannya dalam kehidupan nyata sehingga murid dapat mengembangkan kompetensi secara lebih utuh dan kontekstual. Kompetensi dalam hal ini adalah delapan dimensi profil lulusan, yaitu: a) keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b) kewargaan; c) penalaran kritis; d) kreativitas; e) kolaborasi; f) kemandirian; g) kesehatan; dan h) komunikasi.

Implementasi dari pendidikan antikorupsi pada kegiatan kokurikuler dapat ditunjukkan melalui kegiatan kokurikuler melalui cara lainnya, sesuai dengan karakteristik dari satuan pendidikan. Berdasarkan ketentuan pada Panduan Kokurikuler (2025), guru dalam merencanakan kokurikuler, diperlukan beberapa tahapan kerja sebagai berikut.

- Penentuan Tim Kerja Kokurikuler
- Analisis Satuan Pendidikan
- Membuat Perencanaan Berdasarkan Hasil Analisis.

Beberapa contoh praktik baik pendidikan antikorupsi dari jenjang PAUD hingga SMA dapat dilihat pada tautan berikut.



Scan Me!



PAUD (TK/RA):

<https://www.youtube.com/watch?v=Tqi1x0xEpFc>



Scan Me!



SD/MI:

<https://www.youtube.com/watch?v=d9vMNOx-sjk>



Scan Me!



SMP/MTs:

<https://www.youtube.com/watch?v=zXoMQEvZBSA>



Scan Me!



SMA/MA/SMK/MAK:

<https://www.youtube.com/watch?v=TXkrcbdTAyY>

Cerita Inspiratif dari Kokurikuler

“DONGENG KEJUJURAN: SI KUMBI SUATU HARI DI MUSEUM SENI”

Menumbuhkan Nilai Kejujuran pada Hari Anak Nasional di RA Raudhatul Amin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Ada hal yang istimewa dalam Peringatan Hari Anak Nasional 2024 di RA Raudhatul Amin. Bukan sekadar perayaan, momentum kali ini menjadi kesempatan yang berharga untuk menanamkan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi (PAK) sejak usia dini. Pada kegiatan tersebut, murid duduk setengah lingkaran dan dengan antusias mendengarkan guru yang membacakan dongeng berjudul “Si Kumbi Suatu Hari di Museum Seni”. Kisah Si Kumbi mengajarkan pentingnya bersikap jujur dan meminta izin sebelum meminjam atau mengambil sesuatu. Melalui cerita sederhana ini, murid belajar tentang kejujuran bukan hanya soal berkata benar, tetapi juga menghargai hak milik orang lain.

Setelah mendengarkan dongeng, murid diajak untuk mempraktikkan pesan yang mereka tangkap. Guru memberikan contoh nyata, seperti meminta izin saat ingin meminjam mainan milik teman, menggunakan barang milik pendidik, dan meminta uang dari orang tua sebelum digunakan. Guru juga menyampaikan pesan sederhana “*Jujur itu lebih baik. Anak yang jujur adalah anak yang hebat. Dengan jujur, hati menjadi tenang dan hidup lebih bahagia.*” Pesan tersebut diharapkan membekas dalam benak murid sebagai pengakuan bahwa sikap jujur adalah sesuatu yang mulia, membanggakan, dan membawa kebahagiaan.



Guru membacakan dongeng
“Si Kumbi Suatu Hari di Museum Seni”

Sumber foto: Dokumentasi Hari Anak Nasional 2024
di RA Raudhatul Amin



Murid aktif bertanya dan memberikan respon saat
guru membacakan dongeng

“Si Kumbi Suatu Hari di Museum Seni”
Sumber foto: Dokumentasi Hari Anak Nasional 2024
di RA Raudhatul Amin

RA Raudhatul Amin dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi selalu memastikan agar nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi bisa diterima oleh seluruh murid, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), seperti murid dengan ADHD dan *Speech Delay*. Pendekatan harus berpihak kepada pada kebutuhan individu agar setiap murid merasakan pengalaman belajar yang bermakna dan inklusif.

Selama kegiatan ini, guru memberikan peran khusus kepada murid dengan ADHD agar bisa tetap fokus dan merasa terlibat. Murid bisa diberikan peran untuk membantu guru saat mendongeng, bisa berupa menjadi pendamping guru untuk memegang buku dongeng, menunjukkan gambar pada teman-temannya, dan membiarkan dia bertanya secara aktif. Melalui peran ini, energi dan antusiasmenya bisa disalurkan secara positif.

Mendongeng juga menjadi sarana stimulasi bahasa untuk murid dengan *Speech Delay*. Saat kegiatan, guru menempatkan murid dengan *Speech Delay* lebih dekat kepada guru yang berperan sebagai pendongeng agar ia dapat melihat ekspresi wajah dan gerakan mulut pendongeng dengan lebih jelas. Guru juga aktif berinteraksi dengan murid, meskipun murid belum bisa memberikan respon. Kegiatan ini menjadi latihan komunikasi yang sangat penting dalam mendukung perkembangannya.

Melalui kegiatan mendongeng "*Si Kumbi Suatu Hari di Museum Seni*" yang menyenangkan untuk semua murid, elemen-elemen Pendidikan Antikorupsi, seperti konsep kepemilikan, menjaga amanah, dan membangun budaya jujur bisa dihadirkan secara alami dalam keseharian anak. Selain menanamkan nilai-nilai integritas, murid juga belajar untuk menghargai perbedaan dan memahami kondisi teman sebayanya, sehingga tumbuh rasa empati dan saling menghormati. Dalam hal ini, sekaligus murid terbentuk profil lulusannya, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, kemandirian, kolaborasi, dan penalaran kritis.



Scan Me!



Video kegiatan bisa diakses melalui tautan berikut:
<https://www.instagram.com/p/C9wwVJcvbC5/>

“PASAR MINI SEKOLAH”

Menyatukan Ilmu, Karakter, dan Kreativitas Murid
di Mi Al-Huda Ploso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur



Murid sedang melakukan kegiatan kewirausahaan.

Sumber foto : Dokumentasi milik MI Al-Huda Ploso, 2025.

Kegiatan kewirausahaan di MI Al-Huda Ploso Nganjuk dirancang sebagai sarana kolaborasi berbagai mata pelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai integritas pada elemen ketaatan aturan, menjaga amanah, dan budaya antikorupsi. Misalnya, dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila, murid diajak memahami pentingnya musyawarah dan gotong royong dalam setiap kegiatan usaha. Kegiatan musyawarah dan gotong royong dipraktikkan murid ketika membagi tugas kelompok secara adil dan merata sesuai dengan kemampuan. Tugas yang sudah diberikan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, karena hal ini merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan. Meskipun tugas sudah dibagi secara merata, murid tetap bersama-sama dan saling membantu dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas.

Sementara dalam Seni Budaya, secara mandiri murid berkreasi mendesain poster untuk promosi agar menarik dan diminati konsumen. Hal ini harus dilakukan oleh setiap kelompok agar pemasaran dapat tercapai sesuai harapan.

Dari sisi mata pelajaran Matematika murid belajar menghitung modal, harga jual, laba-rugi, dan mengatur pembukuan sederhana serta melakukan transaksi jual beli. Dalam pelaksanaan jual beli harus dilakukan dengan jujur, misalnya memberikan uang kembalian kepada adik kelas sesuai dengan jumlahnya dan tidak memanipulasi.

Dari sisi Bahasa Indonesia, kegiatan ini mengasah keterampilan komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Murid dilatih membuat laporan penjualan. Laporan harus disusun dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prosedur penyusunan laporan. Setelah itu, dengan santun dan berani murid mempresentasikan laporan di depan kelas. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan literasi murid, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi di hadapan orang lain. Secara tidak langsung melalui kegiatan ini setiap individu murid akan terbentuk sikap ketaatan aturan, menjaga amanah dan membudayakan nilai antikorupsi. Selain itu, sekaligus terbentuk profil lulusan murid, terutama pada dimensi kolaborasi, kreativitas, dan penalaran kritis.



Scan Me!



Dokumentasi kegiatan dapat disaksikan melalui tautan berikut: https://youtu.be/EiSloSygnO0?si=dZrXiVy_9m-MMigc

“KESEPAKATAN KELAS”

Menumbuhkan Integritas
di SMPN Satu Atap Kutamanah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

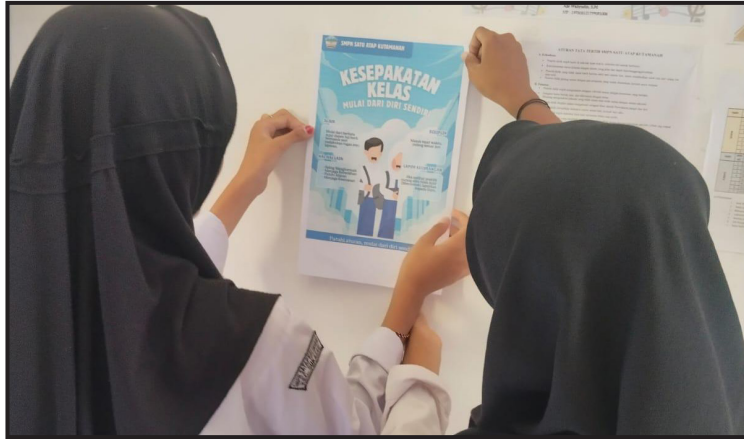


Murid berdiskusi dalam kelompok terkait “Kesepakatan Kelas”

Sumber foto: Dokumentasi SMPN Satu Atap Kutamanah, 202...

SMPN Satu Atap Kutamanah Kabupaten Purwakarta dihadapkan pada tantangan dalam menegakkan kedisiplinan, terutama pada saat proses pembelajaran. Tidak sedikit murid ribut, sering meminta izin keluar saat kegiatan pembelajaran berlangsung, mengganggu teman yang sedang fokus belajar, bahkan terkadang sampai mengganggu konsentrasi kelas lain dan itu membuat proses pembelajaran menjadi kurang kondusif. Melihat fenomena ini, beberapa guru berinisiatif mendiskusikan permasalahan ini dengan para guru lainnya serta mencari solusi agar murid belajar dengan kondusif di dalam kelas dan murid taat pada aturan atas dasar kesadaran sendiri. Salah satu solusi yang dihasilkan dari hasil diskusi adalah membuat kesepakatan kelas. Kegiatan membuat Kesepakatan Kelas dijadikan menjadi salah satu aktivitas kokurikuler dengan model kolaborasi lintas disiplin ilmu di SMPN Satu Atap Kutamanah Purwakarta. Adapun mata pelajaran yang terlibat pada kegiatan kokurikuler ini adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Informatika. Pada kegiatan kokurikuler ini, murid membuat kesepakatan kelas yang berisi aturan, tata cara, dan sikap yang harus dipatuhi oleh semua anggota kelas saat proses pembelajaran, supaya proses pembelajaran berjalan kondusif.

Pada kegiatan kokurikuler model kolaborasi lintas mata pelajaran ini, pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila membimbing murid memahami arti ketaatan terhadap aturan sebagai sikap bertanggung jawab, bukan sekadar kewajiban.



Murid menempelkan hasil kesepakatan kelas yang telah disusun dan disepakati bersama.

Sumber foto: Dokumen SMPN Satu Atap Kutamanah, 2025

Kemudian pada saat pembelajaran Bahasa Indonesia, guru mengajak murid menulis hasil kesepakatan itu dengan bahasa yang sopan dan positif sehingga terbentuklah kesepakatan kelas. Sementara pembelajaran Informatika, murid diajarkan membuat dokumen kesepakatan kelas dalam bentuk poster, booklet, atau infografis. Pada akhirnya murid presentasi singkat (maksimal 5 menit) untuk menyampaikan isi kesepakatan kelas dan alasannya kepada audiens.

Kegiatan kokurikuler ini bukan hanya sekadar proses pembelajaran saja, tetapi juga sebagai upaya untuk menumbuhkan karakter integritas pada diri muridnya. Dari kesepakatan kelas, tumbuhlah kesadaran besar bahwa integritas dimulai dari diri sendiri, khususnya pada kompetensi "ketaatan pada aturan". Profil lulusan Kolaborasi dan komunikasi sekaligus juga terbentuk melalui kegiatan ini.

“TUNAS INTEGRITAS: GERAKAN MURID MENJAGA GENERASI”

di SMA Bina Insan Mandiri, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

Program “Tunas Integritas” adalah kegiatan kokurikuler yang memadukan pembelajaran karakter dengan aksi nyata melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH). Program ini menyasar kelas 10 dan setiap murid diwajibkan mengisi jurnal integritas. Jurnal tersebut bukan sekadar buku catatan, tetapi juga merupakan jurnal yang menjadi “sahabat harian” mereka—tempat mereka menuliskan pengalaman jujur, refleksi ketika tergoda untuk menyontek, atau rasa bangga saat berhasil menepati janji. Setiap lembar yang diisi adalah langkah kecil menuju pribadi yang lebih berintegritas. Program “Tunas Integritas” ini pun tak hanya mengajarkan teori, tetapi para murid juga dibekali materi antikorupsi dasar dan nilai integritas melalui diskusi interaktif, simulasi kasus, hingga cerita inspiratif. Mereka diajak berpikir: bagaimana rasanya jika sekolah tidak transparan? Bagaimana jika pungutan liar terjadi di sekitar mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat mereka merenung, kemudian akhirnya bergerak. Puncaknya adalah momen paling ditunggu: proyek penyuluhan kepada adik-adik di SD dan SMP.



Murid kelas 10 memberikan sosialisasi tentang integritas ke kelompok sasaran (murid SD)

Sumber foto : Dokumentasi SMA Bina Insan Mandiri, 2025



Guru pendamping G7KAIH yang merupakan penyuluh antikorupsi mengajak murid untuk senam Integritas

Sumber foto : Dokumentasi SMA Bina Insan Mandiri, 2025

Suasana menjadi hidup ketika para murid menyiapkan proyek mereka. Ada kelompok yang membuat video kreatif, ada yang melakukannya dengan sebuah permainan (*board game*), bahkan ada yang bercerita dan mendongeng di depan murid SD. Tawa dan tepuk tangan mengisi aula kecil sekolah dasar itu, tetapi yang lebih penting adalah pesan yang tersampaikan, yaitu: “kejujuran itu keren, dan korupsi harus dilawan”. Setelah kegiatan usai, banyak murid Kelas 10 yang mengaku merasa lebih percaya diri, lebih peka terhadap ketidakadilan, dan bertekad untuk selalu jujur, baik di sekolah maupun di rumah. Melalui kegiatan tersebut sekaligus juga terbentuk profil lulusan, terutama penalaran kritis, kreativitas dan kolaborasi.



4.4 Implementasi PAK pada Ekstrakurikuler

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah juga diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025, yang menjadi bagian dari struktur kurikulum. Ekstrakurikuler juga diarahkan untuk pengembangan karakter, yaitu pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional murid.

Jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ditentukan dalam Permendiknas tersebut sebagai berikut:

Krida

misalnya: Kepramukaan atau Kepanduan lainnya, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya;

Karya Ilmiah

misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;

Latihan olah-bakat atau latihan olah-minat

misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya;

Keagamaan

misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al-Quran, retreat, Sekolah Injil Liburan, Pendalaman Alkitab; atau

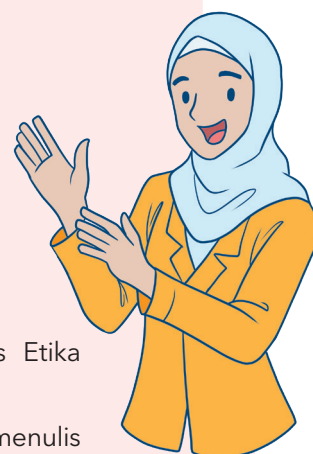
Bentuk kegiatan lainnya.

Implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui ekstrakurikuler dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang ada di satuan pendidikan masing-masing, baik wajib (Pramuka) maupun kegiatan lainnya. Berikut adalah tips untuk mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui ekstrakurikuler.

TIPS: IDE-IDE PENGUATAN KOMPETENSI ANTIKORUPSI MELALUI EKSTRAKURIKULER

Pendidikan antikorupsi dalam ekstrakurikuler dilakukan dengan cara menyisipkan dan melatih kompetensi antikorupsi pada ekstrakurikuler yang sesuai. Beberapa ide yang dapat diterapkan, antara lain sebagai berikut.

- 1 Kepramukaan: Tugas Regu Bergilir dan Simulasi Kepercayaan
- 2 PMR dan UKS: Simulasi Tanggap Darurat dan Studi Kasus Etika Pertolongan serta Privasi Pasien
- 3 KIR dan jurnalistik: melakukan *"Investigasi Mini Integritas"* - menulis laporan riset perilaku jujur dan tidak jujur, keterlambatan murid atau penelitian perilaku dan budaya integritas di sekolah
- 4 Seni budaya dan teater: Drama *"Suara Hati Melawan Korupsi"*
- 5 TIK dan rekayasa: Hackathon *"Aplikasi Antikorupsi"* dan Pameran Karya
- 6 Keagamaan: Kajian Tematik: Amanah dan Antikorupsi
- 7 Olahraga: *"Turnamen Fair Play"* Paskibra- *"Defile Integritas"*
- 8 Musik/Paduan Suara: Konser Mini *"Nada Integritas"*
- 9 Bahasa Asing: Club of Debate on Integrity
- 10 Pecinta Alam: *"Ekspedisi Bersih dan Transparan"*
- 11 Wirausaha/Koperasi: *"Mini Market Integritas"*
- 12 Fotografi/Videografi: *"Photo Story of Integrity"*
- 13 Tata Boga/Busana: *"Kreasi Transparan Budget"*
- 14 Multimedia/Broadcasting: *"Podcast Integritas"* dan *Film Antikorupsi*
- 15 Pecinta Lingkungan: *"Green Integrity Project"*
- 16 Kesenian Daerah: *"Pentas Budaya Antikorupsi"*



Cerita Inspiratif dari Ekstrakurikuler


“SENAM INTEGRITAS”

Membangun Fondasi Karakter Generasi Hebat
di RA Raudhatul Amin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan


Setiap Jumat pagi di RA Raudhatul Amin, halaman sekolah menjadi panggung bagi sebuah gerakan yang lebih besar dari sekadar olahraga. “Senam Anak Indonesia Hebat KPK,” menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang menyisipkan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi (PAK) di setiap hentakan iramanya. Bagi murid, senam ini adalah kegembiraan murni. Bagi para pendidik, ini adalah metode penanaman karakter yang menyenangkan.

Saat musik dimainkan, tangan mungil terangkat serempak. Melalui gerakan yang lincah, murid belajar tentang ketaatan pada aturan dan disiplin di saat mereka harus mengikuti gerakan dan menjaga barisan. Bagian yang paling bermakna dari kegiatan senam ini ada pada lirik yang mereka nyanyikan saat sambil bergerak:

**“Jujur setiap hari, disiplin setiap hari, dan tanggung jawab setiap hari.
Anak Indonesia Hebat ! Ayo jujur, disiplin, tanggung jawab tiap hari!”**



Scan Me!



Sumber: https://youtu.be/oCYE_ZFII0o?si=Xe69tKxHmHG2qHhP

Lirik sederhana ini menjadi afirmasi positif yang menanamkan nilai integritas ke dalam memori bawah sadar murid. Saat murid fokus mengikuti irama dan mengikuti setiap gerakan, murid sedang belajar menjaga amanah yaitu bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang sedang dijalani.

Dalam pelaksanaannya, RA Raudhatul Amin memastikan kegiatan senam ini dapat diikuti oleh seluruh murid, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) seperti murid dengan ADHD dan *Speech Delay*. Pendekatan yang digunakan disesuaikan agar seluruh murid merasakan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Untuk murid dengan ADHD, kegiatan senam menjadi momen positif untuk menyalurkan energi secara terarah. Melalui aktivitas senam,

anak ADHD dapat belajar disiplin dan mengikuti instruksi tanpa merasa terbebani. Bagi murid dengan *Speech Delay*, kegiatan senam juga membantu melatih kemampuan komunikasi nonverbal dan pemahaman instruksi. Lirik yang dinyanyikan anak-anak lain pun menjadi stimulus auditori yang memperkaya pengalamannya meski ia belum mampu mengucapkannya dengan jelas.



Setiap pagi Jum'at murid RA Raudhatul Amin mengikuti "Senam Anak Indonesia Hebat KPK".

Sumber foto: Dokumentasi RA Raudhatul Amin, 2024.



Setiap pagi Jum'at murid RA Raudhatul Amin mengikuti "Senam Anak Indonesia Hebat KPK".

Sumber foto: Dokumentasi RA Raudhatul Amin, 2024.

Melalui kegiatan ini, RA Raudhatul Amin membuktikan bahwa budaya antikorupsi dapat dibangun sejak dini melalui aktivitas yang menyenangkan dan inklusif. Senam ini bukan hanya melatih tubuh yang sehat, tetapi juga membentuk mental yang penuh integritas. Dalam setiap gerakan serempak di Jumat pagi, seluruh murid termasuk ABK belajar bahwa kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab adalah nilai yang bisa dipraktikkan bersama.



“TIMBANGAN KEJUJURAN MELALUI MATH CLUB SABTU SIANG”

di MI Al Huda Ploso, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur



Murid sedang melakukan praktik menimbang berat benda.

Sumber foto : Dokumentasi milik MI Al-Huda Ploso, 2025.

Sabtu siang, suasana ruang Math Club dipenuhi antusiasme. Bu Rahma selaku pembimbing masuk ruang kelas dengan membawa alat pengukur berat digital dan sekantong kue coklat. Murid-murid tampak penasaran. Hari ini mereka akan mempratikkan cara menimbang dengan benar tanpa menambah atau mengurangi ukuran. Anak-anak dibagi menjadi 7 kelompok. Masing-masing kelompok mengambil kartu secara acak yang bertuliskan ukuran berat kue yang akan mereka timbang dan dimakan bersama kelompok. Ada yang mendapat kartu yang bertuliskan 10 gram, 15 gram, 17 gram, 20 gram, 25 gram, 27 gram, dan 30 gram.

Ada hal yang menarik pada proses pembelajaran kali ini, yaitu ketika ada kelompok yang mendapat kartu dengan tulisan ukuran berat yang lebih sedikit dari kelompok lain, ada anggota kelompok yang berinisiatif untuk menimbang tidak sesuai ukuran berat yang diterima. Anak tersebut berbisik “Kalau menimbang kita lebihkan saja tidak usah sesuai ukuran di kartu, biar kita dapat kuenya lebih banyak.”

Bu Rahma mengetahui hal tersebut, beliau mendekati dan menasehati mereka, “Dalam matematika, angka adalah kebenaran yang harus kita hormati. Mengubah angka berarti merusak dasar kejujuran itu sendiri.” Praktik pembelajaran yang kita lakukan saat ini adalah bekal kalian di masa yang akan datang. Kelak jika kalian menjadi pedagang, maka jadilah pedagang yang jujur dan jangan berlaku curang hanya demi keuntungan yang besar. Lakukanlah segala sesuatu sesuai aturan agar apa yang kita dapat membawa kebaikan.

“WIDARMA: SANG PENJAGA KETAATAN PADA ATURAN”

Mewujudkan Integritas melalui Paskibra
di SMPN Ekologi Kahuripan Padjajaran Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Di SMPN Ekologi Kahuripan Pajajaran, ada sebuah ekstrakurikuler yang sangat terkenal dengan kedisiplinannya: Paskibra Widarma. Nama Widarma sendiri berarti wira dharma, pejuang yang setia pada kewajiban dan aturan. Setiap murid yang tergabung di dalamnya tahu, bahwa menjadi anggota Widarma bukan sekadar bisa baris-berbaris atau mengibarkan bendera. Lebih dari itu, Widarma mengajarkan arti ketaatan pada aturan, yang kelak menjadi pondasi hidup mereka.



Paskibra Widarma sedang latihan keompakan baris berbaris.

Sumber foto: Dokumentasi SMPN Ekologi Kahuripan Padjajaran, 2025



Anggota Paskibra Widarma menjadi petugas “SAMBUT PAGI” di Sekolah

Sumber foto: Dokumentasi SMPN Ekologi Kahuripan Padjajaran

Kegiatan ekstrakurikuler Paskibra mengajarkan nilai-nilai antikorupsi, seperti kedisiplinan, tanggung jawab dan kejujuran pada para anggotanya. Ekstrakurikuler Paskibra menjadi rumah bagi murid untuk menumbuhkan nilai integritas dan mengembangkan kompetensi pendidikan antikorupsi, khususnya elemen ketaatan pada aturan. Salah satu praktik atau aktivitas pendidikan antikorupsi yang dilakukan pada ekstrakurikuler Paskibra Widarma adalah pembuatan kesepakatan organisasi. Semua anggota secara bersama-sama membuat kesepakatan organisasi dan dijadikan sebagai sebuah aturan yang harus ditaati bersama. Aturan yang dibuat menjadi pedoman utama dalam setiap latihan. Mulai dari cara berpakaian, aturan berperilaku, ketepatan waktu hadir, posisi barisan, hingga gerakan yang harus dilakukan dengan seragam. Semua anggota diberikan pemahaman bahwa akan ada dampak positif ketika menaati aturan dan dampak negatif ketika melanggar aturan yang disepakati. Selain itu juga, para anggota dididik untuk secara sadar dan konsisten menaati aturan yang sudah dibuat bersama-sama.



Ketaatan pada aturan inilah yang membuat anggota Paskibra Widarma menjadi teladan di sekolah. Anggota Paskibra Widarma berkontribusi nyata memberikan teladan pada murid lain, yaitu menjadi petugas SAMBUT PAGI (Semangat Awal Murid Bangun untuk Taati Aturan dan Praktikkan Amanah, Gapai Integritas). Mereka secara bergantian menjadi petugas SAMBUT PAGI. Setiap pagi, sebelum lonceng tanda masuk berbunyi, anggota Paskibra Widarma sudah berdiri tegak di depan gerbang sekolah bersama guru untuk menyambut para murid. Ini menunjukkan bahwa Paskibra Widarma merupakan pasukan kebanggaan sekolah yang dikenal dengan kedisiplinan dan keteladanan mereka. Selain itu, anggota Paskibra Widarma senantiasa menjaga kerapian seragam, menaati tata tertib, dan menghormati guru, dan itu sudah menjadi bagian dari kebiasaan mereka.

Mereka belajar bahwa disiplin bukan sekadar formalitas, melainkan pondasi untuk membangun integritas. Kegiatan pada ekstrakurikuler Paskibra Widarma mendukung pada penumbuhan dan pengembangan kompetensi pendidikan antikorupsi, yaitu ketaatan pada aturan.

“PELOPOR INTEGRITAS: MENDIDIK JIWA, MENGUATKAN BANGSA”

Pembentukan Karakter melalui Pramuka
di SMA Bina Insan Mandiri, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

Sore itu bukan sekadar latihan baris-berbaris, tetapi ini merupakan bagian dari perjalanan mereka membentuk karakter melalui ekstrakurikuler Pramuka. Di bawah rindangnya pohon dan suara tiupan peluit, nilai-nilai integritas sedang disemai dalam Perkemahan Jum’at Sabtu (Perjusa).

Pramuka di sekolah ini bukan hanya tentang tali-temali dan sandi morse, tetapi mereka membawa misi besar, yaitu Kegiatan Pramuka itu lengkap. Anak-anak belajar disiplin, jujur, bekerja sama, bahkan belajar membuat keputusan di saat sulit. Perjusa dimulai dengan upacara. Di sinilah ketaatan pada aturan dipraktikkan. Setiap aba-aba dijalankan tanpa ragu, setiap bendera yang dikibarkan penuh penghormatan. Setelah itu, mereka masuk sesi kelompok dan mendirikan tenda. Ada yang mengatur logistik, ada yang memimpin regu, ada pula yang bertanggung jawab menjaga peralatan. Dari sinilah lahir konsep kepemilikan para murid diasah dan belajar bahwa perlengkapan tenda, tongkat, bahkan halaman sekolah adalah milik bersama yang harus dijaga, bukan sekadar “punya sekolah.”



Anggota Pramuka SMA Bina Insan Mandiri mengikuti upacara persiapan kegiatan Perjusa.

Sumber foto: Dokumentasi SMA Bina Insan Mandiri 2025



Api unggun selalu ditunggu anggota Pramuka, termasuk murid SMA Bina Insan Mandiri yang mengikuti kegiatan Perjusa.

Sumber foto: Dokumentasi SMA Bina Insan Mandiri, 2024



Di malam hari, suasana berubah. Api unggun menyala, tampak wajah-wajah lelah, tetapi murid bersemangat duduk melingkar. Di sinilah mereka berbicara tentang amanah. Setiap anggota regu diberi tanggung jawab menjaga satu tugas, mulai dari api unggun, persediaan air, hingga jadwal jaga malam. Ketika diberi tugas, ada yang malas dan lalai, maka ada regu yang terlambat makan. Dari kasus itu, mereka belajar amanah, bahwa amanah itu bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang orang lain yang bergantung pada kita. Semua pengalaman ini menjadi fondasi budaya antikorupsi. Bagi para murid, budaya ini bukan lagi sekadar teori yang mereka dengar saat upacara bendera, melainkan sesuatu yang mereka rasakan, alami, dan praktikkan. Mereka belajar bahwa korupsi bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang mengambil yang bukan hak, berbohong, atau mengabaikan tanggung jawab.

Cerita Inspiratif dari Budaya Pembiasaan

“CLEAN AND CLEAR”

Mewujudkan Peradaban Bersih Sekolah
di MI Al-Huda Ploso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur



Murid dari semua kelas dengan didampingi guru setiap hari selama 10 menit membersihkan lingkungan kelas.

Sumber foto : Dokumentasi milik MI Al-Huda Ploso, 2025

Kegiatan “*Clean and Clear*” dipilih bukan tanpa alasan. “*Clean*” berarti bersih dari kotoran fisik sampah, debu, dan segala yang mengganggu kenyamanan, sedangkan “*Clear*” bermakna jernih tidak hanya ruangan, tetapi juga pikiran, hati, dan suasana belajar. Misalnya, dengan kebiasaan kecil membuang sampah pada tempatnya, mengambil sampah yang dijumpai dan membersihkan lingkungan bersama-sama, murid tidak hanya belajar menjaga kebersihan kelas, tetapi juga belajar bertanggung jawab dan taat pada aturan.

Program “*Clean and Clear*” dilaksanakan dengan cara sederhana, yaitu pada saat bel *Clean and Clear* berbunyi. Seluruh guru dan murid membersihkan kelas dan sekitarnya dengan durasi 5-10 menit. Petugas DKK (Duta Kebersihan Kelas) melaksanakan tugas yang diamanahkan, yaitu memantau kondisi kebersihan di setiap kelas dengan membawa buku checklist monitoring kebersihan. Hasil checklist monitoring ini kemudian dilaporkan kepada Guru Pegiat *Clean and Clear* setiap akhir pekan dan dijadikan sebagai dasar evaluasi program. Kelas-kelas yang belum maksimal dalam menjalankan program akan diberikan pengarahan kembali terkait pelaksanaan program yang baik dan benar.

“*Clean and Clear*” dapat menjadi sarana kegiatan inovatif yang tidak hanya mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga mendukung pendidikan antikorupsi, terutama dalam hal taat aturan dan menjaga amanah.

“TULUS: TUTOR INKLUSI UNGGUL DAN SPORTIF”

Mewujudkan Sekolah Inklusi Berbasis Karakter Peduli dan Empati
di SMPN 191 Jakarta



Tutor Sebaya mendampingi PDBK

Sumber: Dokumentasi SMPN 191 Jakarta, 2025

SMPN 191 Jakarta telah menjadi salah satu Sekolah Inklusi sejak tahun 2005. Sekolah memiliki kewajiban menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) minimal 2 murid dalam setiap kelasnya. Selama ini, pelayanan sekolah kepada murid-murid PDBK dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling serta guru khusus Pendidikan Luar Biasa. Murid reguler tidak banyak mendapatkan peran untuk memberikan pelayanan kecuali 1 orang murid reguler yang biasanya dipilih sekolah untuk menjadi Tutor Sebaya salah satu PDBK selama beraktivitas di sekolah. Melalui intervensi Program PERISAI (Penguatan Integritas dan Antikorupsi Sekolah) Sekolah 2025 Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana SMPN 191 Jakarta menjadi salah satu sekolah yang lulus kurasi dari laporan Implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di platform jaga.id, dikembangkanlah sebuah program bernama TULUS: “Tutor Inklusi Unggul dan Sportif”, bagi murid reguler. Berbeda dengan Tutor Sebaya sebelumnya, para murid reguler dan wali kelas menyepakati sistem piket dalam memberikan pelayanan kepada PDBK di kelas masing-masing.



Tampilan program TULUS yang terdapat pada platform juga.id

Sumber: Dokumentasi SMPN 191 Jakarta, 2025

Setiap harinya, ada 6 murid reguler yang diberikan amanah menjadi tutor sebaya PDBK di kelas mereka masing-masing dalam sebuah sistem piket mulai dari mendampingi PDBK belajar di kelas, mendampingi memperlancar calistung, memberikan pendampingan di luar kelas saat beristirahat, mendampingi ketika PDBK yang sedang tidak enak badan/sakit, hingga mendampingi PDBK ke kamar kecil.



Contoh sertifikat yang diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada murid sebagai Tutor Sebaya melalui program TULUS di SMPN 191 Jakarta

Sumber: Dokumentasi SMPN 191 Jakarta, 2025

Selain itu, program TULUS juga memiliki instrumen pendukung bagi murid reguler yang telah melaksanakan pelayanan sebagai Tutor Sebaya untuk dapat melaporkan kegiatan mereka melalui laman berikut.



Scan Me!



(<https://officialsatlantu.info/program-tulus-tutor-inklusi-unggul-dan-sportif/>).

Laporan dilakukan di sebuah *platform* yang disiapkan sekolah sehingga setiap murid reguler yang telah memberikan pelayanan kepada PDBK memiliki catatan yang sekaligus menjadi instrumen monitoring sekolah. Melalui instrumen ini pula, pihak sekolah dapat memberikan apresiasi dalam bentuk sertifikat apresiasi bagi Tutor Sebaya yang memiliki komitmen yang baik menjalankan amanahnya.

“Suasana sekolah berangsur berubah, murid reguler dan PDBK mulai dapat berbaur dan berinteraksi lebih baik dari sebelumnya”, begitu kira-kira menurut Achmad Rojali, Kepala Sekolah SMPN 191 Jakarta. Diakui beberapa guru, interaksi murid reguler terhadap PDBK meningkat pesat, begitupun dari sisi PDBK. Mereka, PDBK, yang tadinya hanya berinteraksi dengan sesama PDBK dan biasanya dilakukan di area Ruang Bimbingan dan Konseling, saat ini, interaksi itu sudah terjadi di seluruh lingkungan sekolah. “Karakter empati dan kepedulian murid reguler pun semakin membaik, sekarang mereka lebih mengerti bila ada PDBK yang sedang membutuhkan perhatian, mereka tidak lagi menjauhi, mereka justru memberikan dukungan dan membantu PDBK mendapatkan apa yang dibutuhkan”, kata salah satu wali kelas.

Tabel 4.2. Daftar Referensi Penguatan Pendidikan Antikorupsi

Jenjang	Judul Referensi (Modul, Buku, Video, dll)	Deskripsi Isi Referensi	Kompetensi yang Diasah
PAUD	Video Dunia Kecil yang Berharga https://www.youtube.com/watch?v=bgIEGKdg-FnA&t=97s	Dunia Kecil yang Berharga Ketaatan pada aturan dilatih melalui Disiplin Positif berbasis kesepakatan kelas, di mana murid mengenal konsekuensi logis dari pelanggaran (misalnya, penundaan istirahat jika mengganggu teman). Pengelolaan dilema etis dikenalkan melalui metode mendongeng untuk membentuk pemahaman dasar anak tentang nilai saling menghargai dan perilaku baik-buruk. Menjaga amanah ditumbuhkan melalui kegiatan nyata, seperti membersihkan halaman bersama, yang melatih tanggung jawab terhadap lingkungan bersama. Membangun budaya antikorupsi didukung kuat oleh kolaborasi antara Guru dan Orang Tua yang menggunakan Buku Afirmasi Positif untuk secara konsisten menguatkan kejujuran dan kebaikan anak.	Ketaatan pada aturan Pengelolaan dilema etis Membangun budaya antikorupsi

Jenjang	Judul Referensi (Modul, Buku, Video, dll)	Deskripsi Isi Referensi	Kompetensi yang Diasah
SD/MI	Video Pahlawan Cilik Penjaga Kebersihan https://youtu.be/iJtAh9ASK-WQ?si=YRN312O7I5KRDOCr	Pahlawan Cilik Penjaga Kebersihan Salah satu program dari MI Al Huda Ploso adalah Clean and Clear. Program ini mengajak murid-murid MI Al Huda Ploso untuk secara sadar bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan mereka dengan membentuk koordinator kebersihan kelas yang diketuai oleh "Duta Kebersihan Kelas" yang dipilih secara bergantian setiap harinya. Harapannya, dengan kebiasaan kecil membersihkan lingkungan bersama-sama, murid tidak hanya belajar menjaga kebersihan kelas, tetapi juga belajar tentang tanggung jawab, kedisiplinan, taat aturan, menjaga amanah, hingga budaya antikorupsi.	Ketaatan pada aturan Menjaga amanah Membangun budaya antikorupsi
SMP/MTs	Video Program KENDIS (Kartu Kendali Disiplin Siswa): PRAKTIK BAIK INOVASI SEKOLAH _"KENDIS" (Kartu Kendali Disiplin Siswa)	Program Kartu Kendali Siswa (KENDIS) merupakan sebuah inovasi sekolah yang dirancang untuk menumbuhkan karakter antikorupsi pada diri murid. Kartu ini berfungsi sebagai izin resmi yang harus digunakan oleh murid setiap kali ingin keluar kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Program Kartu Kendali Siswa (KENDIS) bukan hanya sekadar kartu izin keluar kelas, tetapi juga simbol kepercayaan yang diberikan guru kepada murid. Murid harus menjaga sebuah amanah yang diberikan guru kepadanya. Dengan demikian, KENDIS menjadi media pendidikan karakter yang mengajarkan kejujuran, disiplin, tanggung jawab dalam menjaga amanah. Harapannya, murid tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas dan menjauhi perilaku koruptif.	Menjaga Amanah

Jenjang	Judul Referensi (Modul, Buku, Video, dll)	Deskripsi Isi Referensi	Kompetensi yang Diasah
SMA/MA/SMK/MAK	Video SINTAS SANTIK (Sekolah Integritas, Sekolah Antikorupsi) : https://youtu.be/XaOHxrQXNtY?si=zGWW-Cv9aV5Y9AWi0	Program SINTAS SANTIK di sebuah sekolah di Jawa Timur menjadi contoh nyata bagaimana lima elemen pendidikan antikorupsi dapat dihidupkan sekaligus dalam satu gerakan. Melalui ketaatan pada aturan, seluruh kegiatan memiliki dasar hukum berupa SK Kepala Sekolah serta zona bersih dari pungli dan gratifikasi ditegakkan; dengan konsep kepemilikan, laporan dana BOS terbuka untuk umum dan murid merasa bertanggung jawab menjaga aset sekolah; lewat menjaga amanah, guru bersertifikat penyuluh antikorupsi dan murid yang diberi tanggung jawab kegiatan belajar menjalankan peran dengan integritas; aspek pengelolaan dilema etis dilatih melalui diskusi, karya tulis, dan lomba kreatif bertema kejujuran yang menuntut murid berpikir kritis dalam mengambil keputusan; sedangkan membangun budaya antikorupsi diwujudkan melalui pembiasaan transparansi, disiplin, hingga kegiatan inovatif, seperti boardgame dan karya seni integritas. Dengan cara ini, SINTAS SANTIK tidak sekadar menjadi program sekolah, melainkan gerakan membangun karakter yang mengakar, efisien, dan dapat direplikasi di sekolah lain menuju generasi emas berintegritas 2045.	Ketaatan pada aturan Konsep kepemilikan Menjaga amanah Pengelolaan dilema etis Membangun budaya antikorupsi

4.5 Implementasi PAK melalui Budaya Sekolah

Pendidikan Antikorupsi bukanlah sekadar kegiatan tambahan, tetapi merupakan bagian dari budaya sekolah yang hidup dan berkembang dalam keseharian semua warga sekolah. Nilai-nilai integritas, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepedulian, kerja keras, keberanian, kesederhanaan, kemandirian, dan keadilan harus menjadi kebiasaan, bukan hanya sekadar tercantum dalam perencanaan pembelajaran dan materi pelajaran, tetapi juga dalam perilaku pendidik, suasana kelas, tata kelola sekolah, dan hubungan sosial di lingkungan pendidikan.

Budaya sekolah menjadi wahana paling nyata bagi murid untuk mengalami nilai, bukan hanya mempelajarinya. Melalui pengalaman bersama, interaksi sehari-hari, dan keteladanan para pendidik, murid belajar mengenali, merasakan, dan menghidupi nilai-nilai antikorupsi. Implementasi pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah ini harus dilakukan secara bertahap sesuai fase perkembangan anak, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, TK/RA).

Pada pendidikan di usia dini, pendidikan antikorupsi diwujudkan melalui pembiasaan positif yang konkret dan menyenangkan. Guru menjadi teladan utama dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan penuh kasih sayang. Aktivitas dilakukan melalui bermain, bernyanyi, mendongeng, dan kegiatan sehari-hari seperti antre, berbagi, membereskan mainan, dan meminta izin saat menggunakan barang orang lain. Budaya sekolah dibangun dengan menghadirkan suasana aman, hangat, dan penuh penghargaan, sehingga anak mengenal nilai integritas melalui contoh nyata dan perasaan positif.

Sebagai inspirasi berikut beberapa contoh implementasi budaya PAK di jenjang PAUD yang sederhana, menyenangkan, dan mudah dilakukan di berbagai konteks sekolah.

- **Antre Ceria.** Guru menempel jejak kaki atau garis di lantai sebagai penanda posisi menunggu giliran cuci tangan, ke toilet, atau mengambil alat main. Anak belajar disiplin dan adil melalui kebiasaan ini, sementara Guru memberikan penguatan positif (“terima kasih sudah sabar menunggu”). Kebiasaan kecil ini pelan-pelan membentuk rasa tertib dan peduli pada hak teman.
- **Pohon Kejujuran.** Setiap perilaku jujur, misalnya mengakui menumpahkan air atau mengembalikan sesuatu yang ditemukan; dihargai dengan menempel “daun” bernama anak di pohon karton. Guru mengajak anak menceritakan singkat peristiwa jujurnya. Suasana apresiatif membuat kejujuran terasa menyenangkan, bukan menakutkan.
- **Kebun Amanah.** Kelas memiliki satu pot tanaman yang dirawat bergiliran. Jadwal menyiram ditempel dan anak menandai saat tugasnya selesai. Melalui kegiatan sederhana ini, anak merasakan tanggung jawab, kerja keras, dan kepedulian pada makhluk hidup.

Jenjang Pendidikan Dasar

Mulai dari kelas rendah (Kelas I, II, dan III SD/MI) hingga kelas tinggi (Kelas IV, V, dan VI SD/MI), budaya antikorupsi ditumbuhkan melalui pembiasaan dan refleksi sederhana. Sekolah menjadi tempat belajar untuk mempraktikkan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan melalui kegiatan harian, seperti piket kelas, menjaga fasilitas sekolah serta bekerja dalam kelompok. Guru mengintegrasikan nilai-nilai integritas dalam pembelajaran tematik dan menumbuhkan kesadaran melalui cerita, permainan, atau diskusi ringan. Lingkungan sekolah harus menampilkan simbol-simbol integritas, seperti pojok kejujuran, pohon kebaikan, dan slogan-slogan inspiratif yang membangun kesadaran moral.

Pada masa remaja awal (Kelas VII, VIII, dan IX SMP/MTs), murid mulai kritis terhadap aturan dan nilai. Budaya sekolah di masa ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran moral dan keberanian mengambil keputusan yang benar. Sekolah perlu memberi ruang bagi murid untuk berdiskusi, berpendapat, dan terlibat dalam organisasi, seperti OSIS, Pramuka, atau ekstrakurikuler sosial. Guru menumbuhkan kejujuran akademik (tidak menyontek), tanggung jawab sosial (menjaga kebersihan, membantu teman), dan keberanian menolak perilaku tidak adil. Kegiatan, seperti debat etika, kampanye integritas, dan simulasi kasus sederhana menjadi wahana pembelajaran nilai yang hidup.

Jenjang Pendidikan Menengah

Memasuki masa remaja pada pendidikan menengah (Kelas X, XI, dan XII SMA/MA/SMK/MAK), budaya antikorupsi diarahkan pada konsistensi perilaku, menjadi sumber inspirasi atau teladan, kepemimpinan berintegritas dan kesadaran sosial. Murid dilibatkan dalam kegiatan yang menumbuhkan tanggung jawab publik, seperti pengelolaan organisasi siswa (OSIS), proyek sosial, kewirausahaan berbasis integritas, atau kampanye media sosial bertema kejujuran dan keadilan. Guru berperan sebagai fasilitator dan mentor yang mendorong refleksi, analisis kritis, dan konsistensi perilaku. Sekolah menciptakan budaya transparan dan akuntabel dalam setiap kegiatan, termasuk pengelolaan dana, penilaian, dan pelaporan kegiatan.

Prinsip Implementasi Budaya Sekolah Antikorupsi: a) Keteladanan (modelling), Guru dan tenaga kependidikan (termasuk kepala sekolah) menjadi contoh nyata perilaku berintegritas; b) Pembiasaan (habituation), nilai-nilai integritas dipraktikkan terus-menerus melalui rutinitas sekolah; c) Partisipasi (participation), semua warga sekolah dilibatkan dalam menciptakan lingkungan yang jujur dan adil; d) Apresiasi (reinforcement), setiap tindakan baik diberi penghargaan untuk memperkuat perilaku positif; dan e) Keterpaduan (integration), nilai antikorupsi diintegrasikan ke dalam kurikulum, tata kelola, dan budaya keseharian.=

Sebagai inspirasi berikut beberapa contoh implementasi budaya PAK di jenjang Pendidikan Menengah.

- Kesepakatan Kejujuran Akademik. Di awal semester, wali kelas memfasilitasi dialog ringan tentang menyontek, titip absen, dan plagiarisme. Kelas menyusun “Kode Kejujuran” 5 butir (misalnya: sitasi sederhana, tidak memotret jawaban), menandatangani bersama, dan menempelkan di dinding. Guru mencontohkan cara menuliskan sumber referensi dengan bahasa yang mudah (jenjang SMP/MTS).
- Jurnal Refleksi “Satu Nilai, Satu Bukti”. Setiap akhir pekan, murid menulis singkat: nilai apa yang paling tampak minggu ini (jujur/adil/tanggung jawab), buktinya apa, dan apa rencana perbaikan. Guru menanggapi ringkas dan menonjolkan contoh baik sebagai inspirasi teman (jenjang SMP/MTS).
- Rencana Integritas Pribadi. Setiap murid menyusun narasi 1 halaman yang berisi komitmen kejujuran belajar, etika digital, kontribusi sosial, atau aspek lainnya. Wali kelas berperan sebagai mentor yang meninjau kemajuan bulanan. Dokumen sederhana ini menjadi jangkar konsistensi perilaku setiap murid sebagai remaja yang sedang membentuk jati diri (jenjang SMA/MA/SMK/MAK).
- IPA/Keahlian: Data Asli, Bukan “Dibaguskan”. Pada praktikum/laporan proyek, murid mencatat data apa adanya (termasuk yang “jelek”), menulis analisis kekeliruan, dan menyimpulkan secara jujur. Guru menilai keberanian mengakui keterbatasan, bukan hanya hasil “sempurna”. Ini membangun integritas akademik dan riset (jenjang SMA/MA/SMK/MAK).

4.6 Asesmen/penilaian PAK

Penilaian atau asesmen pada pendidikan antikorupsi mengacu pada Permendikbud No. 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian. Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa “penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid” (Pasal 1, ayat 2). Rumusan ini menegaskan bahwa asesmen tidak dimaknai sebagai mekanisme memberikan nilai, hukuman, atau membenaran semata, melainkan sebagai upaya memahami proses perkembangan murid secara berkelanjutan. Dengan kata lain, asesmen bukanlah alat menghakimi, melainkan alat membaca pertumbuhan.

Dalam konteks Pendidikan Antikorupsi, pemaknaan asesmen ini menjadi sangat relevan karena tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bukan pada ranah pengetahuan semata, jauh lebih penting adalah pembentukan sikap melalui penguatan karakter dalam rangka membangun kebiasaan hidup yang bermartabat. Penguatan karakter melalui internalisasi nilai-nilai integritas (jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras) tidak dapat diukur melalui tes pilihan ganda atau penilaian kognitif semata. Karakter tumbuh dari proses refleksi, pengalaman sosial, keteladanan, dan pengambilan

keputusan dalam situasi nyata. Karena itu, penilaian dalam pendidikan antikorupsi harus menerapkan pendekatan asesmen otentik (authentic assessment) berbasis pada bukti yang tampak dalam perilaku dan proses nyata (evidence-based). Bukti yang dimaksud dapat berupa: (1) catatan anekdot mengenai penerapan nilai-nilai integritas; (2) refleksi tentang pengalaman murid mengambil keputusan dalam berbagai situasi, terutama pada saat berada dalam situasi dilema etis dan konflik kepentingan; (3) observasi aktivitas kelas dan kebiasaan sosial murid sehari-hari, (4) dokumentasi proses kolaborasi, diskusi, dan kontribusi murid dalam kegiatan kelas, sekolah, dan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, asesmen tidak berhenti pada pertanyaan "sudah sampai mana nilai karakter terbentuk?", tetapi diperluas menjadi "apa dukungan yang diperlukan agar nilai itu tumbuh lebih kuat?". Asesmen berfungsi sebagai dasar tindak lanjut, seperti: (1) memberikan scaffolding atau bimbingan tambahan, (2) merancang aktivitas reflektif lanjutan, (3) menciptakan lingkungan kelas yang lebih aman untuk berkata jujur, (4) memperbanyak pengalaman murid dalam mengambil keputusan etis, (5) menguatkan peran teladan Guru dalam keseharian.

Hal ini selaras dengan implementasi 5 elemen Pendidikan Antikorupsi: ketaatan aturan, penghormatan kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilema etis, dan, membangun budaya integritas. Kelima elemen dapat menjadi wahana penguatan nilai-nilai integritas melalui pembiasaan dan pemaknaan, bukan sekadar hafalan atau slogan. Maka penilaian berperan memastikan bahwa nilai integritas yang dikuatkan melalui berbagai aktivitas pembelajaran, baik intra kurikuler, kokurikuler, ekstra kurikuler, dan budaya sekolah benar-benar terwujud dalam tindakan sehari-hari di manapun mereka berada.

Dengan demikian, esensi asesmen dalam Pendidikan Antikorupsi adalah mendampingi perkembangan bukan menghakimi, menuntun proses bukan menghukum, mendorong pertumbuhan karakter, bukan sekadar dijalankan. Ketika penilaian dilakukan secara otentik, reflektif, dan berorientasi tindak lanjut, pendidikan antikorupsi akan hadir bukan sebagai materi tambahan, tetapi sebagai cara hidup yang menjadi identitas moral sekolah.

Keberadaan Pendidikan Antikorupsi pada dasarnya merupakan isu prioritas dan bukan mata pelajaran khusus, sehingga tidak dibutuhkan asesmen terpisah untuk mengukur hasilnya dalam pembelajaran. Alih-alih, kompetensi pendidikan antikorupsi akan terintegrasi sebagai tujuan pembelajaran di intrakurikuler dan mengacu pada alur perkembangan dimensi profil lulusan di kokurikuler. Untuk itu, proses penyusunan asesmen sebenarnya dimulai dari penyusunan tujuan pembelajaran dan penentuan dimensi profil lulusan.

Dengan berpijak pada prinsip asesmen dalam Permendikbud No. 21 Tahun 2022 bahwa penilaian adalah proses untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan murid, maka asesmen Pendidikan Antikorupsi tidak dilakukan sebagai penilaian yang berdiri sendiri atau terpisah, melainkan menyatu dalam proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Hal ini penting agar pendidikan antikorupsi tidak dipahami sebagai mata pelajaran baru, melainkan sebagai pengalaman belajar hidup yang dialami murid sehari-hari. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan asesmen pendidikan antikorupsi secara terintegrasi.

a. Intrakurikuler

Dalam konteks pembelajaran intrakurikuler, asesmen Pendidikan Antikorupsi diintegrasikan ke dalam: tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, dan refleksi akhir pembelajaran. Contoh: pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, ketika murid diminta menyusun teks pengalaman pribadi, Guru dapat mengamati sejauh mana murid mampu: (1) Mengakui pengalaman yang gagal atau keliru secara jujur (penguatan karakter kejujuran); (2) Menunjukkan upaya memperbaiki tindakan yang keliru (penguatan karakter bertanggung jawab). Asesmen cukup dicatat dalam catatan anekdot singkat, tidak perlu formulir tambahan. Contoh catatan sederhana: "Hari ini Fajar mengakui keliru menunda tugas, lalu berjanji memperbaikinya. Perlu pemantauan lanjutan dalam satu minggu". Pendekatan ini menghindari penilaian moral yang menghakimi dan fokus pada pertumbuhan.

b. Kokurikuler

Pada kegiatan ko-kurikuler, asesmen dilakukan pada di sepanjang proses, mulai dari diskusi tema, minat kelompok (jika itu berkelompok), dan kegiatan kerjasama, dan pengambilan keputusan. Asesmen diarahkan pada perilaku partisipasi aktif, kemampuan bekerjasama, pengambilan keputusan etis, kemampuan menyelesaikan konflik sederhana. Instrumen yang digunakan dapat berupa: jurnal refleksi mingguan (1-2 kalimat), observasi sederhana berbasis bukti, self assessment (murid menilai perkembangan atau perubahan yang terjadi pada dirinya melalui refleksi). Contoh refleksi: "Saya berhasil menahan diri untuk tidak memotong giliran saat presentasi. Saya merasa bangga dan ingin mencoba lebih konsisten". Tidak perlu rubrik Panjang, cukup indikator progres, dan tidak perlu menggunakan skor angka.

c. Ekstrakurikuler dan Budaya Sekolah

Pada ranah ini, nilai antikorupsi muncul secara alami melalui: pembagian tugas, pengelolaan barang dan dana, penyelesaian tantangan kelompok, sikap sportif dan kejujuran dalam kompetisi. Asesmen ekstrakurikuler dilakukan dengan cara paling sederhana, seperti observasi bimbingan pembina, catatan perkembangan bulanan (1-2 baris per murid), dialog reflektif singkat setelah kegiatan. Contoh catatan: "Dina mulai berani menolak ajakan berbohong saat latihan laporan keuangan OSIS."

Sebagai referensi guru berikut disampaikan contoh bahan ajar disetiap jenjang pendidikan:



Scan Me!



PAUD (TK/RA)
<https://pendidikan.kpk.go.id/pustaka/detail/dacf5921-d89c-4291-9d38-27436a549d4e>



Scan Me!



SD/MI kelas 1-3
<https://pendidikan.kpk.go.id/pustaka/detail/ca7eab35-1a67-4b8e-bfe1-7cdae55cb754>




Scan Me!




SD/MI kelas 4-6
<https://pendidikan.kpk.go.id/pustaka/detail/c910a444-e908-4cb8-9114-c778f9a6d7a5>



Scan Me!



SMP/MTs
<https://pendidikan.kpk.go.id/pustaka/detail/15ff201c-f896-4ce0-9bbd-5c4c360c06fa>



Scan Me!



SMA/MA/SMK/MAK
<https://pendidikan.kpk.go.id/pustaka/detail/4d742d8a-03be-4b2f-a6f2-54768fbd9281>

4.7 Evaluasi Pelaksanaan Program PAK

Evaluasi program Pendidikan Antikorupsi (PAK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi pendidikan karakter di satuan pendidikan. Sesuai dengan misi Pendidikan Antikorupsi yang tujuan utamanya bukan sekadar penyampaian materi tentang korupsi atau perilaku koruptif, tetapi lebih kepada upaya membangun cara berpikir, bersikap, berperilaku dalam bentuk kebiasaan bertindak yang berlandaskan nilai-nilai integritas (jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras). Orientasinya adalah perubahan perilaku melalui penguatan karakter, maka pelaksanaan program perlu disertai proses evaluasi yang sistematis, mendalam, dan berkelanjutan.

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai integritas yang dibelajarkan benar-benar terinternalisasi, bukan hanya diketahui secara kognitif. Pendidikan antikorupsi hanya akan efektif apabila warga sekolah merasa, memahami, dan menghidupi nilai tersebut dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, evaluasi tidak dapat dilakukan bila hanya mengukur aspek pengetahuan atau keterampilan semata, tetapi harus memperhatikan indikasi perubahan perilaku, pola interaksi sosial, dan kualitas budaya sekolah. Selain itu, setiap sekolah memiliki konteks sosial, budaya, sumber daya, dan tantangan yang berbeda. Evaluasi memungkinkan untuk mengidentifikasi pendekatan yang tepat dan berkelanjutan sesuai karakteristik satuan pendidikan. Melalui evaluasi, sekolah/madrasah dapat mengetahui aspek mana yang telah berjalan baik, dan aspek mana yang memerlukan penguatan, serta strategi pendampingan seperti apa yang perlu diberikan kepada guru, murid, dan orang tua.



Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi bertujuan untuk: (1) menilai sejauh mana pendidikan antikorupsi diintegrasikan dalam pembelajaran, budaya sekolah, dan hubungan sosial; (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan implementasi; (3) merumuskan strategi penguatan komitmen, kapasitas, dan keberlanjutan pelaksanaan program.

Di tingkat operasional, evaluasi membantu sekolah menilai apakah: (1) nilai integritas telah diterapkan dalam kebiasaan di setiap aktivitas pembelajaran, baik intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, maupun budaya sekolah; (2) guru mampu memfasilitasi pembelajaran nilai melalui dialog reflektif, bukan sekadar instruksi dan ceramah; (3) murid memiliki keberanian untuk membuat keputusan etis, terutama dalam situasi dilema dan konflik kepentingan; (4) budaya sekolah mendukung kejujuran dan keterbukaan, bukan budaya menyalahkan,

menghakimi, atau membiarkan ketidakadilan; (5) program berjalan konsisten, tidak bergantung pada figur tertentu atau bersifat seremonial. Di sisi lain, evaluasi juga berfungsi sebagai alat pembelajaran sosial bagi guru dan sekolah. Ketika guru merefleksikan praktik pembelajaran dan melihat bagaimana nilai-nilai integritas jawab tumbuh dan berkembang dalam diri murid, guru akan terdorong untuk menguatkan keteladanan dan kualitas pengelolaan kelas. Evaluasi dalam program PAK bukan dimaksudkan untuk menghakimi, tetapi untuk menuntun, memperbaiki, dan memperkuat.

Dengan demikian, efikasi program PAK tidak hanya diukur melalui indikator administratif atau capaian dokumen, tetapi melalui transformasi budaya sekolah yang tampak dalam perilaku nyata warga sekolah. Evaluasi memberikan pijakan yang kokoh untuk memastikan bahwa implementasi program membumi, kontekstual, dan sederhana, tetapi bermakna, dan mampu bertahan jangka panjang. Evaluasi yang baik menjadikan pendidikan antikorupsi bukan sekadar program, tetapi identitas moral sekolah. Prinsip utama agar implementasi Pendidikan Antikorupsi dapat membumi dan realistis, antara lain adalah: (1) mulai dari hal kecil, dekat, dan relevan; (2) praktek lebih penting daripada dokumen; (3) refleksi lebih kuat daripada ceramah; (4) keteladanan lebih efektif daripada pemaksaan aturan; (5) keberlanjutan lebih bermakna daripada kegiatan seremonial.

Berikut contoh ruang lingkup, aspek evaluasi, dan instrumen yang dapat digunakan sebagai berikut.

No	Aspek	Fokus Pertanyaan	Indikator	Metode Pengumpulan Data
1.	Kepemimpinan dan Komitmen Sekolah	Sejauh mana kepala sekolah, guru dan komite sekolah menunjukkan komitmen nyata?	Kebijakan sekolah, keteladanan nilai, koordinasi, arah program jangka panjang	Wawancara KS dan Guru, dokumen, observasi rapat
2.	Pemahaman Konsep dan Nilai Integritas	Apakah warga sekolah memahami makna jujur, amanah, adil, tanggung jawab?	Mengungkap nilai dengan bahasa sendiri, memberi contoh kasus, konsistensi sikap	FGD Guru dan murid, survei sederhana

No	Aspek	Fokus Pertanyaan	Indikator	Metode Pengumpulan Data
3.	Integrasi dalam Pembelajaran (Intrakurikuler)	Apakah nilai integritas masuk dalam aktivitas belajar, bukan hanya teori?	RPP/LKPD/ penugasan memuat pengalaman reflektif, bukan ceramah	Observasi pembelajaran, telaah RPP, dokumentasi
4.	Penguatan Budaya Sekolah (Kokurikuler dan Ekstrakurikuler)	Apakah nilai antikorupsi hadir dalam kebiasaan hidup sekolah?	Antri, jaga fasilitas, pojok jujur, kode etik kelas, rapat adil	Observasi lingkungan, jurnal kelas, catatan Guru
5.	Lingkungan Sosial-Emosional	Apakah anak merasa aman untuk jujur?	Tidak ada tekanan untuk menyontek, bully moral ditekan	Survei persepsi murid, dialog kelas
6.	Kemitraan Orang Tua dan Komunitas	Apakah pesan integritas selaras antara sekolah dan rumah?	Komunikasi rumah-sekolah, kegiatan bersama	Wawancara orang tua, studi kasus
7.	Asesmen Karakter	Apakah asesmen digunakan untuk memahami perkembangan, bukan menghukum?	Observasi berkelanjutan, jurnal refleksi, catatan anekdot	Telaah instrumen, observasi praktik
8.	Keberlanjutan Program	Apakah program berpotensi berlangsung terus, bukan sekadar proyek?	Ada tim inti, SOP sederhana, pembiasaan yang melekat	Analisis dokumen & wawancara

Evaluasi harus sederhana, tidak membebani Guru, tetapi bermakna, berikut contoh instrumen/ teknik pengumpulan data

Teknik	Sasaran	Bentuk
Observasi Partisipatif	Budaya kelas d sekolah	Catatan lapangan, foto aktivitas
Wawancara Terarah	KS, Guru, murid, orang tua	Wawancara setengah terbuka
FGD	Guru dan murid	Diskusi nilai dan pengalaman
Telaah Dokumen	RPP, jurnal kelas, SOP sekolah	Analisis konten
Survei Cepat	Murid d orang tua	Kuesioner 5-10 item

Contoh kerangka analisis efikasi implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan menggunakan model input, proses, output, outcome, dan dampak seperti berikut ini.

Tahap	Fokus Analisis	Pertanyaan Kunci
Input	Kesiapan SDM, kebijakan, materi	Apakah semua pihak paham mengapa program ini penting?
Proses	Kegiatan pembelajaran dan budaya sekolah	Apakah nilai diterapkan setiap hari atau di setiap aktivitas yang terkait, bukan hanya diajarkan atau diterapkan dengan mengandalkan kekuatan sanksi, hukuman atau reward?
Output	Perubahan perilaku awal	Perilaku apa yang mulai tampak berbeda, mengapa?
Outcome	Pembiasaan & konsistensi	Apakah penerapan nilai-nilai integritas menjadi kebiasaan yang otomatis muncul dalam sikap dan perilaku?
Dampak	Budaya sekolah berintegritas	Apakah sekolah memiliki identitas moral yang kuat?



**Halo! Saya, Panji.
Yuk simak caraku melakukan asesmen
pendidikan antikorupsi.**

1. Dari Peta Kompetensi

Identifikasi kompetensi pendidikan antikorupsi yang sesuai dengan jenjang murid. Pilih dan prioritaskan kompetensi berdasarkan hasil pemetaan pendidikan antikorupsi.

2. Dari tujuan pembelajaran

Susunlah tujuan pembelajaran berdasarkan Capaian Pembelajaran mata pelajaran. Integrasikan kompetensi pendidikan antikorupsi dalam alur tujuan pembelajaran dan detailkan dalam perencanaan pembelajaran.

3. Perencanaan Pembelajaran

Buat perencanaan pembelajaran sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Integrasikan perencanaan pembelajaran dengan kompetensi pendidikan antikorupsi.

4. Merancang Asesmen

Buat rancangan asesmen pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Sesuaikan jenis asesmen berdasarkan tujuan pembelajaran dan juga kegiatan pembelajarannya, apakah asesmen formatif atau asesmen sumatif.

Contoh Asesmen Intrakurikuler di SMA

Mata pelajaran Fisika kelas X (Fase E) bertema “Pemanasan Global dan Perubahan Iklim” mengajak murid memahami fenomena perubahan iklim melalui simulasi bermain peran. Dalam kegiatan ini, murid belajar melihat kaitan antara sains, etika, dan tanggung jawab terhadap lingkungan secara nyata dan bermakna (contoh modul ajar: <https://s.id/ModulAjarFisikaSMA>)

Tujuan Pembelajaran

Murid mampu menganalisis konsep ilmiah Pemanasan Global, mengevaluasi dilema etis yang ditimbulkannya, dan menunjukkan integritas dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab melalui simulasi bermain peran.

Perencanaan Pembelajaran

- Eksplorasi Peran: Setiap kelompok menerima kartu peran berisi tugas dan sudut pandang; berdiskusi memahami peran dan tanggung jawabnya.
- Persiapan Argumentasi: Kelompok merumuskan argumen, data, dan kebijakan dengan mempertimbangkan dilema etis. Pertanyaan pemandu: "Bagaimana kita dapat merumuskan kebijakan yang adil secara etis, yang menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi saat ini dan tanggung jawab terhadap kesehatan planet serta generasi masa depan?" Guru membimbing agar setiap kelompok menjaga nilai integritas dalam berpikir dan berargumen.
- Role Playing: Sidang kabinet dipandu guru; setiap peran menyampaikan argumen, bernegosiasi, dan mengambil keputusan bersama secara mufakat atau mayoritas.
- Refleksi: Murid menulis pengalaman menjaga integritas dan tantangan etis yang dihadapi dalam perannya.
- Pendekatan: Mindful, Meaningful, dan Joyful Learning – memahami konsep secara mendalam, menerapkannya dalam konteks nyata, dan belajar secara interaktif serta reflektif.

Asesmen Pembelajaran

Asesmen pembelajaran dilakukan secara formatif melalui penilaian kinerja pada kegiatan diskusi, presentasi, dan pengisian LKPD menggunakan rubrik penilaian. Di akhir kegiatan, murid mengisi lembar refleksi untuk mengevaluasi pemahaman dan sikap integritas selama proses pembelajaran (terlampir di modul). Adapun rubrik penilaian kinerja sebagai berikut:

No	Aspek yang Dinilai	Indikator Kinerja	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
1	Kualitas Argumentasi & Data (Penalaran Kritis)	Kesesuaian dengan data ilmiah, ketajaman analisis dilema etis, dan logika usulan kebijakan	Argumen pembuka didukung sepenuhnya oleh data ilmiah yang relevan dan menganalisis dilema etis (integritas) secara mendalam. Usulan kebijakan sangat inovatif dan realistis.	Argumen didukung oleh data ilmiah yang relevan dan menganalisis dilema etis. Usulan kebijakan realistis dan logis.	Argumen didukung data, namun kurang relevan atau analisis dilema etis dangkal. Usulan kebijakan kurang spesifik.	Argumen tidak didukung data ilmiah atau tidak relevan dengan peran dan topik. Tidak ada analisis dilema etis.
2	Keterampilan Komunikasi & Negosiasi	Penyampaian argumen yang persuasif, kemampuan merespons sanggahan, dan mempertahankan posisi etis	Menyampaikan posisi dengan sangat jelas, persuasif, dan logis. Mampu merespons sanggahan dengan tenang, berbasis fakta, dan secara efektif mempertahankan integritas posisi.	Menyampaikan posisi dengan jelas dan logis. Merespons sebagian besar sanggahan dengan baik, mempertahankan posisi dengan konsisten.	Penyampaian cukup jelas, namun kurang persuasif. Kesulitan merespons sanggahan atau cenderung emosional.	Penyampaian tidak jelas atau sulit dipahami. Gagal merespons sanggahan dan tidak mampu mempertahankan posisi.

No	Aspek yang Dinilai	Indikator Kinerja	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
3	Integritas Peran & Etika Pengambilan Keputusan	Konsistensi sikap dan keputusan dengan kepentingan/ data ilmiah peran, serta upaya mencari solusi adil (integritas)	Bertindak sangat konsisten dengan peran, secara eksplisit menunjukkan dilema integritas, dan berupaya keras mencapai solusi yang adil secara global/etis, meskipun sulit.	Bertindak konsisten dengan peran. Menyadari dilema integritas dan berkontribusi pada solusi yang adil.	Kurang konsisten dengan tuntutan peran atau hanya fokus pada kepentingan kelompok tanpa mempertimbangkan integritas moral/global.	Tidak memahami atau mengabaikan tuntutan peran. Tidak menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab moral/etis dalam pengambilan keputusan.
4	Kolaborasi Kelompok (LKPD)	Kerja sama tim, pembagian tugas, dan partisipasi aktif semua anggota dalam perumusan argumen	Semua anggota berpartisipasi aktif dalam diskusi/persiapan. Pembagian tugas jelas dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menghasilkan argumen yang terstruktur.	Sebagian besar anggota berpartisipasi. Pembagian tugas cukup jelas. Argumen kelompok terstruktur dengan baik.	Hanya beberapa anggota yang dominan. Pembagian tugas tidak merata. Argumen kelompok kurang terstruktur.	Partisipasi anggota sangat minim. Kerja sama tidak terlihat. Kelompok kesulitan menghasilkan argumen pembuka yang solid.

Asesmen Sumatif

Dilaksanakan pada akhir topik pembelajaran.

Tujuan: Murid mampu menganalisis konsep ilmiah Pemanasan Global, mengevaluasi dilema etis yang ditimbulkannya, dan menunjukkan integritas dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab melalui simulasi bermain peran.

Aktivitas: Role Playing "Sidang Kabinet Darurat Iklim". Murid bermain peran dengan diberikan tantangan dan memberikan solusi terkait dalam menjaga integritas peran Anda (misalnya: konsisten dengan data ilmiah, menjaga kepentingan kelompok, atau memperjuangkan keadilan etis) selama Sidang Kabinet serta satu konsep Fisika (misalnya: Efek Rumah Kaca, Gas Rumah Kaca, atau biaya transisi energi) yang menjadi dasar terkuat dalam argumen Anda atau argumen kelompok lain. Instrumen: Menggunakan rubrik yang sama dengan asesmen formatif.

Asesmen Kokurikuler di SD

Judul Kegiatan: KEWIRAUSAHAAN : PASAR MINI SEKOLAH (MENYATUKAN ILMU, KARAKTER DAN KREATIVITAS MURID)



Satuan Pendidikan	:	MI AL-Huda Ploso Nganjuk
Kelas / Fase	:	VI / C
Tema Kegiatan	:	Kewirausahaan
Alokasi Waktu	:	108 JP
Lokasi Kegiatan	:	Lingkungan satuan pendidikan

A. Peta Kompetensi Pendidikan Antikorupsi

- Menjaga amanah di lingkungan sekolah/madrasah dan tempat tinggal termasuk dalam situasi konflik kepentingan. (Menjaga Amanah)
- Berpartisipasi aktif dalam kegiatan di lingkungan sekolah/madrasah dan tempat tinggal yang mendukung nilai-nilai integritas. (Budaya Antikorupsi)
- Menjalankan aturan dengan kesadaran (Ketaatan pada Aturan)

B. Tujuan Pembelajaran

1. Mempraktikkan musyawarah untuk membuat kesepakatan dan aturan bersama serta menerapkannya dalam lingkungan keluarga dan sekolah. (Pendidikan Pancasila)
2. Membuat karya seni rupa berdasarkan pengalaman dan/atau hasil pengamatan terhadap lingkungan sekitar melalui pengembangan imajinasi. (Seni Budaya)
3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang. (Matematika)
4. Menulis berbagai tipe teks sederhana berdasarkan gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, dan/atau imajinasi dengan rangkaian kalimat kompleks secara kreatif, menarik, dan/atau indah. (Bahasa Indonesia)

C. Dimensi Profil Lulusan

1. Kolaborasi
2. Kreativitas
3. Penalaran Kritis

D. Praktik Pedagogis

Pembelajaran kokurikuler dengan bentuk kolaboratif lintas disiplin ilmu menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan pembelajaran mendalam.

E. Lingkungan Pembelajaran

Lingkungan pembelajaran dirancang untuk membangun budaya belajar kolaboratif lintas disiplin ilmu. Murid diberi kesempatan mempraktikkan musyawarah, membuat desain brosur dengan kreatif, menyelesaikan masalah, menulis dan mempresentasikan laporan dengan kritis. Budaya belajar yang dikembangkan mendorong murid untuk bersikap taat aturan, amanah, dan berbudaya antikorupsi.

F. Kemitraan Pembelajaran

Kolaborasi dilakukan dengan melibatkan murid, guru, wali murid, dan warga sekitar.

G. Pemanfaatan Digital

Video pembelajaran, aplikasi desain, dan media sosial milik sekolah yang dimanfaatkan untuk memperluas interaksi dan eksplorasi.

H. Kegiatan

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan rangkaian aktivitas yang akan dilakukan.

2. Murid dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen.
3. Murid diminta mencari informasi kepada orang tua atau lingkungan sekitar tentang makanan dan minuman yang memungkinkan untuk dipasarkan sesuai aturan yang ditentukan dan dilaksanakan dengan amanah.
4. Murid berdiskusi dalam kelompok secara aktif dan berpikir kritis untuk menyampaikan informasi tentang jenis makanan dan minuman yang akan dipasarkan.
5. Murid mengumpulkan data tentang daftar dan jumlah barang, harga modal, harga jual, dan perkiraan laba dengan jujur.
6. Secara mandiri dan kreatif murid merancang strategi dan desain pemasaran.
7. Secara kelompok murid menyiapkan stand pemasaran dan melakukan penjualan barang dengan sopan, jujur dan tidak manipulatif.
8. Guru melakukan penilaian proses kegiatan.
9. Secara kelompok murid menyusun laporan hasil kegiatan dengan penuh tanggung jawab.
10. Murid mempresentasikan laporan melalui berbagai media secara santun dan berani.
11. Guru memberikan umpan balik laporan dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi.
12. Guru dan murid melakukan refleksi dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

I. Asesmen

Formatif: Teknik observasi dengan instrumen catatan anekdotal

No	Nama Murid	Catatan Guru		
		Kolaborasi	Kreativitas	Penalaran Kritis
1				
2				
dst.				

Sumatif: Penilaian kinerja dengan instrumen rubrik

No.	Dimensi Profil Lulusan	Subdimensi	Berkembang	Cakap	Mahir
1.	Kolaborasi	Kerjasama	Mulai bekerjasama dengan teman sebaya dan anggota keluarga dengan bimbingan guru dan orang tua di lingkungan satuan pendidikan dan keluarga.	Bekerja sama dengan teman sebaya dan anggota keluarga dengan bimbingan guru dan orang tua di lingkungan satuan pendidikan dan keluarga.	Menunjukkan inisiatif untuk bekerjasama dengan teman sebaya dan anggota keluarga di lingkungan satuan pendidikan dan keluarga.
2.	Kreativitas	Karya	Membuat tindakan dan/ atau karya sederhana yang kreatif sesuai minat dan kesukaannya.	Membuat tindakan dan/ atau karya sederhana yang kreatif dengan berbagai ide yang sesuai minat dan kesukaannya.	Membuat tindakan dan/atau karya sederhana yang kreatif dengan berbagai ide yang sesuai minat dan kesukaannya serta mengkritisi tindakan dan/atau karya yang dihasilkan.
3.	Penalaran Kritis	Penyampaian argumentasi	Menyampaikan argumen sederhana meskipun belum tepat .	Menyampaikan argumen sederhana secara runtut disertai alasan.	Menyampaikan argumen sederhana secara runtut disertai alasan secara mandiri.
		Penyelesaian Masalah	Menyelesaikan masalah sederhana dan menghasilkan solusi namun kurang tepat.	Menyelesaikan masalah sederhana dan menghasilkan solusi yang tepat sesuai dengan konteks.	Menyelesaikan masalah sederhana dan menghasilkan solusi yang tepat sesuai dengan konteks secara mandiri.

5

Peran Sentral Jejaring Pendidikan dalam Pendidikan Antikorupsi



Peran Sentral Jejaring Pendidikan dalam Pendidikan Antikorupsi

Peran Berbagai Pihak dalam Pendidikan Antikorupsi

Sebagaimana diketahui, tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* karena dapat dilakukan oleh setiap orang, terorganisir, dapat terjadi di lintas negara (transnasional) serta memiliki dampak merusak yang luas di berbagai sendi kehidupan sehingga dalam pemberantasannya diperlukan cara-cara yang luar biasa serta peran aktif dari banyak pihak/stakeholders. Sebagai salah satu dari strategi pemberantasan korupsi sekaligus mandat Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pendidikan Antikorupsi (PAK) juga memerlukan sinergi dari banyak pihak, baik dari Pemerintah maupun masyarakat umum.

Dalam *blueprint* Kedeputan Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK (2021) disebutkan tujuan dari PAK adalah meningkatnya sikap dan perilaku antikorupsi murid. Pendidikan antikorupsi sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang terstruktur di satuan pendidikan (Sekolah/Madrasah) melalui integrasi pada kurikulum, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler serta dukungan penguatan integritas ekosistem pendidikan yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku antikorupsi murid.

Salah satu prinsip PAK yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu kolaboratif, yang menekankan pentingnya kerja sama dan kemitraan yang kuat, baik di internal sekolah/madrasah maupun para pihak di luar sekolah yang saling mendukung dan bersinergi mencapai tujuan bersama (KPK, 2023). Keberhasilan PAK tidak hanya pada kurikulum pendidikan formal yang diberikan kepada murid, tetapi juga pada peran multipihak dalam melakukan pembenahan ekosistem serta tata kelola secara transparan dan akuntabel.

5.1 Prinsip Kemitraan dalam Mendukung Implementasi PAK

Sebagai salah satu strategi pemberantasan korupsi, cakupan PAK diharapkan sampai kepada seluruh jenjang pendidikan tanpa kecuali. Untuk itu, KPK tidak mungkin bekerja sendiri, tetapi berbagai upaya dan inisiatif strategis dilakukan, seperti advokasi kebijakan, penyediaan bahan



ajar/materi pendukung PAK, pemberdayaan serta penguatan kapasitas, piloting implementasi PAK Sekolah/Madrasah, pendampingan dan dukungan, dll. Kerja sama multipihak menjadi kunci keberhasilan implementasi PAK.

Kemitraan multipihak ini dapat berjalan dengan baik dengan menjalankan beberapa prinsip sebagai berikut.

a. Agenda dan Tujuan bersama

Keberhasilan kolaborasi memerlukan tujuan kolektif yang jelas (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks PAK tujuan yang dimaksud adalah membentuk sikap dan perilaku berintegritas serta menumbuhkan budaya antikorupsi pada murid.

b. Inklusif dan Keseimbangan Peran

Kolaborasi multipihak ditandai dengan distribusi peran yang jelas dan berkesinambungan antara multipihak (Bryson, Crosby, & Stone, 2006). Keterlibatan aktif Pemerintah dalam hal pembuat kebijakan PAK yang dilanjutkan dengan kebijakan turunannya di Pemerintah Daerah, dukungan sarana prasarana, baik dari Pemerintah maupun swasta, kontribusi akademisi, keterlibatan CSO sebagai pembawa aspirasi hingga implementasinya di sekolah/madrasah terus bergerak secara proporsional sesuai peran dan fungsi masing-masing.

c. Transparan dan Akuntabel

Transparan dan akuntabel merupakan pondasi kepercayaan dalam kolaborasi. Berbagai peran dapat berjalan dengan dukungan ekosistem pendidikan yang juga berintegritas. PAK tidak hanya diberikan sebagai bagian dari pembelajaran pada kurikulum, tetapi juga mendukung tata kelola yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

d. Komunikasi

Kania dan Kramer (2011) menekankan komunikasi intensif dan berkelanjutan sebagai faktor pengikat dalam kemitraan. Forum rutin PAK, baik secara daring maupun luring untuk memfasilitasi pertukaran informasi, gagasan/ide, diseminasi bahan ajar, bimbingan teknis, dan aktivitas pendukung lainnya.

e. Kelembagaan dan Komitmen

Untuk menjamin keberlanjutan kerja sama kemitraan multipihak, komitmen yang dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan dan kerja sama, misalnya peraturan, MoU, PKS, atau berupa kontrak/target kinerja PAK sehingga berbagai inisiatif nantinya tidak bersifat sementara, tetapi berkelanjutan.

f. *Monitoring dan Evaluasi*

Monitoring dan Evaluasi PAK penting untuk memastikan jalannya kemitraan berdampak, tidak hanya pada capaian output, tetapi juga *outcome* berupa perubahan sikap dan perilaku murid seperti yang diharapkan.

Untuk mencapai tujuan PAK dan dukungan ekosistem pendidikan yang berintegritas tidak hanya terbatas pada intervensi murid sebagai fokus utama, tetapi juga perlu kerja sama dengan para pemangku kepentingan lain yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung berjalannya implementasi. Kementerian yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, lalu di tingkat pemerintah daerah ada kepala daerah, dinas yang membawahi pendidikan, pengawas sekolah, organisasi kemasyarakatan dan/ komunitas pendidikan/pihak swasta, akademisi/pakar, dan tentu saja satuan pendidikan dari kepala sekolah, tenaga kependidikan/pegawai sekolah, komite sekolah, orang tua, dan guru sebagai motor utama dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi kepada murid.

Peran *stakeholders* dalam mendukung pendidikan antikorupsi.

- a. Menetapkan, mengoordinasikan, dan mendukung kebijakan pendidikan antikorupsi, baik di pusat maupun daerah.
- b. Menjalin kemitraan melalui kolaborasi dengan berbagai kegiatan/aktivitas pendukung pendidikan antikorupsi berupa kajian/survei, narasumber/tenaga ahli, penyediaan sarana prasarana, pemberitaan, pembuatan bahan ajar/materi pembelajaran, kompetisi/perlombaan, dll;
- c. Diseminasi dan sosialisasi kebijakan serta praktik baik implementasi PAK secara luas; dan
- d. *Monitoring dan evaluasi* implementasi PAK.

Secara garis besar, alur kemitraan Pendidikan Antikorupsi digambarkan sebagai berikut.

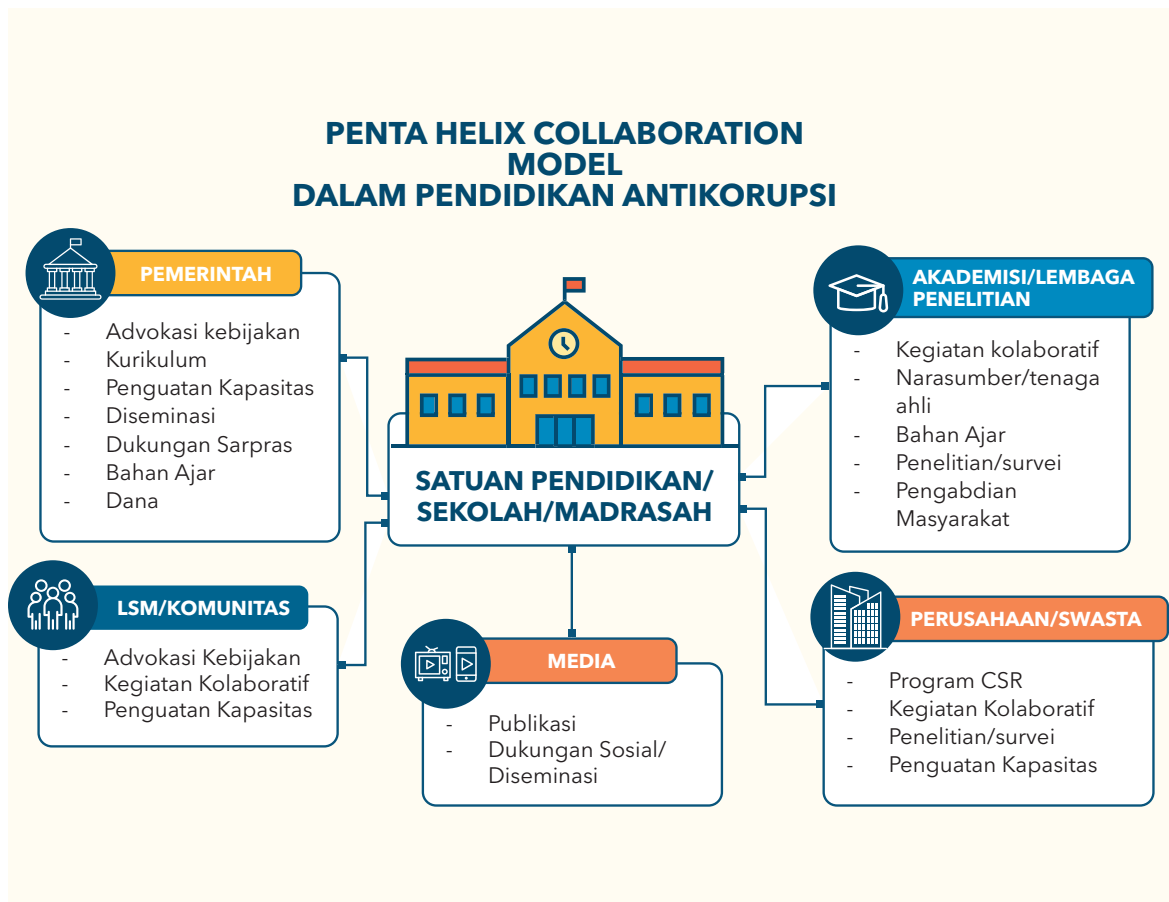


5.2 Pendekatan *Pentahelix Collaboration* dalam Upaya Pemberantasan Korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi

Sejalan dengan prinsip kolaboratif pada PAK, *Pentahelix Collaboration Model* dengan pelibatan 5 (lima) unsur, yaitu *Governance, Business, Community, Academy dan Media* (GBCAM) dapat memperkuat posisi dan implementasi PAK. Model ini merupakan pengembangan model *triplehelix* (Wang, 2014) dan *Quadruple* (McAdam dan Debackere, 2017) yang mulai populer di Indonesia sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 yang selanjutnya menjadi dasar pengembangan pariwisata berkelanjutan yang selanjutnya juga dapat diterapkan pula pada berbagai sektor, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi (Kismartini, dkk. 2022).

Pendekatan *Pentahelix Collaboration* sebagai upaya meningkatkan peran mitra kolaboratif, khususnya pada PAK melibatkan unsur Pemerintah, sektor swasta, komunitas, akademisi dan media menjadi salah satu upaya strategis dan komprehensif untuk memperkuat peran dari masing-masing *stakeholders* dalam mendukung implementasi PAK. Fungsi dan peran dari setiap pihak nantinya akan saling berinteraksi satu sama lain membentuk model kolaborasi untuk mencapai tujuan PAK.

Peran dari masing-masing unsur dalam PAK dapat terlihat dari gambar berikut.



Secara lebih detail peran dari masing-masing pihak dijelaskan sebagai berikut.

Pemerintah

Pemerintah pusat maupun daerah, seperti KPK, Kementerian yang membidangi Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Dinas/Kanwil yang membawahi Pendidikan menjadi penggerak melalui kebijakan dan regulasi PAK. Kementerian yang membidangi pendidikan mengintegrasikan materi pendidikan antikorupsi dan nilai-nilai integritas ke dalam kurikulum dengan menyiapkan instrumen panduan berdasarkan peta kompetensi, Kementerian Dalam Negeri melakukan percepatan implementasi melalui kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah yang selanjutnya diturunkan kepada Dinas terkait hingga ke satuan pendidikan, KPK bersama para pihak menyusun peta kompetensi, menyelenggarakan penguatan kapasitas, membuat materi/bahan ajar/referensi yang dapat digunakan guru untuk mendukung implementasi PAK di Sekolah/ Madrasah masing-masing.

<p>Akademisi dan Lembaga Penelitian</p>	<p>Akademisi dan Lembaga Penelitian hadir dengan kontribusi yang kuat melalui berbagai bentuk kegiatan dalam pembelajaran, penelitian/kajian/survei yang mendukung perkembangan dan implementasi PAK, menjadi mentor para guru/kepala sekolah, menjadi narasumber/tenaga ahli dalam penyusunan kebijakan, pembuatan materi/buku/bahan ajar, kurikulum PAK serta berbagai program kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan/Daerah dan Sekolah/Madrasah, termasuk dalam pengabdian masyarakat.</p>
<p>Dunia Usaha dan Swasta</p>	<p>Dunia Usaha/Perusahaan Swasta berperan melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), pendanaan sarana prasarana pendukung PAK, seperti pendanaan penelitian/survei, penguatan kapasitas sekolah/kepala sekolah/guru, penggandaan dan diseminasi materi/buku dan perangkat sosialisasi serta menjadi mitra pada berbagai program pendukung PAK.</p>
<p>LSM dan Komunitas</p>	<p>Organisasi masyarakat sipil dan komunitas selalu dekat dengan masyarakat, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi. LSM dan komunitas dengan kekuatan jejaringnya menjadi akselerator PAK melalui program kolaboratif, penguatan kapasitas sekolah, termasuk guru dengan berbagai metode/pendekatan, menjadi wadah dan fasilitator antar pemangku kebijakan dalam implementasi PAK dengan pelibatan langsung satuan pendidikan, Pemerintah, dan swasta serta turut menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi PAK.</p>
<p>Media</p>	<p>Media berfungsi memperluas jangkauan dan membawa pesan integritas serta PAK sebagai <i>check and balances</i> berbagai program yang menyertainya. Melalui berbagai kana/medial pemberitaan baik media online/cetak, audio, audio visual/TV/Youtube/media sosial, media menjadi penghubung para pihak dengan masyarakat yang lebih luas, meskipun saat ini PAK sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi secara pemberitaan masih minim jika dibandingkan dengan penindakan ke depan diharapkan akan lebih masif dalam menyuarakan PAK.</p>



Halo! Saya, Krisna.

Yuk simak bagaimana Jejaring Pendidikan saling bersinergi dalam kegiatan Pendidikan Antikorupsi.

“MEMBANGUN GENERASI BERINTEGRITAS”

Kolaborasi Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, dan Forum Komunikasi Penyuluh Antikorupsi di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur



Pemilihan Duta Pelajar Antikorupsi Provinsi Jawa Timur

Sumber foto : Dokumentasi Dinas Pendidikan Jawa Timur

Gerakan pendidikan antikorupsi di Indonesia terus menunjukkan perkembangan menggembirakan melalui inovasi dan kolaborasi di berbagai daerah. Salah satu inisiatif paling inspiratif lahir di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 melalui program Duta Pelajar Antikorupsi (DPAK). Program ini merupakan gagasan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dikembangkan bersama Forum Penyuluh Antikorupsi (Jatim PAK) dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dengan misi menanamkan nilai-nilai integritas sejak usia sekolah menengah. DPAK tidak sekadar ajang pemilihan simbolis, tetapi gerakan pembinaan karakter antikorupsi yang berkelanjutan. Program Duta Pelajar Antikorupsi (DPAK) terus mengalami peningkatan peserta dari tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024. Tahun 2025 ini sebanyak 3.063 mendaftar mengikuti seleksi DPAK. Para duta aktif membuat konten edukatif bertema antikorupsi, mengisi MPLS, dan terlibat dalam roadshow Bus KPK. Melalui akun media sosial @dpak.jatim, mereka menyebarkan pesan kejujuran dengan gaya khas GenZ yang ringan, kreatif, dan menginspirasi. Sinergi antara Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan Penyuluh Antikorupsi menjadikan DPAK model kolaborasi daerah yang efektif, sekaligus sumber inspirasi nasional.



Selain di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Duta Integritas (*West Java Youth Camp*) pada tahun 2024. Program ini menjadi ajang pembentukan karakter dan kepemimpinan bagi pelajar SMA/MA/SMK/MAK. Melalui kegiatan perkemahan, pelatihan nilai, dan diskusi reflektif, peserta dilatih menjadi agen perubahan yang jujur, disiplin, dan tangguh. Para duta bertugas mengenalkan nilai-nilai antikorupsi di sekolah, menginspirasi teman sebaya, dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam membiasakan budaya integritas di lingkungan pendidikan. Program yang melibatkan perwakilan pelajar dari seluruh kabupaten/kota ini telah menjadi simbol gerakan pelajar berintegritas di Jawa Barat. Masih di Tahun 2024.



Aksi dan pemberdayaan Duta Pelajar Antikorupsi memberikan sosialisasi terkait integritas serta materi antikorupsi pada saat MPLS

Sumber foto : Dokumentasi Dinas Pendidikan Jawa Timur

Provinsi Jawa Tengah juga meluncurkan Program Sekolah Berintegritas sebagai wujud nyata penerapan nilai antikorupsi di satuan pendidikan. Program ini dikembangkan atas kolaborasi antara Pemerintah dengan forum penyuluh antikorupsi dengan tujuan membangun budaya sekolah yang jujur dan transparan. Salah satu output utama program ini adalah lahirnya Duta Integritas Sekolah, yakni perwakilan pelajar yang berperan sebagai teladan, komunikator nilai integritas, dan penggerak kegiatan edukasi antikorupsi di lingkungan sekolahnya.



Aksi dan pemberdayaan Duta Pelajar Antikorupsi memberikan sosialisasi terkait integritas serta materi antikorupsi pada saat MPLS

Sumber foto : Dokumentasi Dinas Pendidikan Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Banten mengembangkan semangat serupa dengan membentuk Duta Pelajar Integritas sejak 2024. Program yang digagas oleh Inspektorat Provinsi Banten, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, menghimpun pelajar SMA dari berbagai wilayah dalam wadah GALAKSI (Generasi Pelajar Lawan Korupsi). Komunitas ini menjadi ruang pembinaan, berbagi pengalaman, dan kolaborasi lintas sekolah. Setiap tahun, para duta dikumpulkan dalam kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tingkat Provinsi. Pemerintah Banten kini menyiapkan perluasan ke tingkat kabupaten/kota melalui pembentukan Forum Pembina Duta Integritas, bahkan merencanakan perluasan ke kalangan mahasiswa dan pemuda.

Dari Kalimantan Timur, Kota Samarinda menghadirkan inovasi lokal bertajuk Duta Literasi Antikorupsi sejak 2024, hasil kolaborasi Forum Penyuluh Antikorupsi dan Inspektorat Kota. Program ini melibatkan pelajar SMA sebagai narasumber muda dalam kegiatan Inspektorat Goes to School ke berbagai SMP, memperkenalkan nilai kejujuran dan tanggung jawab melalui dialog interaktif. Selain di sekolah, para duta juga aktif di Inspeccorner, pojok edukasi antikorupsi di area car free day setiap akhir pekan. Dengan pendekatan literasi dan permainan edukatif, nilai integritas disampaikan secara kreatif dan menyenangkan, menjangkau masyarakat lintas usia.

Dari Jawa Timur yang memulai, Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memperluas, hingga Banten dan Samarinda yang mengembangkan, terbentuklah rantai gerakan pelajar antikorupsi di seluruh Nusantara. Setiap daerah memiliki bentuk dan strategi berbeda, namun satu semangat menyatukan mereka yakni membangun generasi muda yang jujur, berani, dan berintegritas. Pendidikan antikorupsi adalah pendidikan karakter yang hidup. Ia tumbuh melalui keteladanan, kolaborasi, dan ruang partisipasi nyata bagi pelajar. Dengan dukungan pemerintah, forum penyuluh antikorupsi, guru, dan masyarakat, gerakan ini menjadi fondasi kuat menuju masa depan Indonesia yang bersih, beretika, dan bermartabat.

“JALUR ANTAR JEMPUT MURID TANPA MACET”

Kolaborasi Madrasah Ibtidaiyah Al Huda, Ploso, Nganjuk, Jawa Timur,
dengan Lingkungan Sekitar

Madrasah Ibtidaiyah Al Huda di bawah naungan Yayasan Hasyimiyyah di Jalan Letjend Suprpto, Ploso, Kabupaten Nganjuk. Berada di lingkungan perumahan yang bersih dan asri dengan ruas jalan utama yang cukup lebar dengan akses jalur-jalur swadaya desa yang lebih kecil bagi warga. Aktivitas antar jemput di area madrasah di pagi dan sore hari selalu menarik menjadi perhatian masyarakat sekitar. Murid yang diantar menggunakan sepeda, sepeda motor atau bahkan mobil, kerap menghasilkan aktivitas lalu lintas yang sangat sibuk. Aktivitas antar jemput sekolah ataupun madrasah di pagi hari sering menjadi buah bibir masyarakat yang mengakses jalur yang sama. Kemacetan dan hiruk pikuk akibat antrian kendaraan yang mengantar murid-murid di pagi hari seperti ini sering menjadi cerita hangat masyarakat sekitar.

Potensi ini menjadi pemikiran panjang pihak Yayasan Hasyimiyyah, yang memiliki beberapa lembaga pendidikan, termasuk MI Al Huda Ploso. Dengan jumlah murid sekitar 500 murid, potensi kehebohan antar jemput di pagi hari sangatlah besar. Pada kunjungan monitoring dan evaluasi KPK dalam Program Rencana Tindak Lanjut yang dilakukan MI Al Huda Ploso sebagai salah satu peserta *Anti Corruption Academy (ACA) 2024*, 13 Agustus 2024, mendapati pandangan menarik terkait pengelolaan jalur antar-jemput murid di pagi hari. Lokasi madrasah yang ada di ujung Jalan Letjen Suprpto I, Ploso, yang sehari-hari dapat digunakan dua arah tapi tidak di pagi hari. Pengantar diharuskan memutar melalui Jalan Letjen Suprpto III dan tembus ke jalur swadaya masyarakat dari arah timur madrasah. Dalam wawancara Tim KPK kepada Kepala Madrasah MI Al Huda Ploso disampaikan bahwa kolaborasi tersebut dilakukan oleh Yayasan dan Masyarakat sekitar untuk menghindari potensi kekacauan lalu lintas proses antar jemput di pagi hari. Bahkan, jalan tembus yang digunakan untuk memutar kendaraan roda dua pengantar tersebut khusus dibuat untuk kebutuhan menghindari potensi kekacauan lalu lintas antar jemput di pagi hari. Bagi KPK, kolaborasi ini sangat kental dengan nilai Kepedulian dan Tanggung Jawab baik dari pihak madrasah maupun masyarakat.

Dalam konteks berbagi peran menciptakan lingkungan yang kondusif, apa yang dilakukan oleh MI Al Huda Ploso dan masyarakat sekitar sangat mencerminkan implementasi Elemen Tata kelola, butir Partisipasi, Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi dalam membangun lingkungan yang tertib dan nyaman untuk semua pihak. Lingkungan yang memiliki visi mendukung nilai ketertiban akan secara langsung mendukung penanaman kompetensi Ketaatan Aturan bagi murid dan seluruh warga madrasah. Aturan dibuat untuk memberikan manfaat bukan hanya untuk madrasah tapi untuk semua pihak.

Berikut di bawah ini merupakan dokumentasi situasi antar jemput tanpa macet dari Tim KPK saat melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi KPK dalam Program Rencana Tindak Lanjut yang dilakukan MI Al Huda Ploso sebagai salah satu peserta Anti Corruption Academy (ACA) 2024, 13 Agustus 2024.



Sumber foto: Dokumentasi KPK, 2024

“SISTEM ZONASI SEKOLAH BERKEADILAN”

Kolaborasi SMA Negeri 1 Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali,
dengan Banjar Adat Desa Kutuh

Pada era Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022/2023 banyak kasus pelanggaran integritas yang dilakukan baik oleh pihak orang tua maupun sekolah. Celah penerbitan surat domisili palsu dan kongkalikong data Kartu Keluarga menjadi kasus yang paling marak terjadi. Kerugian yang paling besar dirasakan adalah pihak calon murid yang hidup di lingkungan sekitar sekolah yang sudah berharap dapat mengenyam pendidikan yang berkeadilan. Potensi celah ini disikapi oleh SMA Negeri 1 Kuta Selatan dan Banjar Adat Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali, dengan menyepakati transparansi data PPDB jalur zonasi dari kedua belah pihak. Bali memang memiliki 2 sistem yang berjalan beriringan dan saling mengisi. Sistem Banjar Adat sebagai bagian dari kearifan lokal dan Banjar Dinas sebagai bagian dari sistem nasional, saling bersinergi membangun masyarakat Bali. Di wilayah perkotaan, di mana masyarakatnya banyak yang sudah tidak saling kenal, atau tidak terbangunnya komunikasi yang baik antara sekolah dan masyarakat, menjadi celah terjadinya pelanggaran integritas dalam proses PPDB. Kolaborasi antara SMA Negeri 1 Kuta Selatan dan Banjar Adat Desa Kutuh menutup semua potensi tersebut. Masyarakat desa yang saling kenal dan hafal semuaarganya akan sulit untuk disusupi ‘oknum’ luar desa yang ingin memanfaatkan celah yang potensial dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab. Sehingga, murid-murid SMAN Negeri 1 Kuta Selatan yang masuk menggunakan jalur zonasi dapat dipastikan sebagian besar merupakan anak-anak dari Desa Kutuh.

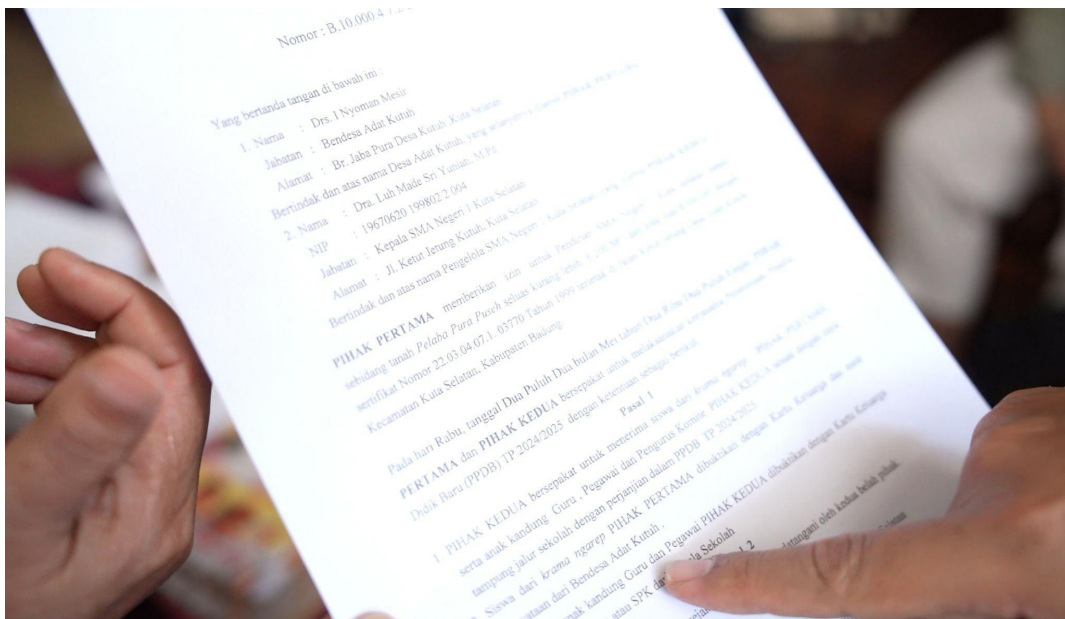


Foto MOU antara sekolah dan pihak desa

Sumber foto: Dokumentasi SMA N 1 Kuta Selatan, 2024

Kolaborasi ini sangat baik dalam membangun ekosistem sekolah yang berintegritas. Proses PPDB yang bersih akan secara otomatis menghasilkan output yang juga bersih. Ekosistem sekolah yang berintegritas adalah dukungan terbaik dalam proses menciptakan generasi penerus bangsa yang berintegritas dan 'tidak mau korupsi'. Seperti air aquarium yang bersih, tentu akan memberikan kesehatan maksimal bagi ikan-ikan di dalamnya. Sebaliknya, bila airnya kotor, otomatis akan memberikan dampak buruk bagi seluruh ekosistem. Analogi ini dapat memberi gambaran, untuk menyembuhkan ikan-ikan sakit yang hidup di dalam aquarium dengan air yang kotor adalah dengan membersihkan airnya sebagai unsur ekosistem utama. Usaha menyembuhkan ikan-ikan yang sakit dengan memberikan berbagai 'intervensi' tidak akan efektif bila nantinya dikembalikan ke aquarium yang masih menggunakan air kotor.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2025) Panduan Pembelajaran dan Asesmen (https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/1755668120_manage_file.pdf)
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2025) Panduan Kokurikuler (<https://kurikulum.kemdikbud.go.id/hasil-pencarian/?h=rujukan&q=Panduan%20Kokurikule>)
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review*, 66(s1), 44-55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Cressey, Donald R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe, IL: Free Press.
- Direktorat Jejaring Pendidikan. (2023). Panduan pendidikan antikorupsi jenjang dini-dasar (untuk PAUD, SD, SMP dan sederajat). Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kania, J., & Kramer, M. (2011). Collective impact. *Stanford Social Innovation Review*, 9(1), 36-41. https://ssir.org/articles/entry/collective_impact
- Fisman, Raymond & Miguel, Edward. (2008). *Economic Gangsters: Corruption, Violence, and the Poverty of Nations*. Princeton University Press, New Jersey.
- Gong, T., & Yang, S. (2019). *Preventing Corruption in Asia: Institutional Design and Policy Capacity*. Routledge.
- Kemendikbud dan KPK. (2012). Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan. In *Kemendikbud dan KPK* (Vol. 12, Issue 2).
- KPK. (2024). Laporan Kajian Nilai-Nilai Integritas, Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Jakarta: Kementerian Pariwisata.

- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2018). Edisi Revisi Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/1752637369_manage_file.pdf)
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025) Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan No. 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/1753929861_manage_file.pdf)
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025) Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan No. 058/H/KR/2025 tentang Alur Pengembangan Kompetensi (https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/1759304686_manage_file.pdf)
- Kismartini, K., Widowati, N., Syaharani, S. P., & Pramudita, A. G. (2022). Penta helix collaboration dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(2), 401-415. <https://doi.org/10.47828/jjana.v10i2.259>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Panduan Praktis Implementasi Pendidikan Antikorupsi Bagi Guru PPKN SMP/MTS. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2021). Cetak Biru Kedeputan Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Kedeputan Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Kenali Bahayanya: Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini. Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya. Diakses dari: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Panduan Pendidikan Antikorupsi Jenjang Dini-Dasar. Direktorat Jejaring Pendidikan KPK.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi. Direktorat Jejaring Pendidikan KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2024). Jejak Korupsi Sumber Daya Alam: Menganiaya Alam, Merusak Manusia. Jakarta: KPK
- Kotter, J. P. (2012). Leading change. Harvard Business Press.
- Learning Policy Institute. Impact of Restorative Practices (report and factsheet). Semantic Scholar+1
- McAdam, M., & Debackere, K. (2017). Beyond 'triple helix' toward 'quadruple helix' models in regional innovation systems: Implication for theory and practice. *R & D Management*, 47(1), 1-7. <https://doi.org/10.1111/radm.12224>
- Lederach, John Paul. (1995). Preparing for Peace: Conflict of Transformation across Culture. Syracuse University Press.
- Mocan, N. (2022). Education, corruption, and political engagement: Evidence from a natural experiment. *Journal of Economic Behavior & Organization*.
- Nelsen, J., Lott, L., & Glenn, H. S. (2007). Positive discipline in the classroom: Developing mutual respect, cooperation, and responsibility in your classroom (4th ed.). Three Rivers Press.
- Nelsen, J. Positive Discipline (situs/arsip/buku). Positive Discipline+2Internet Archive+2
- Minnesota Department of Education. Restorative Practices in Schools Research (evidence base). Minnesota Department of Education
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020), Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology* <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860>. Self Determination Theory+1
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. Self-Determination Theory (review & preprintGossen, D. Restitution and Restitution Triangle (modul & buku). cdn-gbelajar.simpkb.id+1
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Sauve, B., Woodley, J., Jones, N. J., & Akhtari, S. (2023). Methods of preventing corruption: A review and analysis of select approaches (Research Report 2023-R010). Public Safety Canada. <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/2023-r010/2023-r010-en.pdf>.
- Sweeney, G. (2013). Schools and teaching lay the foundations for fighting corruption (Policy Brief No.6/2013). Transparency International. https://files.transparencycdn.org/images/2013_Policybrief_6_Teaching_Foundations_EN.pdf
- Transparency International. (n.d.). Corruption Perceptions Index. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/>
- Transparency International Indonesia. (2026). Korupsi, Kebebasan Sipil & Akses pada Keadilan: Corruption Perceptions Index 2025. Transparency International Indonesia. <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2026/02/Presentasi-CPI-2025-1.pdf>
- UNESCO/Save the Children. Positive Discipline in the Inclusive, Learning-Friendly Classroom. UNESCO Documentation+1
- UNICEF/WHO/UNESCO. School-Based Violence Prevention (pelatihan disiplin positif). UNICEF
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). United Nations Convention against Corruption. Diakses dari https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf
- OECD (2018). Education for public integrity: Teaching on anti-corruption, values and the rule of law. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/133291ea-en>
- UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).
- Wang, S. (2014). Research on the collaborative governance model in the charity organization under polycentric perspective. *Open Journal of Social Sciences*, 2(9), 263-269. <https://doi.org/10.4236/jss.2014.29044>.
- World Bank. (1997). Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank. Washington, DC: World Bank.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH